

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN I TA 2026

BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG



KATA PENGANTAR / SAMBUTAN



KATA PENGANTAR

Kepala Balai Besar POM di Bandung

“Balai Besar
Pengawas Obat dan
Makanan di Bandung
selaku Unit Pelaksana
Teknis di Lingkungan
Badan POM RI
senantiasa selalu
berkomitmen menjamin
mutu Obat dan
Makanan yang beredar
di masyarakat”

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa karena penyusunan Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM di Bandung dapat diselesaikan. Tahun 2026, merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025 – 2029. Pada tahun 2026, terjadi beberapa isu strategis baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi pencapaian kinerja Balai Besar POM di Bandung. Namun, hal-hal tersebut tidak menjadi hambatan tetapi dijadikan sebagai tantangan untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam rangka “menjamin mutu Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat”.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan TA 2026 maka disusunlah Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM di Bandung ini. Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Laporan Kinerja berisi penjelasan yang memadai atas pencapaian setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja instansi/Unit Kerja Eselon I/Satuan Kerja, termasuk aspek keuangan yang secara langsung mengaitkan hubungan antara anggaran negara yang dibelanjakan dengan hasil atau manfaat yang diperoleh. Selain itu, Laporan Kinerja juga menjelaskan tentang keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai target kinerja. Capaian kinerja dianalisis dengan membandingkan target dan realisasi dari setiap indikator yang tercantum pada Perjanjian Kinerja. Analisis/Evaluasi atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN TAHUN 2026

Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung disusun pada akhir Triwulan I TA 2026 pelaksanaan program/kegiatan yang memiliki dua tujuan utama yaitu (1) Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. (2) Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berbagai kendala dan hambatan dialami dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2026, namun dengan meningkatkan efektifitas dan efisiensi sumber daya yang ada serta kerjasama yang baik maka target kinerja dapat dicapai.

Akhir kata, kami berharap Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada pemberi mandat dan dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja Badan POM serta Balai Besar POM di Bandung di Tahun berikutnya.

Bandung, 24 April 2026

Kepala Balai Besar POM di Bandung,



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi
Ringkasan /Ikhtisar Eksekutif
Tim Penyusun Laporan Kinerja
Highlight Kinerja

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
1.2 Gambaran Umum Organisasi
1.3 Struktur Organisasi
1.4 Isu Strategis

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis Tahun 2025-2029
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2026
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2026
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2026
2.5 Metode Pengukuran

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi
3.1.1 Sasaran Kegiatan Ke-1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
3.1.2 Sasaran KegiatanKe-2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi
3.1.3 Sasaran KegiatanKe-3: Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT

- 3.1.4 Sasaran KegiatanKe-4: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu
- 3.1.5 Sasaran KegiatanKe-5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT
- 3.1.6 Sasaran KegiatanKe-6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif
- 3.1.7 Sasaran KegiatanKe-7: Layanan Publik UPT yang Prima
- 3.1.8 Sasaran KegiatanKe-8: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal
- 3.2 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi
- 3.3 Realisasi Anggaran

BAB IV Penutup

- 4.1 Kesimpulan
 - 4.2 Saran
-

Lampiran

RINGKASAN EKSEKUTIF

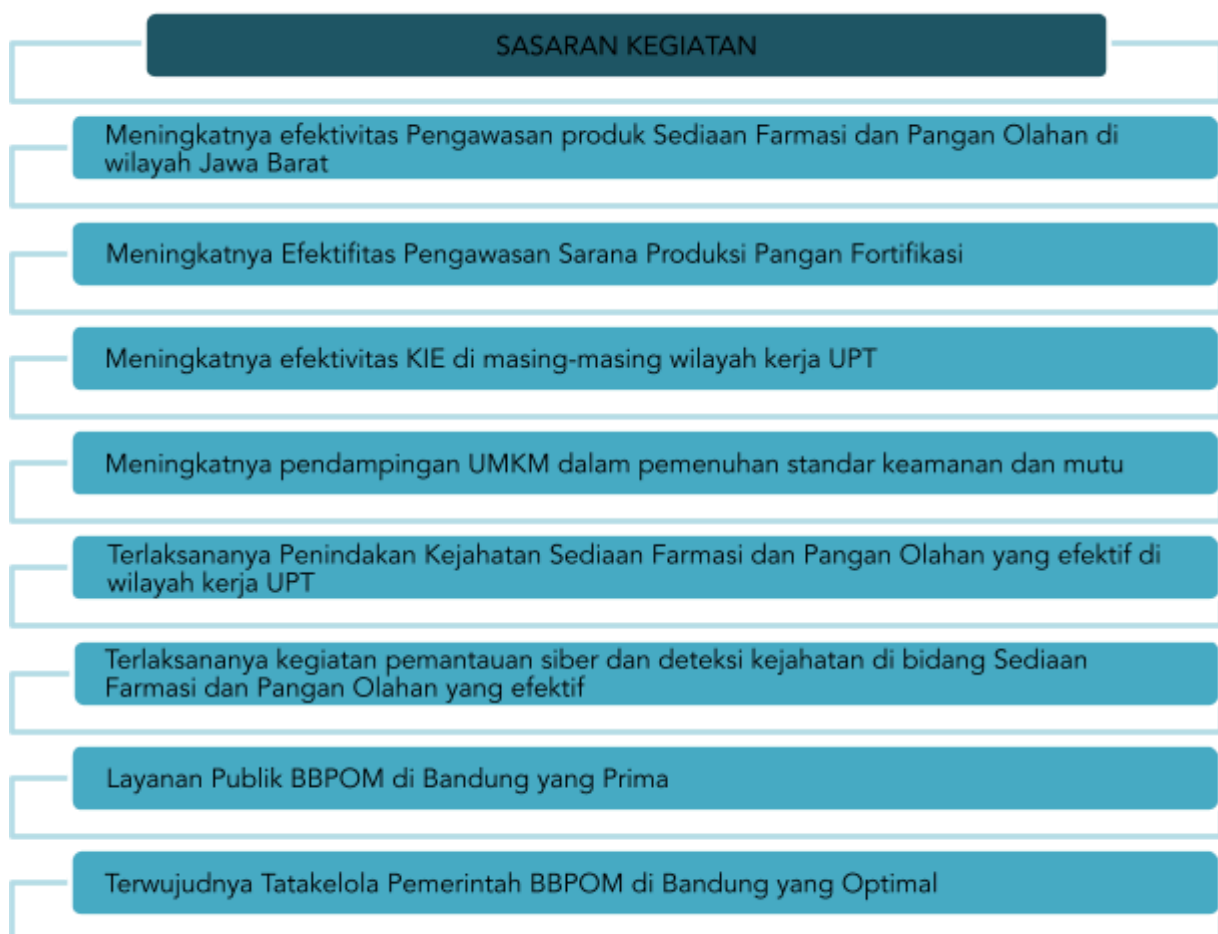
Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung sebagai wujud Akuntabilitas Kinerja Balai Besar POM di Bandung kepada publik/pemberi mandat yang sekaligus memberikan gambaran mengenai keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya selama Triwulan I TA 2026. Selain sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada publik/pemberi mandat, Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung ini merupakan instrumen untuk mengevaluasi pencapaian Kinerja Balai Besar POM di Bandung selama Triwulan I TA 2026 yang dapat dijadikan umpan balik bagi perbaikan kinerja di tahun berikutnya.

Dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis, tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 ditetapkan. Tujuan Pengawasan Obat dan Makanan Tahun 2025-2029, yaitu :

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen BBPOM di Bandung dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, BBPOM di Bandung bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih obat dan makanan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi obat dan makanan.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor obat dan makanan. BBPOM di Bandung berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko

kejahatan obat dan makanan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.



Tujuan yang telah ditetapkan menjadi arahan bagi Balai Besar POM di Bandung dalam merumuskan sasaran kegiatan, kebijakan, program dan kegiatan. Sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan Balai Besar POM di Bandung Tahun 2026 dan Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung Tahun 2026, telah ditetapkan sebanyak 8 (delapan) Sasaran Kegiatan yang harus dicapai oleh Balai Besar POM di Bandung.

Pengukuran kinerja yang tercantum dalam dokumen Kinerja Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025 berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung yang telah ditetapkan pada tanggal 26 Februari 2026. Perjanjian kinerja

tersebut merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahun 2026. Pada sasaran kegiatan kesatu yaitu **“Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat”** diperoleh capaian indikator kinerja dengan kategori Sangat Baik sebanyak 9 (sembilan) indikator, yaitu Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103.81%, Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 101.46%, Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 104.46%, Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 107.61%, Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 103.33%, Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 102.15%, Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 104.37%, dan Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar sebesar 109.08%, dan Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 100.11%. 1 (satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder sebesar 93.84%. 1 (satu) indikator dengan kategori cukup yaitu Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 74.87%. Dan 4 (empat) indikator diukur pada Triwulan berikutnya atau Akhir Tahun yaitu Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM, Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar, Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT, dan Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.

Sasaran kegiatan kedua yaitu **“Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi”** diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Baik, yaitu Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100.00%.

Sasaran kegiatan ketiga yaitu **“Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat”** diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 100.69%. Serta 3 (tiga) indikator dengan kategori Baik yaitu Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 100.00%, Jumlah desa pangan aman sebesar 100.00%, dan Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 100,00%.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN TAHUN 2026

Sasaran kegiatan keempat yaitu “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” diperoleh capaian 1 (satu) indikator kinerja dengan kategori Kurang, yaitu Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 35.23%.

Sasaran kegiatan kelima yaitu “Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Sangat Baik yaitu Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT sebesar 101.63%.

Sasaran kegiatan keenam yaitu “Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif” diperoleh capaian 1 (satu) indikator dengan kategori Baik yaitu Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 100,00%.

Sasaran kegiatan ketujuh yaitu “Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima” terdapat 1 (satu) indikator diukur pada akhir tahun yaitu Indeks Pelayanan Publik UPT.

Sasaran kegiatan kedelapan yaitu “Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal” terdapat 4 (empat) indikator diukur pada akhir tahun yaitu Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung, Nilai AKIP Balai Besar di Bandung, Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung, dan Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung.

Pada Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp38.711.257.000,-. Pada TA 2026 terdapat pengurangan Pagu Belanja ke RO Khusus sebesar Rp5.914.388.000,-. sehingga Pagu Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung TA 2025 menjadi Rp32.796.869.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp32.480.885.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dengan presentase 22.20% yaitu sebesar Rp7.211.414.065,-. Dari Indikator Kinerja yang telah dilaksanakan diperoleh tingkat efisiensi tertinggi, yaitu Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung. Sedangkan tingkat efisiensi terendah adalah pada Indikator Kinerja Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium.

Kegiatan BBPOM di Bandung yang dilakukan selama Triwulan I Tahun 2026 telah dilaksanakan dengan Tidak Efisien karena adanya Efisiensi Anggaran. Meskipun demikian pada Tahun berikutnya akan terus ditingkatkan sesuai dengan pedoman Renstra Balai Besar POM tahun 2025-2029.

HIGHLIGHT **KINERJA**



HIGHLIGHT KINERJA

1. Balai Besar POM di Bandung telah mendapatkan Sertifikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tanggal 20 Desember 2021 dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



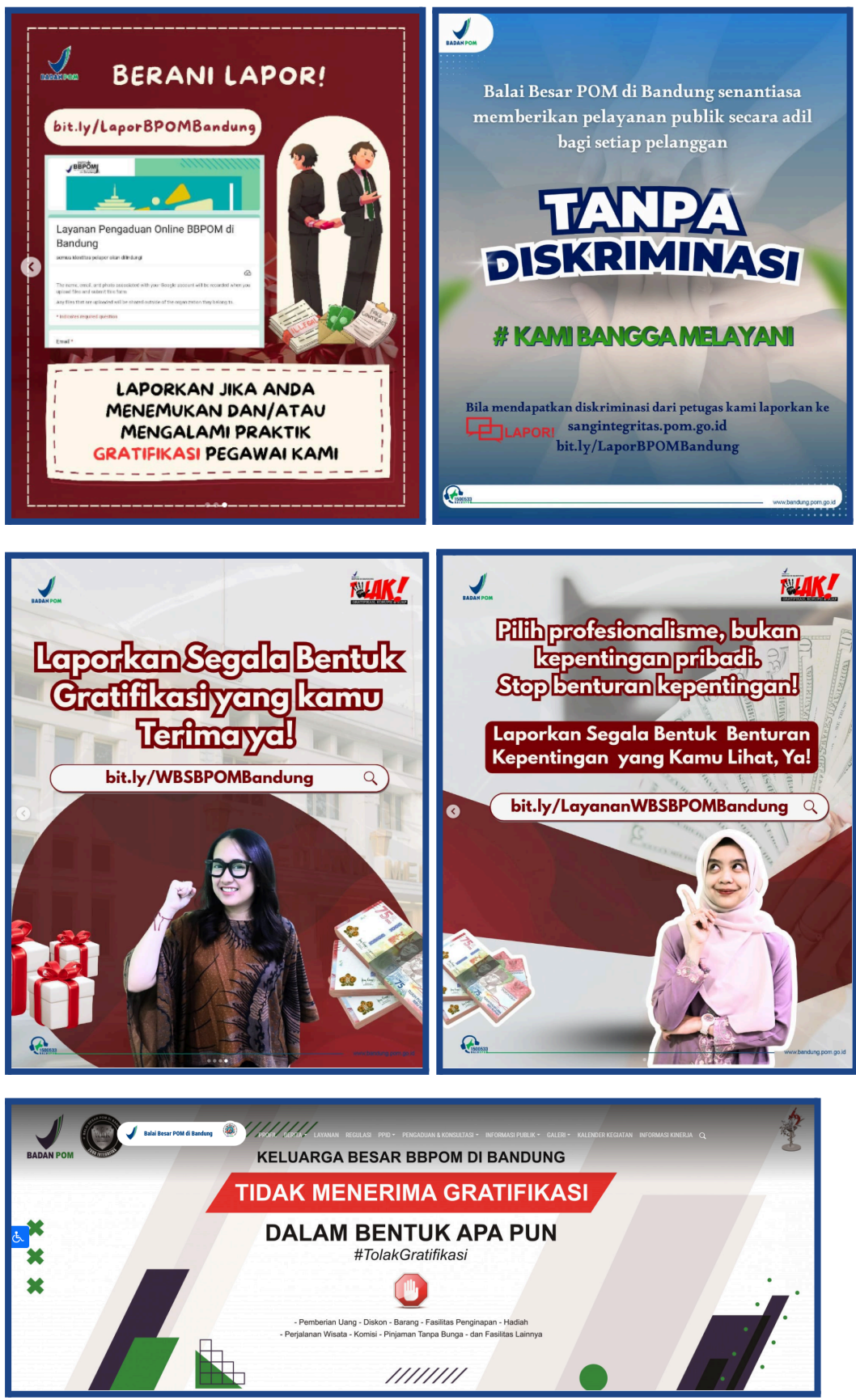
Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi BBPOM di Bandung

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

2. Sebagai Upaya pemberantasan Korupsi, Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 sesuai dengan Surat Rekomendasi Sucofindo International Certification Service Nomor. 5932/SERCO-XI/VP/2024 tanggal 20 November 2024. Selain itu Balai Besar POM di Bandung juga secara aktif memberikan informasi Anti Korupsi melalui Media Sosial dan Subsite Balai Besar POM di Bandung.

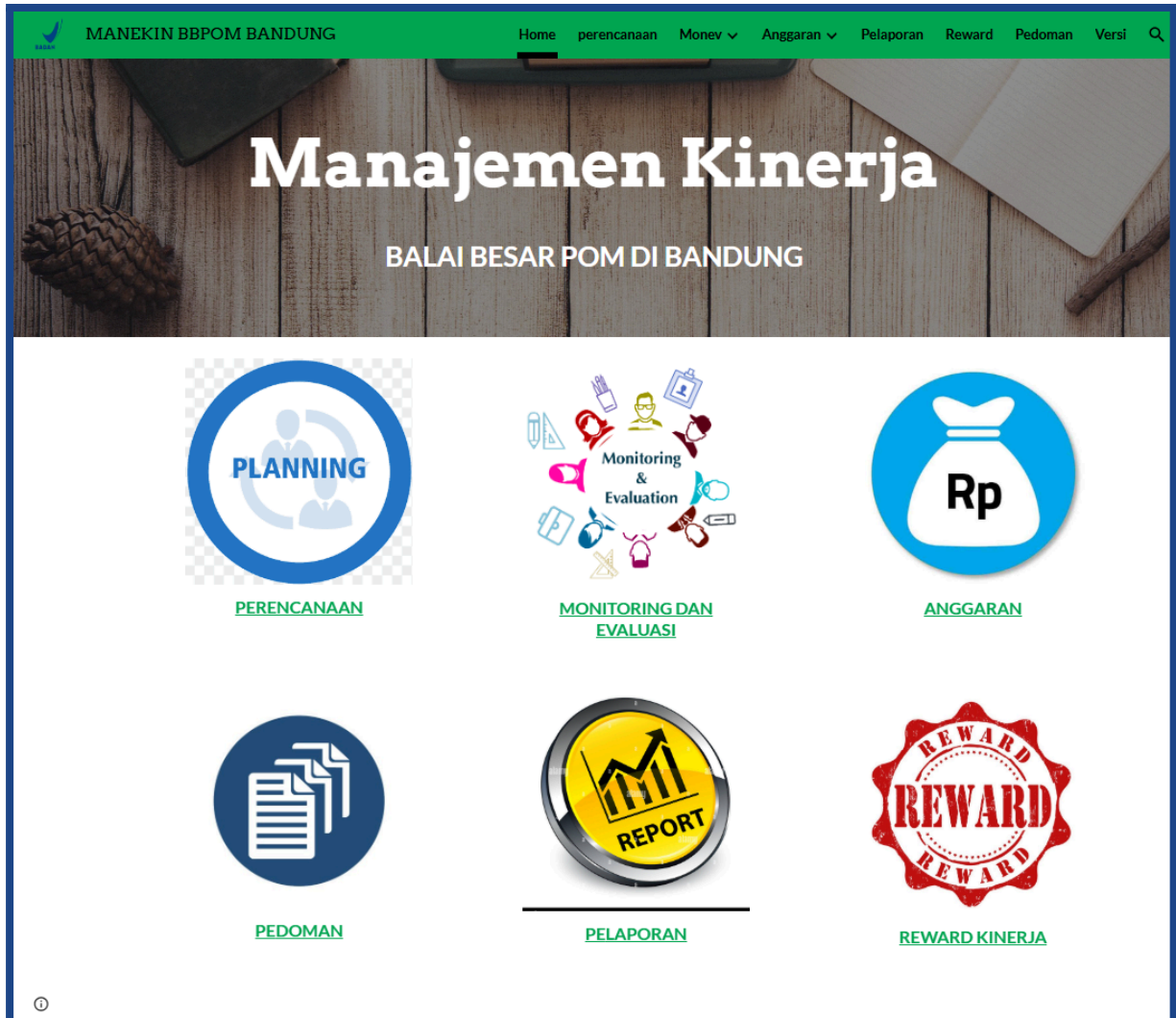


Gambar 1.2 Sertifikat SNI ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan



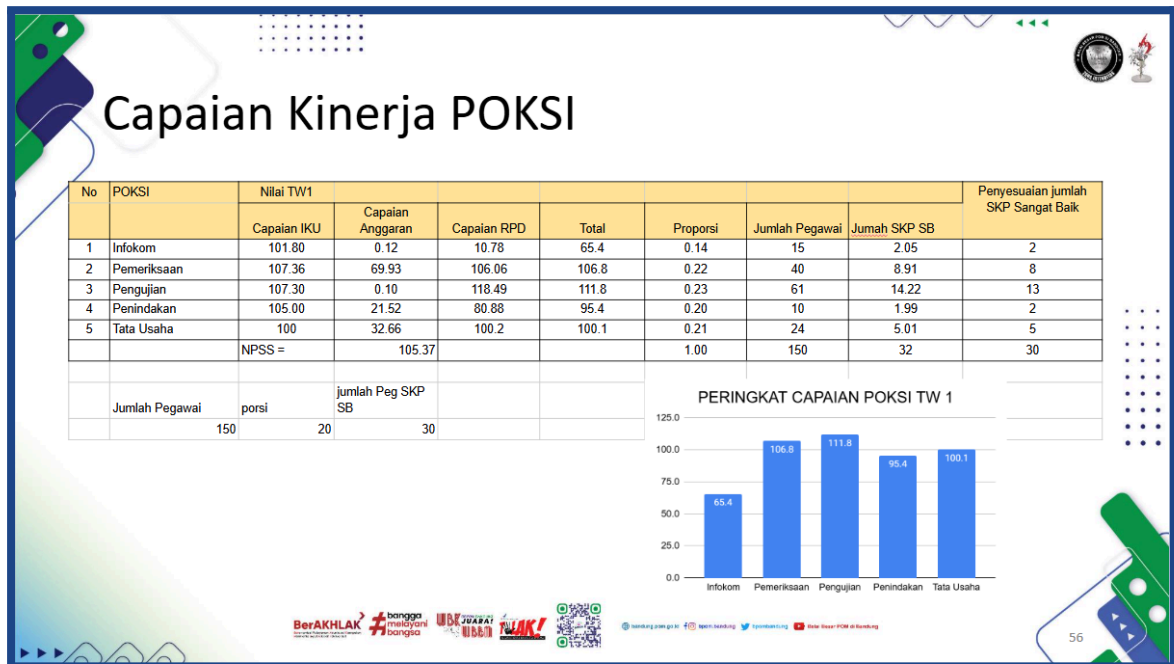
Gambar 1.3 Informasi Media Sosial tentang Anti Penyuapan dan Gratifikasi

- Balai Besar POM di Bandung telah membuat Inovasi dalam Pengelolaan Kinerja melalui Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung sebagai aplikasi untuk pengelolaan kinerja BBPOM di Bandung mulai dari perencanaan, Monitoring dan Evaluasi, sampai dengan pengelolaan Anggaran.



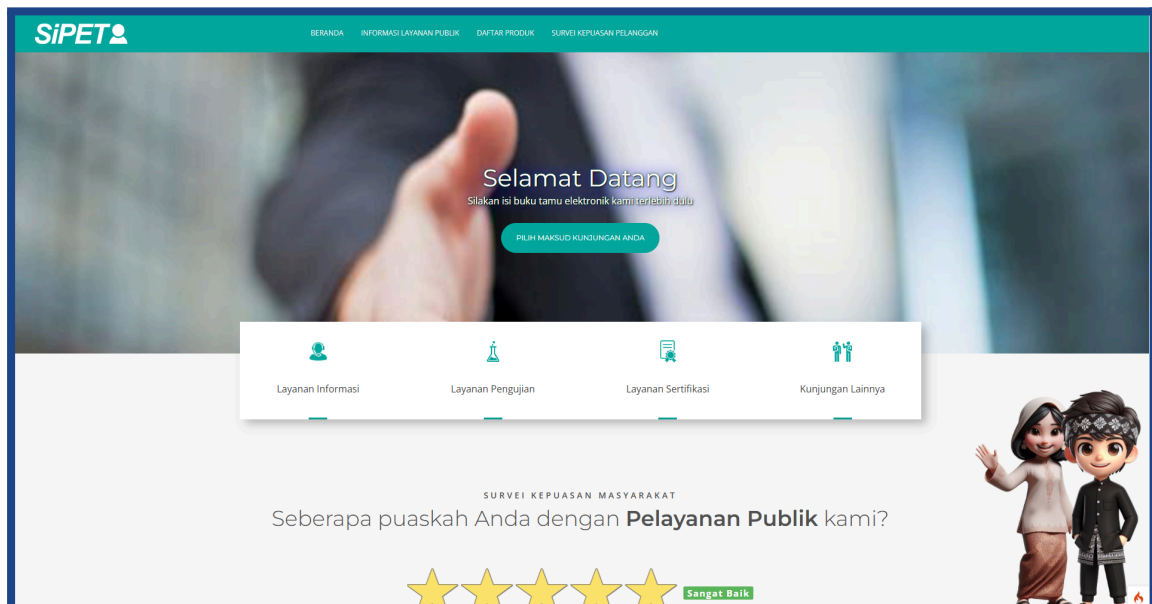
Gambar 1.4 Google Site Manajemen Kinerja BBPOM di Bandung

4. Balai Besar POM di Bandung telah membuat inovasi penerapan Reward and Punishment pengukuran kinerja Pegawai untuk menentukan proporsi predikat kinerja Pegawai sesuai dengan tugas dan tanggungjawab setiap pegawai.



Gambar 1.5 Penerapan Reward and Punishment Setiap Triwulan

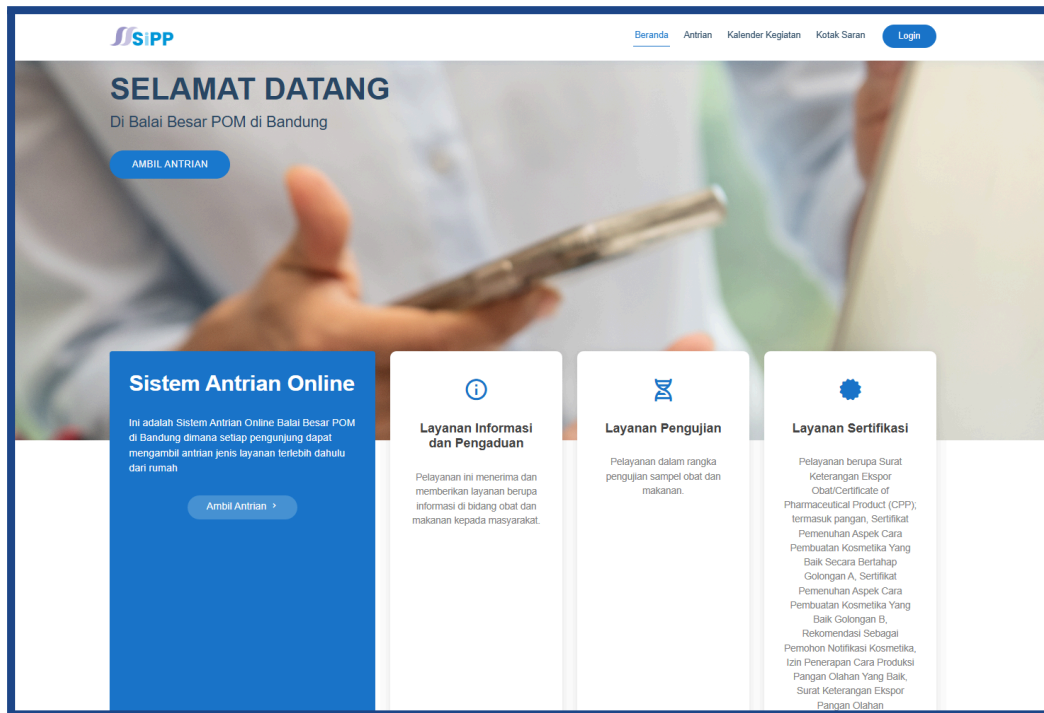
5. Sebagai Upaya meningkatkan Pelayanan Publik BBPOM di Bandung membuat aplikasi pencatatan buku tamu berbasis elektronik berupa SIPETA untuk Layanan di ULPK BBPOM di Bandung.



Gambar 1.6 Aplikasi Sipeta untuk Layanan Publik BBPOM di Bandung

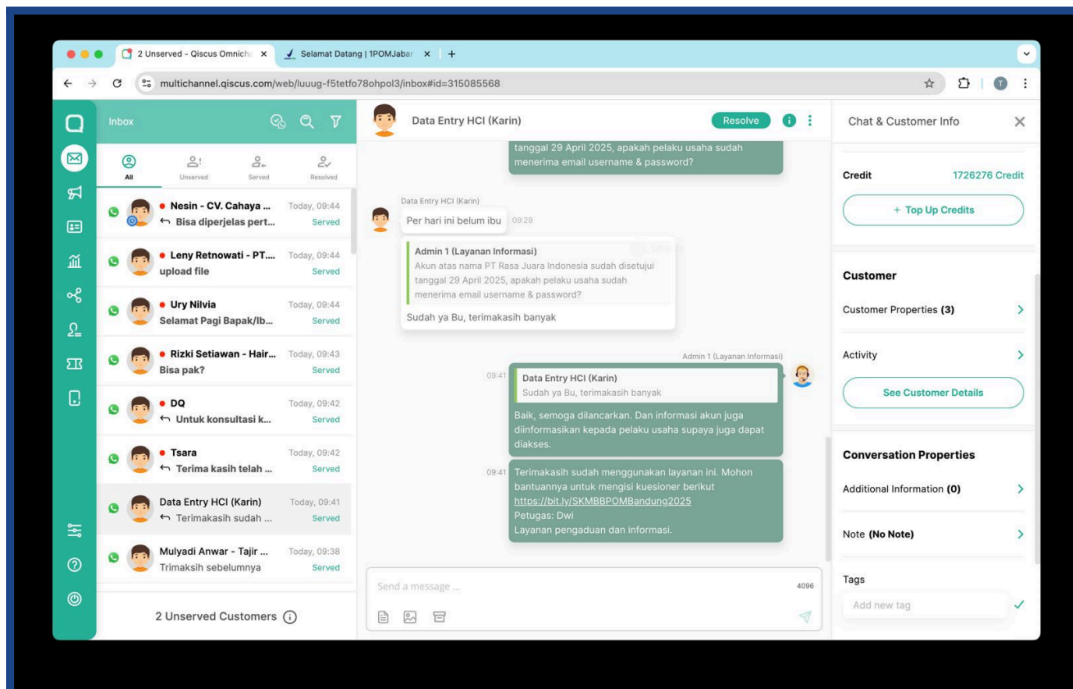
LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

6. Sebagai Upaya meningkatkan pelayanan publik BBPOM di Bandung hadir pada setiap Mall Pelayanan Publik (MPP) pada beberapa Kota/Kabupaten di Jawa Barat dan menerapkan sistem Antrian Online untuk pendataan Pelanggan di MPP.



Gambar 1.7 Aplikasi SIPP untuk Antrian Online MPP di Jawa Barat

7. Layanan Online BBPOM di Bandung melalui aplikasi Whatsapp satu nomor 08119900533 untuk memudahkan pelanggan mendapatkan informasi di BBPOM di Bandung.



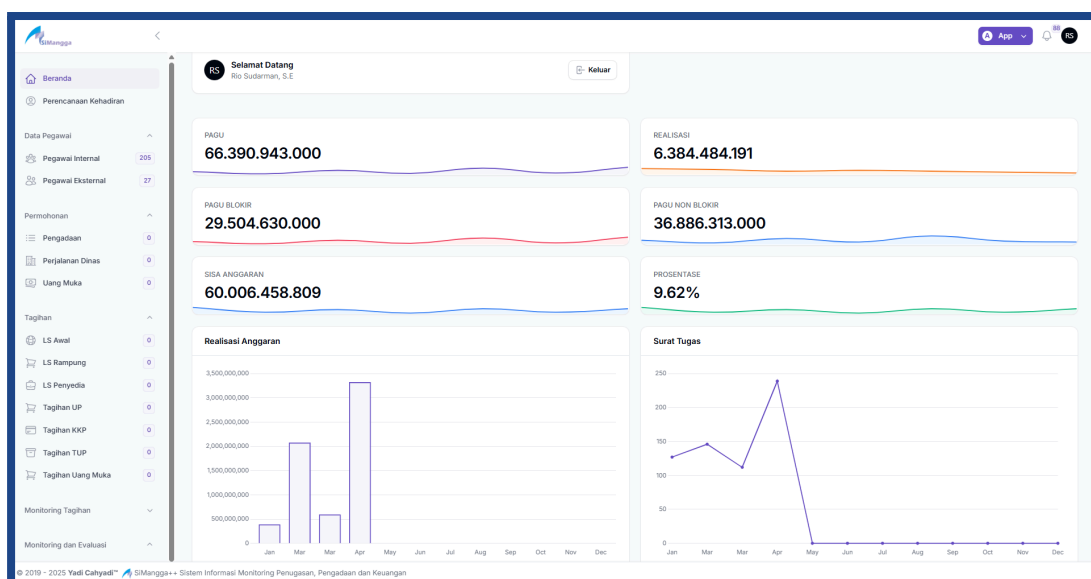
Gambar 1.8 Layanan Online aplikasi Whatsapp satu nomor BBPOM di Bandung

8. Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Satu POM Jabar yang menjadi Layanan satu pintu BBPOM di Bandung untuk menjangkau seluruh pelanggan dan sarana dalam pengawasan obat dan makanan.



Gambar 1.9 Aplikasi SatuPOM Jabar BBPOM di Bandung

9. Dalam pengelolaan Keuangan yang akuntabel, Balai Besar POM di Bandung telah membuat aplikasi Simangga (Sistem Informasi Monitoring Penugasan, Pengadaan dan Keuangan) untuk mempermudah proses pengadaan dan Keuangan di BBPOM di Bandung sejak Tahun 2019 sehingga proses pertanggungjawaban lebih akuntabel, efektif, dan efisien.



Gambar 1.10 Aplikasi Simangga BBPOM di Bandung

10. Balai Besar POM di Bandung menggelar pendampingan UMKM melalui program Prabu UMKM Juara sebagai Upaya untuk memfasilitasi UMKM Obat dan Makanan di Jawa Barat mendapatkan pendampingan dan izin edar.



Gambar 1.11 Program Prabu UMKM Juara

11. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 sesuai dengan Sertifikat No. QSC 01806 dari Sucofindo International Certification Service yang berlaku dari tanggal 18 November 2024 hingga 17 November 2027.



Gambar 1.12 Sertifikat SNI ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

12. Balai Besar POM di Bandung telah menerapkan ISO 17025:2017 Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi sesuai dengan Sertifikat Akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional Nomor LP-173-IDN yang berlaku dari tanggal 3 Januari 2022 hingga 5 September 2026.



Gambar 1.13 Sertifikat SNI ISO/IEC 17025:2017 BBPOM di Bandung

BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1 LATAR BELAKANG
- 1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI
- 1.3 STRUKTUR ORGANISASI
- 1.4 ISU STRATEGIS

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

1.1 LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Interim Triwulan I TA 2026 Balai Besar POM di Bandung disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Triwulan I Tahun 2026 dan tahun kedua dari Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi organisasi. Laporan Kinerja Interim ini juga sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja seluruh unit organisasi dan untuk mendapatkan masukan dari stakeholders untuk perbaikan kinerja Balai Besar POM di Bandung.

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842), serta Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Pengawasan Obat dan Makanan dalam 6 (enam) tahun kedepan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, antara lain : 1) aspek kesehatan-penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans, dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif; 2) aspek sosial-perubahan demografi dan epidemiologi yang meningkatkan tren kebutuhan masyarakat dalam penggunaan produk sediaan farmasi dan pangan olahan serta perubahan pola penyakit, yang memerlukan respon cepat, efektif dan efisien; 3) aspek ekonomi-mendorong daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan, dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan persyaratan, sehingga dapat menghasilkan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu dan bermanfaat yang dapat bersaing dalam dinamika pasar yang dinamis; 4) aspek keamanan nasional - meningkatkan penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran/kejahatan Obat dan Makanan yang merupakan kejahatan kemanusiaan, terutama pelanggaran di media online/e-commerce dan kejahatan siber, termasuk bioterorisme; 5) aspek teknologi-perkembangan teknologi yang akseleratif khususnya dibidang bioteknologi dan nanoteknologi yang memberikan paradigma baru dan melakukan inovasi pengembangan

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

produk baru, yang memerlukan peningkatan Pengawasan Obat dan Makanan berbasis teknologi terutama untuk menjamin keamanan produk yang beredar; dan 6) aspek lingkungan – Isu lingkungan dan keberlanjutan mendorong tuntutan pasar agar produk yang produksi dan diedarkan ramah lingkungan dan berkelanjutan, sehingga diperlukan adanya perubahan regulasi, standar dan persyaratan dalam pengawasannya.

1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Pengawasan Obat dan Makanan memiliki fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan maka diperlukan adanya penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Untuk melaksanakan kebijakan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Pengawas Obat dan Makanan, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/892/M.KT.01/2020 tanggal 16 Juli 2020 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sebagai tindak lanjut, maka diterbitkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

dibina oleh Sekretaris Utama. Klasifikasi UPT BPOM sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, terdiri atas: Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai Besar POM sebanyak 26 (dua puluh enam); Balai Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Balai POM sebanyak 37 (tiga puluh tujuh); dan Loka Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut Loka POM sebanyak 20 (dua puluh).

KEDUDUKAN

UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi sesuai bidang tugasnya dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala.

TUGAS

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 19 Tahun 2023, Balai Besar POM di Bandung mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

- j. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

TABEL 1.1

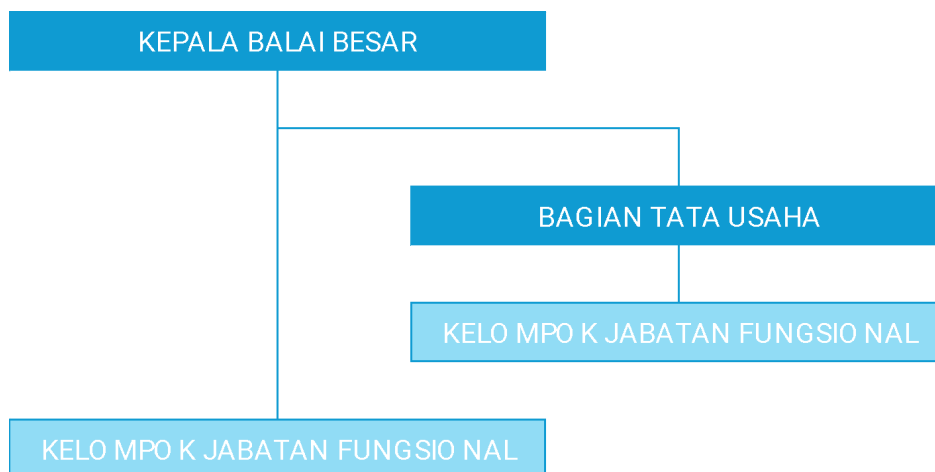
WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

UPT	Kedudukan	Wilayah Kerja
BBPOM di Bandung	Alamat Jl. Pasteur No. 25 Kelurahan Pasirkaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kota Bandung 2. Kabupaten Subang 3. Kabupaten Cianjur 4. Kabupaten Garut 5. Kabupaten Bandung Barat 6. Kabupaten Majalengka 7. Kabupaten Sumedang 8. Kabupaten Bandung 9. Kabupaten Sukabumi 10. Kota Cimahi 11. Kota Sukabumi

1.3 STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar POM di Bandung disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2023.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026



Gambar 1.1.1 Struktur Organisasi Balai Besar POM di Bandung

1.4 ISU STRATEGIS

Seiring dengan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada tahun kerja 2026 maka muncul beberapa isu strategis yang mempengaruhi kinerja, antara lain:

ISU INTERNAL

Tatakelola Regulasi, Organisasi dan Pelayanan Publik

Pada Tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Dalam rangka untuk memperkuat peran regulasi dan pengawasan, diperlukan peningkatan status Organisasi BPOM menjadi setingkat kementerian. Serta melakukan penyelarasan kewenangan/fragmentasi kebijakan antar lembaga, agar tidak tumpang tindih yang menyebabkan Pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal.

Implementasi reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengendalian intern untuk efisiensi dan akuntabilitas tata kelola bbpom di bandung, untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, dan transparansi serta partisipasi publik dalam pengawasan obat dan makanan.

Tatakelola Sumberdaya Manusia

Balai Besar POM di Bandung memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kemampuan dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pengawasan Obat dan Makanan, dengan jumlah kebutuhan SDM belum tercukupi sesuai dengan analisis beban kerja (ABK).

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Peningkatan kompetensi terus menerus dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pelatihan–pelatihan teknis, penguatan budaya organisasi dan core value BerAKHLAK, serta penerapan kode etik dan disiplin ASN, untuk meningkatkan pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan

Tatakelola Sarana Prasarana

Penyediaan sarana prasarana merupakan pendukung utama dalam mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana terdiri dari 1). sarana dan prasarana kerja; 2). Alat Laboratorium. Sarana dan prasarana kerja terdiri dari Ruang kerja, Ruang penunjang dalam gedung, Ruang/ fasilitas penunjang luar gedung, perlengkapan kantor, rumah dinas dan kendaraan operasional.

Luas lahan Balai Besar POM di Bandung seluas 4.268 m² dengan luas lantai bangunan sebesar 5.686 m². Bangunan yang ada selain memiliki fungsi sebagai area perkantoran, juga termasuk fungsi pelayanan publik dan laboratorium. Pemenuhan terhadap kebutuhan sarana prasarana adalah 78,1% yang terdiri dari pemenuhan alat laboratorium 61,7% dan pemenuhan sarana prasarana kerja 94,6%, sehingga masih diperlukan tambahan untuk penambahan alat laboratorium.

Tatakelola sarana prasarana dilakukan dengan digitalisasi dan optimalisasi Pengelolaan BMN untuk Efisiensi Anggaran, efisiensi Pengadaan Barang dan Jasa melalui optimalisasi Produk Dalam Negeri (PDN), digitalisasi dan modernisasi Kearsipan untuk mengurangi biaya operasional, dan efisiensi pemenuhan sarana dan prasarana untuk optimalisasi kinerja BBPOM di Bandung

Peralatan Laboratorium

Pengujian laboratorium merupakan tulang punggung pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung. Laboratorium Balai Besar POM di Bandung telah mendapat sertifikat akreditasi sebagai laboratorium penguji dari Komite Akreditasi Nasional dengan nomor sertifikat LP-173-IDN. Ilmu dan teknologi terus berkembang, begitu pula dengan proses pengujian. Untuk itu, laboratorium harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan secara optimal. Untuk melakukan pengujian, laboratorium telah dilengkapi dengan peralatan yang memadai agar dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya. Namun, dibandingkan terhadap Standar Minimum Laboratorium Balai Besar POM di Bandung, masih terdapat gap sehingga

LAPORAN KINERJA INTERIM BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG TRIWULAN I TAHUN 2026

pengadaan peralatan laboratorium terus dilakukan. Pada tahun 2025, pemenuhan Standar Minimum Alat Laboratorium adalah sebesar 62,4%.

Regionalisasi Laboratorium

Dalam rangka meningkatkan pengawasan post market dan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas laboratorium BPOM yang unggul, inovatif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis serta mendukung daya saing produk obat dan makanan maka pada tahun 2023 BPOM menerapkan sistem manajemen laboratorium yang baru yaitu 'Regionalisasi Laboratorium'. Setiap BB/Balai POM telah memiliki laboratorium pengujian kimia untuk obat dan nappza, obat tradisional, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan, serta pengujian biologi. Beberapa laboratorium telah dilengkapi instrument dengan teknologi tinggi, seperti LC-MS/MS, GC-MS, ICP-MS. Beberapa BB/Balai POM memiliki fasilitas uji sterilitas dan atau fasilitas uji DNA, sehingga menjadi Balai unggulan BPOM untuk uji sterilitas dan uji DNA. Metode pendekatan yang komplementer atau saling melengkapi satu sama lain merupakan suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas laboratorium pengujian. Regionalisasi laboratorium dikelompokkan ke dalam tujuh region. Balai Besar POM di Bandung masuk ke dalam Region 3 dengan Koordinator BBPOM di DKI Jakarta, dan anggota terdiri dari BBPOM di Bandung, Semarang, Yogyakarta dan Serang. Manfaat dari sistem manajemen regionalisasi laboratorium ini adalah efisiensi biaya pembelian instrumen, biaya pemeliharaan, fasilitas, baku pembanding, bahan pendukung, dan lain-lain, serta mengurangi timeline pengujian atau waktu analisis karena pengujian sampel dengan parameter sejenis dikerjakan secara bersamaan.

ISU EKSTERNAL

Secara garis besar, isu bersifat eksternal yang dihadapi oleh Balai Besar POM di Bandung adalah sebagai berikut :

Arah Kebijakan dan Strategi Nasional RPJMN 2025-2029 di Bidang Kesehatan

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan.

Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Berdasarkan arah kebijakan dalam RPJMN 2025-2029 untuk bidang kesehatan, terdapat beberapa strategi nasional yang relevan dengan peran BPOM, yaitu:

1. Pembudayaan hidup sehat dan pengendalian faktor risiko PTM

Pada Kegiatan Pembangunan (KP) RPJMN ini, BPOM mendukung dalam hal, berikut:

- a. Pada Proyek Prioritas (ProP) Pengendalian konsumsi rokok, BPOM mendukung melalui Pengawasan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik
- b. Pada ProP Pangan Sehat, BPOM khususnya mendukung melalui Penyusunan regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi kesehatan. Penyusunan regulasi ini, merupakan salah satu upaya PTM yang terus meningkat di Indonesia. BPOM mengembangkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan menyusun kebijakan pencantuman informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition Labelling (FOPNL) untuk memudahkan konsumen memilih pangan yang lebih sehat dan mendorong produsen pangan olahan untuk melakukan reformulasi pangan dengan menurunkan kandungan gula, garam dan lemak (GGL) dalam produknya sehingga dapat menyediakan pangan olahan yang lebih sehat di pasaran.

2. Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan Sediaan Farmasi

Kegiatan Pembangunan RPJMN ini dilaksanakan melalui 2 (dua) ProP yaitu ProP Penguatan Sistem Pengawasan Pangan dan ProP Penguatan Sistem Pengawasan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan. BPOM mendukung kedua ProP tersebut melalui kegiatan berikut:

- a. Pembinaan industri farmasi, obat bahan alam dan kosmetik dalam rangka peningkatan
- b. tingkat maturitas
- c. Pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan setelah beredar
- d. Peningkatan kapasitas Kab/Kota dalam pengawasan PIRT dan pemberdayaan
- e. masyarakat (Kab/Kota Pangan Aman)
- f. Pengujian sampel KLB keracunan pangan sesuai standar
- g. Pengembangan jejaring laboratorium POM
- h. Peningkatan laboratorium eksternal yang mampu melakukan pengujian sediaan
- i. farmasi dan pangan olahan sesuai standar
- j. g. Pengawasan sarana produksi sediaan farmasi, pangan olahan dan IRTP

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

- k. h. Pengawasan fasilitas distribusi sediaan farmasi
 - a. Pemenuhan laboratorium pengujian sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai
 - l. Standar kemampuan Laboratorium
 - m. j. Pemenuhan SDM pengawas pangan olahan dan sediaan farmasi yang memenuhi
 - n. standar kompetensi
 - o. k. Penguatan tindak lanjut regulatori terkait keamanan obat beredar yang dikomunikasikan (penguatan fungsi regulatori farmakovigilans)
 - p. l. Pemberian KIE Farmakovigilans pada sarana pelayanan Kesehatan dalam rangka
 - q. pelaporan KTD/ESO
 - r. m. Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan
 - s. Olahan melalui Siber (Analisis siber dan patroli siber)
 - t. n. Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan
 - u. Peningkatan Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan
 - v. Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan sebelum beredar
 - w. Penguatan data dan sistem informasi POM yang andal dan terintegrasi
3. Penguatan tata kelola, data, informasi dan inovasi teknologi kesehatan

Pada Kegiatan Pembangunan ini, BPOM secara khusus mendukung ProP Penguatan Data dan Informasi. BPOM memperkuat tata kelola melalui pemanfaatan data, informasi, dan teknologi yang lebih baik, seperti sistem pelacakan (traceability) dan pengawasan yang berbasis data untuk menginformasikan kebijakan dan tindakan.

BPOM dalam melaksanakan tugasnya di bidang pengawasan obat dan makanan didukung oleh data berkualitas yang dihasilkan melalui proses pengelolaan data. Proses pengelolaan data tersebut didukung oleh peraturan terkait dan teknologi informasi sehingga data berkualitas tersebut dapat dimanfaatkan serta dibagipakaikan melalui Satu Data BPOM sebagai salah satu bentuk implementasi dari amanah Satu Data Indonesia. Selain itu, data tersebut juga divisualisasikan melalui BPOM Command Center untuk mendukung kebutuhan pimpinan dalam pembuatan kebijakan

Efisiensi Anggaran Belanja Tahun 2025

Implementasi Inpres 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun 2025 bertujuan untuk mengendalikan dan mengoptimalkan belanja negara dan daerah agar lebih efektif dan efisien untuk melaksanakan program-program prioritas yang lebih produktif dalam mencapai tujuan nasional.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sebagaimana Surat Menteri Keuangan S-37/MK.02/2025, semua kementerian dan Lembaga termasuk B POM diminta untuk melakukan langkah-langkah pelaksanaan anggaran sebagai berikut:

1. Melakukan Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas dan Akurasi Penyusunan Rencana Program/Kegiatan Pada Awal Tahun Anggaran
 - b. Meningkatkan Kualitas Reviu Anggaran dan Melakukan Optimalisasi Revisi Anggaran
 - c. Melakukan Sinkronisasi dan Harmonisasi Belanja Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Belanja Pemerintah Daerah (Transfer Ke Daerah) sesuai Bidang dan Lingkup Kerja Kementerian/Lembaga Masing-Masing
2. Melakukan Peningkatan Pelaksanaan Anggaran Belanja yang Berkualitas (Spending Better), dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)
 - b. Melakukan Akselerasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Proyek
 - c. Meningkatkan Kualitas Belanja Melalui Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Belanja (Value For Money),
 - d. Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Program/Kegiatan Yang Bersumber dari Dana PHLN dan SBSN,
3. Melakukan Akselerasi Program/Kegiatan Pemerintahan Baru, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melakukan Akselerasi Operasionalisasi dan Pelaksanaan Program/Kegiatan Kementerian/Lembaga Baru Terdampak Transisi Kabinet Merah Putih (KMP),
 - b. Memprioritaskan pencapaian program ASTA CITA dan Quick Wins Presiden RI,
4. Melakukan Peningkatan Akuntabilitas Proses Pelaksanaan Anggaran, dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Akuntabilitas Tata Kelola Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran
 - b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal
 - c. Meningkatkan Kualitas dan Validitas Capaian Output Serta Pelaporannya

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Pertumbuhan Pasar dan Peningkatan Daya Saing Industri/Produk Obat dan Makanan dalam negeri

Pasar produk obat dan makanan dalam negeri yang tengah berkembang mempresentasikan sebuah peluang bagi BPOM untuk memperluas dan mengintensifkan fungsi pengawasannya.

Di tengah pertumbuhan pasar ini, BPOM berada di posisi yang strategis untuk memastikan bahwa semua produk yang beredar memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan. Situasi ini tidak hanya menguntungkan konsumen dengan menjamin akses ke produk yang aman dan berkualitas, tetapi juga memberi produsen dalam negeri kepastian bahwa mereka beroperasi dalam pasar yang kompetitif dan adil.

Dari perspektif strategis, pertumbuhan ini memberi BPOM kesempatan untuk mendorong inovasi dan meningkatkan reputasi industri dalam negeri di panggung internasional.

Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan, BPOM dapat membantu produk dalam negeri memenangkan kepercayaan konsumen dan memperoleh akses pasar yang lebih luas. Pada akhirnya, upaya ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta meningkatkan status Indonesia sebagai eksportir produk obat dan makanan yang terpercaya.

Adaptasi Dengan Perkembangan Teknologi Melalui Peningkatan Digitalisasi Proses Bisnis BPOM

Adaptasi terhadap perkembangan teknologi baru meningkatkan kapasitas BPOM untuk beroperasi sebagai lembaga pengawasan yang dinamis dan adaptif. Dalam konteks global, kecepatan dan akurasi pengawasan obat dan makanan menjadi kunci kompetitif yang penting, dan dengan teknologi yang tepat, BPOM dapat menegakkan standar yang lebih tinggi, memberikan respons yang lebih cepat terhadap masalah keamanan obat dan makanan, dan bahkan mengantisipasi masalah sebelum terjadi. Hal ini tidak hanya memperkuat kepercayaan publik dan keandalan lembaga, tetapi juga menempatkan Indonesia pada posisi yang lebih kuat dalam dialog dan kerjasama internasional mengenai standar pengawasan obat dan makanan. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM untuk menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi di industri yang terus berubah dengan cepat. Peluang BPOM dalam digitalisasi proses bisnis merupakan langkah maju menuju peningkatan efisiensi dan efektivitas operasional. Dengan menerapkan teknologi digital dalam alur kerjanya, BPOM dapat mengotomasi banyak proses manual yang memakan waktu, seperti registrasi produk, pelaporan, dan pemantauan

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

kepatuhan. Automasi ini tidak hanya mengurangi beban administratif, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengelolaan data dan proses pengambilan keputusan. Lebih lanjut, penggunaan alat-alat digital dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam mengawasi distribusi produk secara real-time, meningkatkan kemampuan BPOM untuk mengidentifikasi dan menanggapi potensi risiko keamanan produk dengan lebih cepat dan efektif, sebelum masalah tersebut berkembang menjadi isu yang lebih besar dan

mempengaruhi masyarakat luas.

Pada RPJMN 2025-2029 BPOM akan memulai tahap pengintegrasian dengan kecerdasan buatan (AI) dan machine learning. Pengintegrasian kecerdasan buatan (AI) dan machine learning dalam sistem pengawasan obat dan makanan menawarkan peluang transformasional dalam peningkatan keamanan produk obat dan makanan. Dengan memanfaatkan teknologi ini, BPOM dapat menganalisis data dalam volume besar dengan kecepatan dan ketepatan yang tidak dapat dicapai melalui metode konvensional.

AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola dan tren dari data yang dikumpulkan dari laporan inspeksi, pengujian laboratorium, dan pengaduan konsumen, memungkinkan deteksi dini terhadap risiko produk. Selain itu, machine learning dapat membantu dalam memprediksi potensi wabah kesehatan masyarakat berdasarkan analisis data historis dan tren saat ini. Implementasi teknologi ini dalam pengawasan dapat secara signifikan menyederhanakan proses analisis data, mengurangi beban kerja manual, dan meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengambilan keputusan.

Kolaborasi dengan stakeholders

Peluang BPOM untuk mengembangkan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti industri farmasi dan makanan, institusi akademik, dan organisasi internasional, menyediakan akses yang lebih luas ke sumber daya yang beragam serta berbagai inovasi terkini. Hubungan kerja sama ini memungkinkan pertukaran informasi dan praktik terbaik, yang secara langsung dapat meningkatkan kemampuan BPOM dalam memahami dan mengimplementasikan standar industri global serta tren terkini.

Kemitraan dengan universitas dapat memfasilitasi penelitian bersama yang menghasilkan wawasan baru tentang pengawasan obat dan makanan, sementara kolaborasi dengan lembaga internasional dapat membantu BPOM menyelaraskan regulasinya dengan standar global, memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam praktik pengawasan kesehatan publik.

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Secara strategis, kolaborasi ini memiliki implikasi yang jauh mencakup lebih dari sekadar pertukaran pengetahuan. Kolaborasi ini mengarah pada pembentukan aliansi strategis yang dapat mendukung inisiatif kebijakan BPOM, termasuk advokasi untuk peraturan yang lebih ketat terhadap bahan berbahaya dalam obat dan makanan, atau kebijakan yang mendukung pengembangan industri farmasi dan makanan dalam negeri. Kolaborasi ini juga membuka peluang bagi BPOM untuk meningkatkan keterampilan dan kapasitas internalnya melalui pelatihan yang disediakan oleh mitra-mitra global. Pada akhirnya, inisiatif bersama ini dapat memperkuat posisi Indonesia dalam negosiasi kesehatan global dan memajukan agenda kesehatan masyarakat dalam skala internasional, mempromosikan keamanan, inovasi, dan daya saing di sektor kesehatan. Melalui kerja sama yang erat dengan industri, akademisi, dan lembaga internasional, BPOM dapat memperoleh akses ke sumber daya, pengetahuan, dan inovasi terbaru. Kolaborasi ini memungkinkan BPOM untuk menerapkan praktik terbaik dan meningkatkan standar pengawasan.

Peningkatan kesadaran masyarakat

Dalam konteks peningkatan kesadaran masyarakat tentang keamanan obat dan makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peluang strategis untuk memperkuat hubungan dan kerjasama dengan masyarakat. Edukasi publik merupakan langkah penting dalam mengurangi risiko kesehatan yang disebabkan oleh konsumsi pangan dan obat-obatan yang tidak aman. Dengan memanfaatkan berbagai platform komunikasi, seperti media sosial, seminar, workshop, dan kampanye publik, BPOM dapat menyebarkan informasi yang relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya keamanan pangan dan obat-obatan tetapi juga memotivasi mereka untuk aktif berpartisipasi dalam upaya pengawasan produk yang beredar di masyarakat.

Dari sisi implikasi strategis, upaya peningkatan kesadaran ini dapat berujung pada peningkatan kepatuhan masyarakat terhadap regulasi dan standar keamanan pangan dan obat, yang pada gilirannya meminimalisir risiko kesehatan publik. Lebih lanjut, penguatan kerjasama dan kepercayaan antara BPOM dan masyarakat dapat menjadi fondasi kuat dalam membangun sistem pengawasan pangan dan obat yang lebih efektif dan responsif. Dengan masyarakat yang lebih terinformasi dan terlibat aktif, potensi untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelanggaran akan lebih tinggi, memungkinkan BPOM untuk bertindak cepat dalam menangani isu keamanan pangan dan obat. Ini tidak hanya akan meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan tetapi juga memperkuat citra

dan legitimasi BPOM sebagai lembaga pengawas yang kompeten dan terpercaya di mata publik.

Inisiatif Keberlanjutan dan Ekonomi Hijau

Inisiatif keberlanjutan dan ekonomi hijau membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran strategis dalam memastikan industri obat dan makanan Indonesia beroperasi dengan cara yang lebih ramah lingkungan.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam regulasi dan pengawasan, BPOM dapat mendorong perusahaan-perusahaan di sektor ini untuk mengadopsi praktik produksi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pengurangan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan baku yang berkelanjutan. Langkah ini tidak hanya memenuhi tuntutan konsumen modern yang semakin sadar lingkungan dan menuntut produk yang berkelanjutan, tetapi juga mempersiapkan industri lokal untuk memenuhi standar global yang semakin ketat terkait keberlanjutan.

Dari sudut pandang strategis, integrasi keberlanjutan dalam pengawasan oleh BPOM memiliki implikasi jangka panjang yang signifikan bagi industri obat dan makanan, serta ekonomi dan lingkungan Indonesia secara keseluruhan. Pertama, memastikan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan reputasi internasional dan daya saing pasar ekspor produk Indonesia, memungkinkan akses ke pasar baru dan memperkuat posisi pasar di negara-negara yang menerapkan regulasi lingkungan yang ketat. Kedua, pendekatan ini mendukung transisi ekonomi Indonesia menuju ekonomi hijau, yang berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Hal ini tidak hanya memperkuat ketahanan industri terhadap risiko lingkungan di masa depan tetapi juga membantu menciptakan ekosistem bisnis yang inovatif dan tangguh. Dengan demikian, BPOM tidak hanya berfungsi sebagai pelindung kesehatan masyarakat tetapi juga sebagai agen perubahan menuju pembangunan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Inovasi Produk dan Layanan Kesehatan

Inovasi produk dan layanan kesehatan membuka peluang besar bagi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memainkan peran sentral dalam mendorong inovasi dan keamanan produk di industri kesehatan. Dengan kemunculan obat-obatan inovatif, obat bahan alam, suplemen kesehatan, bahan kosmetik baru dan teknologi sediaan kosmetik dan makanan fungsional, BPOM berada dalam keunggulan strategis untuk memimpin

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

dalam pengembangan dan penerapan standar pengawasan yang adaptif dan proaktif. Hal ini termasuk pembuatan kerangka kerja regulasi yang mendukung penelitian dan pengembangan produk baru dan memastikan bahwa semua produk yang beredar di pasar memenuhi standar keamanan dan efikasi yang ketat. Melalui kolaborasi dengan peneliti, industri, dan lembaga internasional, BPOM dapat memfasilitasi inovasi yang berkelanjutan dalam sektor kesehatan, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan produk kesehatan baru yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih baik.

Implementasi Program Fortifikasi Pangan

Salah satu upaya di dalam mendukung Arah Kebijakan Nasional Perbaikan Kualitas Konsumsi Pangan dan Gizi Masyarakat dilakukan melalui peningkatan peran industri dan pemerintah daerah dalam ketersediaan pangan beragam, aman, dan bergizi diantaranya dengan dukungan fortifikasi mikronutrien penting. Fortifikasi pangan merupakan salah satu cara dalam menangani permasalahan tingginya angka kekurangan gizi mikro. Sebagai langkah awal pemerintah menetapkan fortifikasi pada garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit, mengingat juga masih tingginya masalah gangguan kesehatan karena kurang yodium (GAKI). Penerapan fortifikasi harus diiringi dengan pengawasan oleh Balai Besar POM di Bandung. Hasil pengawasan garam beryodium dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2015– 2019) menunjukkan tren penurunan terhadap hasil uji yang tidak memenuhi syarat (TMS) yaitu pada tahun 2015 jumlah sampel garam yang TMS sebesar 85% dan hingga tahun 2017 menjadi 81,62%, kemudian pada tahun 2019 mengalami penurunan signifikan menjadi 54,82%. Sedangkan hasil pengawasan tepung terigu dan minyak goreng sawit dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2015- 2019) menunjukkan relatif semua sampel yang diuji memenuhi syarat (MS).

Kegiatan intensifikasi pengawasan produk fortifikasi Nasional (garam konsumsi, tepung terigu dan minyak goreng sawit) merupakan upaya pengawasan produk pangan baik dalam rangka pemenuhan persyaratan (compliance) maupun surveilan keamanan pangan. Upaya tersebut dilakukan melalui verifikasi terhadap pemenuhan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), baik penerapan CPPOB pada produsen pangan dan penerapan Cara Ritel Pangan yang Baik di sarana peredaran. Selain itu juga dilakukan pengawasan terhadap produk pangan baik di sarana produksi maupun di sarana distribusi serta penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran di bidang pangan. Kegiatan lainnya yaitu pengujian laboratorium terhadap parameter keamanan dan mutu pangan dan gizi pangan,

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

pengawasan terhadap kesesuaian label serta pengawasan terhadap keamanan kemasan pangan yang beredar melalui sampling dan pengujian.

Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai Besar POM di Bandung melaksanakan reformasi birokrasi (RB) sesuai PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010- 2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai Besar POM di Bandung merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB dengan membentuk tim POKJA dalam area Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sumber Daya Manusia, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sebagai wujud pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 URAIAN SINGKAT RENSTRA
- 2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
- 2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK)
- 2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)
- 2.5 METODE PENGUKURAN

2.1 REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Rencana strategis BPOM Tahun 2025-2029 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029 serta dengan memperhatikan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerjanya.

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung Kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, diseluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat, baik laki-laki maupun Perempuan. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif.

Diharapkan output dan outcome dari pelaksanaan program dan kegiatan BPOM Tahun 2025-2029 tersebut menjadi bentuk konkrit kontribusi BPOM terhadap pencapaian agenda Nawacita nasional, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Untuk itu, capaian target outcome dan output akan dipantau secara berkala, dan dievaluasi pada akhir periode Rencana Strategis/RPJMN sebagai *impact assessment*.

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Bandung sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Unit Pelaksana Teknis BPOM yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Jawa Barat dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan. Termasuk dengan adanya perubahan organisasi BPOM sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM serta Peraturan Badan POM Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Lingkungan BPOM. Rumusan visi harus berorientasi kepada pemangku kepentingan yaitu masyarakat Indonesia khususnya Propinsi Jawa Barat sebagai penerima manfaat, dan dapat menunjukkan impact dari berbagai hasil (outcome) yang ingin diwujudkan Balai Besar POM di Bandung dalam menjalankan tugasnya. Rumusan tersebut juga menunjukkan bahwa

pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu unsur penting dalam peningkatan kualitas/taraf hidup masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

VISI

Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Visi pembangunan nasional Indonesia 2025-2029 adalah: Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesi Emas 2045.

Dalam RPJPN 2025-2045 Tahap Pertama yaitu RPJMN 2025-2029, fokusnya adalah Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, Transformasi Tata Kelola, Supremasi Hukum, Stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia, Ketahanan Sosial Budaya dan Etologi, Pembangunan Wilayah dan Sarana Prasarana, serta Kestinambungan Pembangunan.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2025-2029, maka Balai Besar POM di Bandung telah menetapkan Visi 2025-2029 yaitu: -

“"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”

Penjelasan Visi:

Visi ini mencerminkan dedikasi Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional..

Visi Balai Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Besar POM di Bandung. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.
2. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu: Besar POM di Bandung berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar

- memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing: Besar POM di Bandung mendukung industry sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
 4. Masyarakat Sehat: Tujuan akhir dari semua upaya Besar POM di Bandung adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi). Terkait pangan olahan bergizi, konteks pengawasan yang dilakukan Besar POM di Bandung menekankan pada pentingnya pencatuman informasi nilai gizi pada label/kemasan pangan sebelum beredar, pengawasan label setelah produk beredar, serta yang tidak kalah penting adalah edukasi dan kampanye terkait pangan aman dan bergizi. Untuk memudahkan penyampaian informasi nilai gizi tersebut ke masyarakat ke depan BPOM akan menerapkan kebijakan yang mendorong pola konsumsi pangan sehat dengan mencantumkan informasi gizi pada bagian depan label/Front of Pack Nutrition labelling (FOPNL). Besar POM di Bandung berupaya menyeimbangkan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dan mendorong industri pangan untuk menghasilkan produk yang aman dan bergizi. Hal ini menjadi langkah strategis yang diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan angka penyakit tidak menular yang banyak dipicu oleh konsumsi GGL berlebih, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Indonesia.

Rumusan visi Besar POM di Bandung untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Besar POM di Bandung dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan.

MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BBPOM di Bandung telah merumuskan misi-misi strategis yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi-misi ini disusun dengan memperhatikan misi Badan POM, yang telah mendukung Asta Cita Misi Presiden. Misi BBPOM di Bandung tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan
5. pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

SASARAN KEGIATAN

Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung disusun dalam rangka untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan serta memperhatikan kondisi tantangan dan peluang masa depan serta sumber daya yang dimiliki. Sasaran Kegiatan ini juga sejalan dan memperkuat sasaran strategis BPOM untuk periode 2025 – 2029, dan secara langsung terkait dengan rencana strategis yang telah dirumuskan berdasarkan analisis SWOT, memastikan bahwa BPOM dapat merespons secara efektif terhadap kekuatan dan peluang yang ada, serta mengatasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi. Sasaran Kegiatan BBPOM di Bandung Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Jawa Barat:

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk memperkuat kemampuan BBPOM di Bandung dalam mengidentifikasi dan merespons secara cepat dan akurat terhadap potensi risiko kesehatan dari produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar, serta pada kejadian Kejadian Luar Biasa keracunan pangan. Strategi seperti optimalisasi teknologi dan digitalisasi, pengembangan sistem data dan analisis, peningkatan infrastruktur dan sistem pengawasan, serta peningkatan kapasitas laboratorium untuk menguatkan pengawasan proaktif, yang lebih responsif dan efektif. Selain itu, juga menguatkan kolaborasi lintas sektor dalam pengawasan kejadian yang tidak diinginkan dari konsumsi produk sediaan farmasi dan pangan olahan, sehingga dapat meningkatkan respon perlindungan masyarakat dan meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kejadian emerging disease. Sasaran kegiatan juga difokuskan untuk meningkatkan kepatuhan dari para pelaku usaha dalam pemenuhan persyaratan dan ketentuan regulasi yang berlaku. Kegiatan ini juga dapat memperluas kerjasama lintas sektor dan optimalisasi koordinasi antar lembaga yang dimaksudkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang

kondusif dan berdaya saing, di mana aturan dan standar keamanan produk ditegakkan dengan tegas dan adil. Sasaran kegiatan ini juga difokuskan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dengan memastikan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar adalah produk yang aman, bermutu, dan bermanfaat, melalui kegiatan pemeriksaan yang efektif dan menyeluruh mulai dari sebelum produk diedarkan, pada saat proses produksi dan setelah produk diedarkan melalui jalur distribusi yang sesuai ketentuan. Penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi serta automisasi pelaksanaan kegiatan pemeriksaan dapat menguatkan system pemeriksaan yang efektif, responsive dan menyeluruh. Selain itu Sasaran kegiatan ini menggaris bawahi pentingnya peningkatan kapabilitas laboratorium BBPOM di Bandung sebagai bagian kunci dalam proses pengawasan. Melalui investasi dalam infrastruktur pengawasan dan laboratorium serta pengembangan fasilitas dan kapabilitas laboratorium, BBPOM di Bandung berupaya meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pengujian produk.

2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk meningkatkan peran aktif BBPOM di Bandung mendukung program pemerintah dalam menurunkan angka stunting, terutama di wilayah Jawa Barat. Pengawasan pangan fortifikasi ini merupakan upaya untuk memastikan keamanan dan mutu pangan yang ditambahkan zat gizi tertentu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pangan, meningkatkan status gizi masyarakat, dan menurunkan angka stunting.

3. Meningkatnya efektivitas KIE di Jawa Barat

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap standar keamanan dan kualitas obat serta makanan. Melalui strategi pengembangan program edukasi publik dan peningkatan komunikasi dan edukasi publik, BBPOM di Bandung berupaya membangun pemahaman yang kuat di kalangan konsumen tentang pentingnya memilih produk yang aman dan bermutu.

4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

Sasaran kegiatan ini difokuskan untuk mendukung dan memfasilitasi industri obat dan makanan agar lebih inovatif dan mandiri. Strategi mendorong inovasi dan adaptasi industri serta pengoptimalkan sistem data dan analisis untuk pengawasan proaktif, dirancang untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada industri dalam mengembangkan produk yang inovatif dan kompetitif.

5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Sasaran kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kemampuan BBPOM di Bandung dalam mendeteksi, menemukan dan menindak tegas pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum dan pemberian sanksi yang berat diharapkan dapat mengurangi kejadian kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi peningkatan koordinasi dan advokasi dengan Integrated Criminal Justice System (ICJS) merupakan bagian yang penting meningkatkan kesepahaman bahwa kejahatan bidang sediaan farmasi dan pangan olahan adalah kejahatan kemanusiaan, sehingga dapat meningkatkan kolaborasi dalam menurunkan tingkat kejahatan tersebut.

6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif

Sasaran kegiatan ini memfokuskan pada peningkatan kemampuan BPOM dalam mendeteksi pelaku kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Strategi seperti meningkatkan pengawasan e-commerce dan mengintensifkan pengawasan produk impor merupakan bagian dari upaya untuk memerangi praktik ilegal yang merugikan kesehatan publik dan ekonomi.

7. Layanan Publik BBPOM di Bandung yang Prima

Sasaran strategis ini menekankan pada peningkatan kualitas layanan yang diberikan BBPOM di Bandung kepada masyarakat dan stakeholder lainnya. Strategi pembaharuan kurikulum dan metode pelatihan SDM serta memperkuat sistem registrasi produk diarahkan untuk memastikan proses layanan yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak.

8. Terwujudnya Tatakelola Pemerintah BBPOM di Bandung yang Optimal

Sasaran kegiatan ini ditujukan untuk membangun BBPOM di Bandung sebagai lembaga yang kuat, fleksibel, dan berintegritas tinggi. Strategi memperkuat kerangka hukum dan regulasi serta optimasi dan redistribusi SDM, ditargetkan untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis dan operasional.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dan mendukung pada tercapainya sasaran agenda pembangunan 2025-2029, BBPOM di Bandung menetapkan sasaran Kegiatan, indikator kegiatan dan target yang

telah dilakukan reviu, perubahannya menjadi sebagaimana disajikan pada tabel 2.1.1 berikut:

TABEL 2.1.1
SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA DAN TARGET BBPOM DI BANDUNG
TAHUN 2025-2029

Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja	Target Kinerja				
	2025	2026	2027	2028	2029
SK 1. Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT					
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	90.00	91.25	92.50	93.75
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	26	27	28	29	30
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	91	93
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100	100
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85	87	89	92	95
6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85	85.25	85.50	85.75	86.00
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	88.75	90.75	92.50	93.75	95.25

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	80.00	83.00	85.00	87.00	90.00
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.00	94.25	95.50	96.75	98.00
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	85.00	87.00	89.00	92.00	95.00
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	84.68	86.68	88.88	90.88	92.28
12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	80.00	81.00	82.00	83.00	84.00
13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	81.7	85.8	89.5	91.2	92.7
15. Persentase Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	5.26	10.53	21.05	31.58	63.16
16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81.00	82.00	83.00	84.00
SK 2. Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi					

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	57.00	63.00	68.00	71.00	75.00
SK 3. Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT					
18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	86.94	87.81	88.68	89.55	90.42
19. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	20	23	24	26
20. Jumlah desa pangan aman	6	10	10	10	10
21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	3	3	5	5
SK 4. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu					
22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	85.0	86.0	87.0	88.0	89.0
SK 5. Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT					
23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	72	74	76	78	80
SK 6. Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif					
24. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital	90	91	92	93	94

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung					
SK 7. Layanan Publik UPT yang Prima					
25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,70	4,75	4,80	4,85	4,90
SK 8. Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel					
26. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91,5	91,75	92,0	92,25	92,50
27. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	83,10	83,25	83,40	83,55	83,70
28. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	5	5	5	5
29. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	2.95	3	3.05	3.1	3.15

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2026

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Balai Besar POM di Bandung Tahun 2026 adalah bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian kinerja yang akan dilakukan pada tahun 2026 dan juga sebagai acuan dalam penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan. RKT Balai Besar POM di Bandung Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Nomor HK.02.02.8A.10.25.246 Tahun 2025 tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2026 sebagaimana tabel 2.2.1 berikut:

TABEL 2.2.1

PERUBAHAN RENCANA KINERJA TAHUNAN BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	276
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.68
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.8
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	17. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	18. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	87.81
		19. Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		20. Jumlah desa pangan aman	10
		21. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	22. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.21
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	23. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	74
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	24. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	91
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	25. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.750
8.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	26. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.75
		27. Nilai AKIP UPT BPOM	83.25
		28. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		29. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.00

2.3 PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2026

Disusun Perjanjian Kinerja Tahun 2026 berdasarkan RKT Tahun 2026 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA yang telah disahkan sebesar Rp. 32.796.869.000,-.

Secara rinci dapat dilihat pada table berikut :

TABEL 2.3.1

PERJANJIAN KINERJA BBPOM DI BANDUNG

TAHUN 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	27.79
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.8
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90
		18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		19. Jumlah desa pangan aman	6
		20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.21
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	84
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	91
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93
8.	Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.95
		25. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	81.50
		26. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5
		27. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	3.00

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Kegiatan :	Anggaran
Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia	Rp.13.360.185.000,-
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	Rp.19.436.684.000,-

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2025 menyajikan target triwulan dan per bulan yang tercantum dalam Perubahan PK Balai Besar POM di Bandung beserta anggarannya sebagaimana tabel tabel 2.4.1 berikut:

TABEL 2.4.1

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK)
TAHUN 2025

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) <i>(menggunakan koma dan tanpa satuan%)</i>												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65		92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	1.422.773.000
	2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	27.79												27.79	6.480.000
	3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	341.088.800
	4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	45.779.000
	5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	181.958.200
	6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	6.926.200

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) <i>(menggunakan koma dan tanpa satuan%)</i>												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	176.754.900
	8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	176.754.900
	9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	354.171.000
	10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	320.760.000
	11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	26.528.000
	12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	14.552.000
	13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100												100	64.699.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) <i>(menggunakan koma dan tanpa satuan%)</i>												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
	14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.80			87.2	87.2	87.2	87.4	87.4	87.4	87.6	87.6	87.6	87.8	4.347.478.000
	15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53												10.53	18.300.000
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63		1.59	1.59	7.94	15.87	39.68	39.68	39.68	63	63	63	63	30.821.000
Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.9			89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	4.066.828.000
	18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	2	5	10	30	45	55	70	75	80	95	100	17	79.994.000
	19. Jumlah desa pangan aman	6	2	5	10	25	30	50	65	75	80	85	95	6	95.879.000
	20. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2	5	10	40	70	80	85	95	100	100	100	2	36.143.000
Meningkatnya pendampingan UMKM	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	34.21	5	13	40	40	40	55	66	82	82	93	94	34.21	24.479.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) <i>(menggunakan koma dan tanpa satuan%)</i>												Anggaran
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	
dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan														
Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	84	38	40	41	42	43	45	46	47	51	52	55	84	612.126.000
Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	91	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	23.440.000
Layanan Publik UPT yang Prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93												4.93	230.442.000
Terkelolanya Keuangan BBPOM di Bandung secara Akuntabel	25. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.95												91.95	19.663.371.000
	26. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	81.5												81.5	356.141.000
	27. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5												5	12.211.000

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Sasaran Strategis	Indikator	Target	Target Bulanan (kumulatif) <i>(menggunakan koma dan tanpa satuan%)</i>												Anggaran	
			JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES		
	28. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	3.00													3.00	59.991.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Keberhasilan suatu sasaran kegiatan dapat diukur melalui capaian indikator sasaran kegiatan atau yang biasa disebut indikator kinerja. Seluruh Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar POM Di Bandung merupakan Indikator Kegiatan Utama. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan sesuai definisi operasional indikator yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja dan dilaporkan sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan rincian sebagai berikut






A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran **INDIKATOR POSITIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Pengukuran **INDIKATOR NEGATIF** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kinerjanya) yang satuannya dalam % dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran. Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja (X) yang digunakan adalah sebagai berikut:

TABEL 2.5.1
KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA

				
Tidak Dapat Disimpulkan	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang
$X > 110\%$	$100\% < x \leq 110\%$	$90\% < x \leq 100\%$	$60\% \leq x \leq 90\%$	$< 60\%$

Selanjutnya, dilakukan penghitungan rata-rata dari capaian indikator kinerja di setiap sasaran strategis yang disebut dengan Nilai Sasaran Strategis (NSS). Kemudian, nilai dari seluruh NSS dalam setiap Perspektif dikonsolidasi sehingga menghasilkan Nilai Perspektif (NP) dengan formula berikut:

$$NP = \frac{\sum NSS}{\sum SS}$$

Keterangan :

- NP : Nilai Perspektif
NSS : Nilai Sasaran Strategis
SS : Sasaran Strategis

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat Sasaran Strategis yang tidak memiliki nilai (n/a), maka Sasaran Strategis tersebut tidak dimasukkan dalam perhitungan.

Selanjutnya, hasil konsolidasi dari seluruh nilai perspektif atau seluruh realisasi indikator kinerja dalam satu Peta Strategi disebut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS). NPSS digunakan untuk menilai kinerja unit/satuan kerja yang memiliki peta strategi. NPSS dapat dihitung dengan formula berikut:

$$NPSS = \frac{\sum NP}{\sum P}$$






Keterangan:

- NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis
NP : Nilai Perspektif
SS : Perspektif

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan predikat kinerja organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan pada capaian kinerja organisasi yaitu NPSS dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:.

TABEL 2.5.2




KRITERIA PENCAPAIAN NPSS

				
Istimewa	Baik	Butuh Perbaikan	Kurang	Sangat Kurang
>100%	$90 \leq \text{NPSS} \leq 100$	$70 \leq \text{NPSS} < 90$	$50 \leq \text{NPSS} < 70$	< 50

Pada pengukuran perbandingan realisasi kinerja triwulan dengan target tahunan, capaian kinerja hasil perbandingan ini dinyatakan dalam kategori berikut:

TABEL 2.5.3

KRITERIA PENGUKURAN REALISASI TERHADAP TARGET TAHUNAN

Kategori	Penjelasan	Notifikasi Warna
Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $\geq 100\%$.	
Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $70\% - <100\%$ ($70 \leq x < 100$).	
Perlu Upaya Keras	Apabila persentase capaian indikator kinerja s.d. triwulan n dibandingkan dengan target akhir tahun n sebesar $<70\%$ ($x < 70$).	

B. REALISASI ANGGARAN

- Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran
- Realisasi anggaran per Sasaran Strategis/Kegiatan.
- Evaluasi dan Analisis Anggaran berisikan mengenai rencana dan realisasi penyerapan pendanaan per program/ kegiatan pada tahun yang bersangkutan baik yang berasal dari DIPA maupun Hibah dan analisis tingkat pencapaiannya.
- Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output

sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input :

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila $IE \geq SE$ maka kegiatan dianggap efisien, apabila: $IE \leq SE$ maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut

TABEL 2.5.4

KRITERIA TINGKAT EFISIENSI

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 - 0,2	100% (Efisien)
3	0,21 - 0,4	95% (Efisien)
4	0,41 - 0,6	92% (Efisien)
5	0,61 - 0,8	90% (Efisien)
6	0,81 - 1,0	88% (Efisien)
7	1,01 - 1,2	86% (Tidak Efisien)
8	1,21 - 1,4	84% (Tidak Efisien)
9	1,41 - 1,6	80% (Tidak Efisien)
10	1,61 - 1,8	78% (Tidak Efisien)
11	>1,81	75% (Tidak Efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA

3.2 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI

3.3 REALISASI ANGGARAN


3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi merupakan gambaran tingkat pencapaian efektivitas organisasi untuk memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu.

Pada Tahun 2026, sesuai dengan Rencana Strategis Balai Besar POM di Bandung tahun 2025-2029, telah ditetapkan Perjanjian Kinerja dan Revisi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Bandung, yang memuat 8 (delapan) sasaran kegiatan, dengan 28 (dua puluh delapan) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pencapaian keseluruhan sasaran kegiatan Balai Besar POM di Bandung pada Triwulan I TA 2026 secara lengkap adalah sebagai berikut:

TABEL 3.1.1
CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN TRIWULAN I TA 2026

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
1. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT	100.46	SANGAT BAIK	
2. MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI	100.00	BAIK	
3. MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING WILAYAH KERJA UPT	100.24	SANGAT BAIK	
4. MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU	35.23	KURANG	
5. TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT	101.63	SANGAT BAIK	
6. TERLAKSANANYA KEGIATAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI WILAYAH KERJA UPT	100.00	BAIK	
7. LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN	-

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

SASARAN KEGIATAN	NILAI PENCAPAIAN SASARAN	KRITERIA	
8. TERWUJUDNYA TATAKELOLA PEMERINTAH UNIT ORGANISASI YANG OPTIMAL	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN	-

Pencapaian Sasaran kegiatan ini diukur dari pencapaian IKU, yang merupakan perbandingan target dan realisasi setiap IKU dari masing-masing sasaran kegiatan. Hasil pencapaian IKU dapat dilihat pada tabel 3.1.2 di bawah ini:

TABEL 3.1.2
PERBANDINGAN TARGET, REALISASI DAN
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TRIWULAN I TA 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW I TA 2026	REALISASI TW I TA 2026	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
1.	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65	96.18	103.81	SANGAT BAIK
		2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	93.34	101.46	SANGAT BAIK
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	0.00	BELUM ADA SAMPEL
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	70	74.87	CUKUP

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW I TA 2026	REALISASI TW I TA 2026	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	80.00	93.84	BAIK
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	100.00	104.46	SANGAT BAIK
		8. Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	100.00	107.61	SANGAT BAIK
		9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	99.28	103.33	SANGAT BAIK
		10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90	100.00	102.15	SANGAT BAIK
		11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	99.28	104.37	SANGAT BAIK

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW I TA 2026	REALISASI TW I TA 2026	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		12.Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	91.68	100.00	109.08	SANGAT BAIK
		13.Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		14.Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.20	87.30	100.11	SANGAT BAIK
		15.Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.46	SANGAT BAIK
2.	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16.Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.59	1.59	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.00	BAIK
3.	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17.Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.90	90.76	100.69	SANGAT BAIK

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW I TA 2026	REALISASI TW I TA 2026	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
		18. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10.00	10.00	100.00	BAIK
		19. Jumlah desa pangan aman	10.00	10.00	100.00	BAIK
		20. Jumlah pasar pangan berbasis aman komunitas	10.00	10.00	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.24	SANGAT BAIK
4.	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	40.00	14.09	35.23	KURANG
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			35.23	KURANG
5.	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	41.00	41.67	101.63	SANGAT BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101.63	SANGAT BAIK
6.	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00	BAIK
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.00	BAIK

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

N O	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET TW I TA 2026	REALISASI TW I TA 2026	CAPAIAN	KRITERIA CAPAIAN
7.	Layanan Publik UPT yang Prima	24.Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
8.	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25.Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		26.Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		27.Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		28.Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0.00	DIUKUR DI AKHIR TAHUN
NILAI KINERJA ORGANISASI					97.00	BAIK

Berdasarkan data capaian IKU dan Sasaran Kegiatan tersebut, pada TW I TA 2026 ini, Capaian Kinerja Organisasi BBPOM di Bandung adalah sebesar 97.00% dengan predikat "BAIK". Terdapat tiga (3) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, dua (2) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan satu (1) sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

SASARAN KEGIATAN KE-1 **MENINGKATNYA EFEKTIVITAS PENGAWASAN PRODUK SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA UPT**


Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 15 (lima belas) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan kelima belas indikator tersebut, terdapat 4 (empat) indikator kinerja UPT yang diukur pada akhir Tahun yaitu :

- a. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar,
- b. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM,
- c. Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT, dan
- d. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman.






Indikator yang dapat diukur untuk mendapatkan Nilai Pencapaian Sasaran adalah 11 (sebelas) indikator, sehingga diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.46% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.3.

TABEL 3.1.3






CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-1
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65%	96.18%	103.81%	Sangat Baik	
2. Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0,00%	0,00%	0,00%	Diukur pada Akhir Tahun	-

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00%	93.34%	101.46%	Sangat Baik	
4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0.00%	0.00%	Diukur pada Triwulan Selanjutnya	-
5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50%	70.00%	78.87%	Cukup	
6. Persentase keputusan/rekomen dari hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85,25%	80.00%	93.84%	Baik	
7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73%	100.00%	104.46%	Sangat Baik	
8. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa	92.93%	100.00%	107.61%	Sangat Baik	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
9. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08%	99.28%	103.33%	Sangat Baik	
10. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90%	100.00%	102.15%	Sangat Baik	
11. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12%	99.28%	104.37%	Sangat Baik	
12. Persentase Label Produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68%	100.00%	109.08%	Sangat Baik	
13. Persentase pemenuhan target AMR di wilayah UPT	0.00%	0,00%	0,00%	Diukur pada Akhir Tahun	-
14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sedian Farmasi dan Pangan Olahan UPT	87.20%	87.30%	100.11%	Sangat Baik	

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00%	0,00%	0,00%	Diukur pada Akhir Tahun	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.46%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sediaan farmasi mencakup obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted atau purposive sampling dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman sampling dan pengujian.

Tindak lanjut pada sampel melibatkan beberapa tahap, dimulai dari pelaksanaan sampling, penanganan sampel, pengawasan penandaan/label, pelaksanaan pengujian, hingga pelaporan hasil.

Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga diwajibkan melaporkan tanggapan terhadap surat tindak lanjut yang dikirimkan oleh pusat, sesuai pedoman tindak lanjut yang berlaku.

Sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait.

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(A + B + C + D) / 4$

A. Persentase Sampel Obat Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = a+b+c+d

- a. Kesesuaian Perencanaan Sampling (Bobot: 30%),
 $30\% \times (\text{Jumlah sampel dengan perencanaan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$,
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Target sampel,
 2. Renlak kategori sampel (sarana berizin (JKN, Non-JKN, Program, Ruang Lingkup, Vaksin) dan Sarana Tidak Berizin (Luring dan Daring),
 3. Renlak Kategori Kelas Terapi,
- b. Kesesuaian Pelaksanaan Sampling (Bobot: 20 %).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$
Mencakup kesesuaian dengan:
 1. Renlak periode/waktu sampling,
 2. Ketentuan Evaluasi Penandaan
- c. Kesesuaian Pelaksanaan Pengujian (Bobot: 20%).
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai ketentuan} / \text{total jumlah sampel yang diuji} \times 100\%)$.
Mencakup kesesuaian pelaksanaan pengujian dengan parameter sesuai Pedoman Sampling yang berlaku, termasuk uji secara rapid.
Jumlah sampel yang diuji sampai dengan periode yang dimaksud yang mencakup sampel dari UPT sendiri maupun dari UPT lain sesuai penugasan regionalisasi laboratorium. Pada UPT BPOM yang tidak melaksanakan pengujian pada periode dimaksud, maka perhitungan capaian kinerja tanpa menyertakan bobot point C.
- d. Kesesuaian Pelaporan Hasil Sampling dan Pengujian (Bobot: 20 %)
 $20\% \times (\text{Jumlah sampel dengan pelaporan sesuai ketentuan} / \text{Total target sampel} \times 100\%)$. Mencakup kesesuaian:
 1. Pengambilan kesimpulan akhir mencakup kesesuaian antara kesimpulan penandaan dan kesimpulan pengujian
 2. Waktu pelaporan sesuai pedoman sampling, berdasarkan

terbitnya Laporan Hasil Pengujian UPT Penguji sampai dengan terkirimnya laporan ke Pusat.

- e. Kesesuaian Pelaporan Monitoring Penarikan (Bobot:10%) $10\% \times (\text{Jumlah laporan monitoring penarikan sesuai ketentuan} / \text{target jumlah laporan Monitoring penarikan} \times 100\%)$

B. Persentase Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}(*) / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}(**) / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

- b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diperiksa/disampling dan diuji}) \times 100\%$

- c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

- d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT} / \text{Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik}) \times 100\%$

C. Persentase Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang

Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

$a1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling (renlak dan kategori sampel)}^{(*)} / \text{target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$

$a2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling}^{(**)} / \text{jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$

Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan (SLA sampling, pengujian dan pelaporan) = $(\text{Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sampel yang diuji}) \times 100\%$

c. Kesesuaian parameter uji = $(\text{Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diuji}) \times 100\%$

d. Akurasi dalam penentuan Kesimpulan = $(\text{Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa dan diuji sesuai} / \text{Target sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Mencakup penentuan kesimpulan:

1. Penandaan
2. Pengujian
3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)

e. Tanggapan atas surat tindak lanjut = $(\text{Jumlah surat yang$

ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik) $\times 100\%$

D. Persentase Sampel Kosmetik Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = $(a+b+c+d+e)/5$

a. Pemenuhan target pengawasan = $(a1 + a2) / 2$

Keterangan:

a1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) $\times 100\%$

a2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) $\times 100\%$

Perhitungan pembilang dan penyebut pada komponen a2 mempertimbangkan SLA dari pengujian sampel tersebut serta periode pelaporan. Jika sampel belum selesai diuji namun masih ada tersisa hari untuk SLA pengujian, maka sampel tersebut diperhitungkan di bulan berikutnya (baik pembilang maupun penyebut)

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT, untuk Loka/Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji

b. Kesesuaian pelaksanaan sampling

(Jumlah sampel dengan pelaksanaan sampling sesuai ketentuan / Total target sampel $\times 100\%$).

Mencakup kesesuaian dengan:

1. Kategori sampling yang telah ditetapkan
2. Pemilihan parameter uji

c. Kelengkapan laporan dan ketepatan waktu untuk pengambilan sampel, pengujian dan pelaporan

(Jumlah sampel yang disampling, diuji dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu / Jumlah seluruh sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) $\times 100\%$.


Mencakup kelengkapan laporan dan ketepatan waktu:

1. SLA Sampling
 2. SLA Pengujian
 3. SLA Pelaporan
- d. Ketepatan dalam penentuan kesimpulan
(Jumlah kesimpulan sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan sesuai / Jumlah sampel yang diperiksa, diuji, dan dilaporkan) × 100%
- Mencakup penentuan kesimpulan:
1. Penandaan
 2. Pengujian
 3. Akhir (gabungan penandaan dan pengujian)
- e. Tanggapan atas surat tindak lanjut
(Jumlah surat yang ditindaklanjuti oleh UPT / Jumlah surat yang dikirimkan oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik atau Direktur Pengawasan Kosmetik) × 100%.
- Mencakup surat:
1. Edaran pembersihan pasar
 2. Edaran pemeriksaan sarana kosmetik

TABEL 3.1.4

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

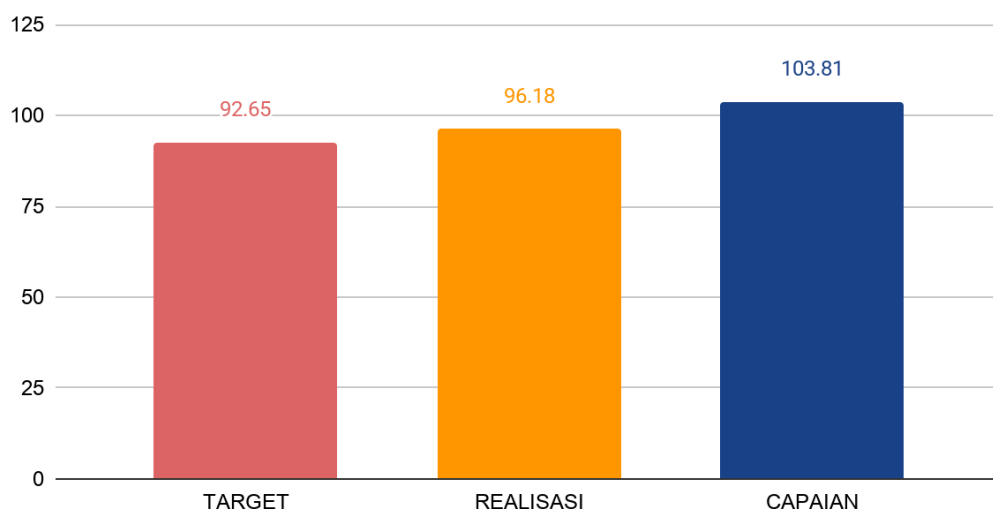
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65%	96.18%	103.81%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92.65%. Seluruh sampel sediaan farmasi

telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Dengan demikian ketepatan pelaporan sampling dan pengujian memenuhi *timeline* yang ditetapkan. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 96.18%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 103.81% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.1
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92.65%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 103.81% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.5
PERBANDINGAN REALISASI TW I DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TA 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI
-----------	-------------------	-------------------	-----------------	----------

Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65%	96.18%	103.81%	Tercapai/ Melampaui	
--	--------	--------	---------	------------------------	---

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Sampai dengan TRIWULAN I sampel sediaan farmasi yang disampling dan diuji Balai Besar POM di Bandung sebesar 14,80% (249 sampel dari target 1683 sampel). Seluruh sampel sediaan farmasi yang diuji Balai Besar POM di Bandung yang berasal dari anggota Balai Regional Semarang sebesar 14,83% (308 sampel dari 2076 sampel sesuai timeline yang dipersyaratkan).
2. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2026 dan waktu pelaksanaan sampling dilaksanakan dengan tepat sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
3. Setiap personil sampling telah mengikuti pelatihan sampling sediaan farmasi melalui IDEAS.
4. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel produk pangan olahan.
5. Pengambilan contoh sampel sediaan farmasi yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan sampel sediaan farmasi untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.

6. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.
7. Melakukan monitoring tindak lanjut surat Badan POM terkait Obat, Obat Bahan Alam dan Kosmetik TMS.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja :

1. Pada triwulan I sampel yang disampling dan diuji masih sangat sedikit yaitu sebesar 14,83% dan timeline pengujian tercapai sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan sehingga target kinerja bisa tercapai.
2. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
3. Telah dilakukan sosialisasi terkait Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2026 kepada seluruh petugas sampling pada tanggal 14 Januari 2026.



Gambar 3.1.1 Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sampling Obat dan Makanan Tahun 2026

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

1. Adanya Aplikasi Siarsi untuk sampel Obat dan Aplikasi appsheet untuk sampel Obat Bahan Alam, Kosmetika dan

- Suplemen Kesehatan dalam monitoring sampel obat yang tersampling.
2. Adanya Aplikasi datastudio.google.com untuk membantu pengecekan analisis resiko setiap sampel obat sesuai dengan Pedoman Sampling 2026.
 3. Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :
 4. Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.
 5. Di laboratorium mikrobiologi membuat aplikasi IFTE (Integrated Form for Tools & Equipment) yang merupakan e-form terintegrasi untuk mempermudah proses pencatatan penggunaan peralatan dan instrumen. Setiap peralatan di Laboratorium mikrobiologi diberikan nomor dan QR Code, sehingga untuk penggunaannya personel pengujian tinggal melakukan scan QR Code untuk check in, dan akan secara otomatis tersimpan data penggunaannya dalam sistem. Selain itu di laboratorium mikrobiologi ini juga membuat aplikasi Kartu Stock Online menggunakan google appsheet. Aplikasi ini digunakan untuk pembuatan, penggunaan dan mengontrol media/reagen, sehingga lebih mudah dan terdokumentasi dengan baik dan aman, akibatnya penggunaan media/reagen akan lebih efektif dan efisien.
 6. Di bagian Inspeksi terdapat aplikasi internal (Appsheet) pada pelaporan sampel obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik yang mempercepat dan memudahkan

untuk mengakses data sehingga mempercepat proses pelaksanaan sampling.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.6

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SAMPEL SEDIAAN FARMASI BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.81%	5.83%	17.81	16.81	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($0 > 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

2. PERSENTASE SARANA PELAYANAN KESEHATAN YANG TELAH MELAPORKAN KTD/ESO KE BPOM

Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) adalah kejadian medis yang tidak diinginkan yang terjadi selama terapi menggunakan obat tetapi belum tentu disebabkan oleh obat tersebut. (Peraturan Badan Pengawas

Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Efek Samping Obat (ESO) adalah respon terhadap suatu obat yang merugikan dan tidak diinginkan dan yang terjadi pada dosis yang biasanya digunakan pada manusia untuk pencegahan, diagnosis, atau terapi penyakit atau untuk modifikasi fungsi fisiologik. (Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans).

Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan).

Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada Tahun berjalan.

KIE Farmakovigilans adalah kegiatan Bimbingan Teknis Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh UPT BPOM kepada Tenaga Kesehatan/Tenaga Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sesuai wilayah kerjanya. Fasilitas pelayanan kesehatan mencakup rumah sakit, puskesmas, klinik yang telah diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada Tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan kesehatan. Setiap tenaga kesehatan/tenaga medis diberikan Sertifikat sebagai bukti mengikuti KIE Farmakovigilans.

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM diukur dengan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM = $(A / B) \times 100\%$.

Keterangan:

A. merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada Tahun berjalan.

B. Merupakan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM.

Target Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM Tahun 2026 adalah 27,79 % diukur pada Akhir Tahun.

3. PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel Pangan Olahan Berisiko adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai Pedoman Sampling adalah pengambilan sampel dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling yang meliputi:

1. kesesuaian target sampel UPT;
2. kesesuaian parameter uji;
3. ketepatan pengambilan kesimpulan;
4. ketepatan waktu pengambilan sampel; dan
5. ketepatan pelaporan sampling dan pengujian

Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut pengawasan/ketentuan lainnya antara lain :

1. Tindak Lanjut terhadap produk TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan TMS Pengujian
2. Pembinaan terhadap Sarana Distribusi dan/atau Sarana Produksi

3. Pemeriksaan Sarana Produksi dan/atau Sarana Distribusi terhadap implementasi CPPOB/ CPerPOB terkait dengan hasil sampling dan pengujian produk TMS
4. Koordinasi pusat dan lintas UPT terkait penyampaian hasil uji produk TMS
5. Tindak lanjut terhadap sampel TIE/ rusak/ kedaluwarsa termasuk dalam bentuk persuasi kepada pelaku usaha untuk melakukan pemusnahan secara sukarela terhadap produk, serta upaya lain untuk memastikan produk tidak beredar

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan = 20%A + 20%B + 20%C + 10%D + 10%E + 20%F.

Keterangan:

A. Kesesuaian Target Sampel

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

A1 = (Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling^(*)/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT) x 100%

A2 = (Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling^(**) / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya) x 100%

*) Termasuk sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa yang tidak dilakukan pengujian

***) Pengujian dilakukan sesuai dengan tingkatan UPT (termasuk pengujian menggunakan test kit), untuk Loka/ Balai POM baru yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan :

(Jumlah sampel yang diuji dengan parameter sesuai pedoman sampling/ jumlah sampel yang diuji) x 100%

Parameter uji dilakukan sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Kesesuaian parameter uji menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Kesimpulan pangan olahan yang aman dan bermutu adalah berdasarkan hasil pengujian. Hasil evaluasi penandaan/ label tidak mempengaruhi kesimpulan akhir sampel. Sampel TIE, rusak dan kedaluwarsa dapat disimpulkan sebagai sampel yang tidak aman dan bermutu. Ketepatan pengambilan kesimpulan menjadi kinerja UPT yang melakukan sampling.

D. Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa tepat waktu sesuai renlak} / \text{jumlah sampel yang diperiksa}) \times 100\%$

E. Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diperiksa dan diuji yang dilaporkan tepat waktu sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

Pelaporan sampling dan pengujian yang tepat waktu sesuai pedoman sampling, yaitu tanggal 15 di bulan berikutnya.

F. Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya


Cara Perhitungan : $((\text{Jumlah sampel yang ditindaklanjuti} / \text{total jumlah sampel yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE atau Rusak atau Kedaluwarsa atau TMS Pengujian)}) \times 100\%$.

TABEL 3.1.7

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

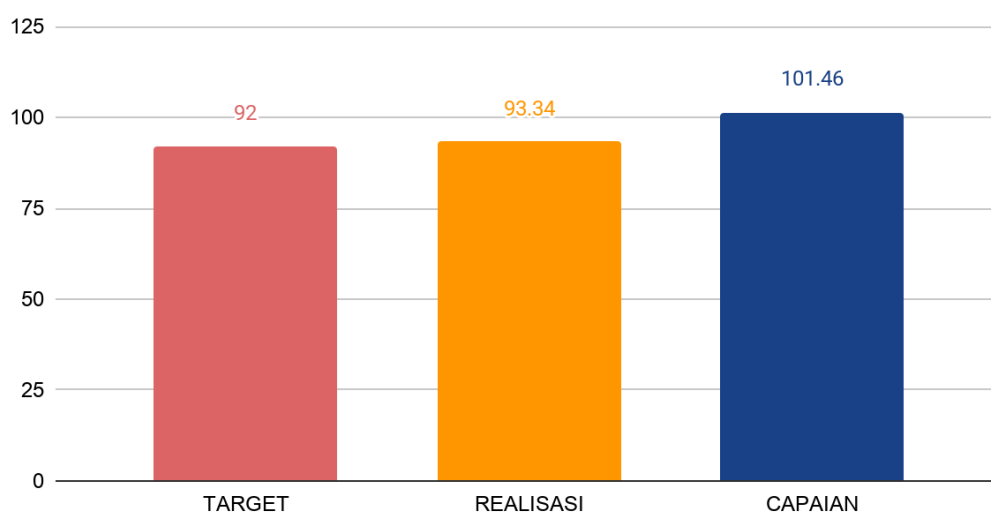
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel Pangan Olahan	92,00%	93.34%	101.46%	Sangat Baik	

Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
--	--	--	--	--	--

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92.00%. Seluruh sampel pangan olahan telah diuji sesuai dengan parameter uji wajib yang ditetapkan pada pedoman sampling. Sebanyak 138 sampel Pangan Olahan telah diperiksa dan diuji dengan rincian sebanyak 126 sampel memenuhi syarat dan 12 sampel tidak memenuhi syarat (Benzoat, ALT, AKK, Dehidroasetat). Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko Yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 93.34 %. Berdasarkan capaian tersebut maka nilai pencapaian indikator adalah sebesar 101.46 % dengan kriteria Sangat Baik.


Grafik 3.1.2
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92,00 %. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 101.46 % dengan kategori Sangat Baik.

TABEL 3.1.8
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET Tahun 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,00%	93.34%	101.46%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Renlak sampling disusun berdasarkan Pedoman Sampling Tahun 2026.
2. Renlak disusun dengan tepat disesuaikan dengan kondisi kemampuan uji di laboratorium dan waktu pelaksanaan sampling dilakukan sesuai jadwal.
3. Penyusunan anggaran yang tepat dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan.
4. Adanya aplikasi yang mempercepat dan memudahkan untuk mengakses data sehingga mempercepat proses Tindak Lanjut.
5. Semua personel telah mengikuti pelatihan sampling pangan olahan melalui IDEAS.
6. Pengambilan contoh sampel Makanan yang dilakukan oleh BBPOM di Bandung dilakukan tepat waktu sesuai dengan rencana pelaksanaan sampling. Kegiatan tersebut dilakukan dengan melakukan pengambilan contoh terhadap produk yang ada di pasaran meliputi sarana distribusi pangan.

7. Peningkatan pemahaman dan ketepatan personil sampling dalam menentukan kesimpulan penandaan sampel produk pangan olahan.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan pangan olahan untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.
3. Melakukan monitoring tindak lanjut produk pangan olahan TMS.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Tersedianya sarana dan prasarana (reagensia, media, alat gelas dan instrumen) yang mendukung dalam proses sampling dan pengujian.
2. Sumber Daya Manusia yang telah memenuhi kompetensi.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
4. Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
5. Telah dilakukan sosialisasi terkait Pedoman Sampling Obat dan Makanan tahun 2026 kepada seluruh petugas sampling pada tanggal 14 Januari 2026.



Gambar 3.1.2 Kegiatan Sosialisasi Pelaksanaan Sampling Pangan Olahan

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Di laboratorium Pangan terdapat aplikasi SIMANTUL PAK yang merupakan sistem berbasis Google Sites yang digunakan sebagai pusat informasi untuk mendukung pengelolaan sampel di laboratorium pangan. Sistem ini memfasilitasi ketertelusuran sampel sejak penerimaan hingga hasil pengujian, monitoring dan evaluasi proses pengujian melalui timeline kegiatan. Selain itu, SIMANTUL PAK juga digunakan untuk pengaturan tugas personel, serta pengelolaan data dan pelaporan terkait kegiatan pengujian, sehingga proses pengelolaan sampel menjadi lebih tertib, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.
2. Di laboratorium mikrobiologi tersedia aplikasi Kartu Stok Online berbasis Google AppSheet yang digunakan untuk pencatatan pembuatan, penggunaan, dan pengendalian media/reagen. Aplikasi ini mempermudah pemantauan stok

- serta memastikan pencatatan yang lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, dan aman, sehingga penggunaan media/reagen menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tersedianya aplikasi DIKOLABORASI Balai Kalibrasi PPPOMN (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan Kalibrasi). Salah satu fitur pada aplikasi DIKOLABORASI adalah pencatatan penggunaan alat melalui pemindaian (scan) barcode yang secara otomatis menyimpan data penggunaan dalam sistem. Fitur ini memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan alat, meningkatkan ketertelusuran riwayat penggunaan, serta mendukung pengendalian dan pengelolaan peralatan laboratorium secara lebih tertib, akurat, dan efisien.
 4. Tersedia aplikasi appsheet untuk monitoring sampel pangan olahan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.9

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE SAMPEL PANGAN OLAHAN BERISIKO YANG
DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	101.46%	3.85%	26.53	25.53	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien ($0 > 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

4. PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

Sesuai standar adalah kesesuaian parameter pengujian sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM. Sesuai standar berdasarkan:

- a. Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.06.1.54.2797 tanggal 7 Juli 2009 tentang Tata Cara Pengambilan Contoh Pangan, Pengujian Laboratorium dan Pelaporan Penyebab Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan; dan
- b. Pedoman Investigasi epidemiologi, pengambilan dan pengujian sampel pangan pada KLB Keracunan Pangan Tahun 2023.

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar dihitung dengan rumus = Jumlah Sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar / Total jumlah sampel KLB keracunan pangan dikirim atau diuji ke BPOM x 100%.

Keterangan:

- a. Diperiksa meliputi pengecekan kelengkapan surat pengantar sampel KLB Keracunan pangan dari Dinas Kesehatan.
- b. Untuk dugaan pangan KLB keracunan pangan bersumber dari pangan olahan terkemas maka dilakukan pemeriksaan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label.

- c. Diuji meliputi pengujian menggunakan laboratorium terhadap sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait.
- d. Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n , merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n .
- e. Sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- f. Dalam pengambilan kesimpulan, di wilayah Loka yang tidak melakukan pengujian, dapat menggunakan hasil yang dikeluarkan oleh Balai Penguji.
- g. Terkait penginputan pelaporan SIPT di Balai Besar/Balai POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji adalah Balai Besar/Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Besar/Balai Penyampling.
- h. Terkait penginputan SIPT di Loka POM:
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil pemeriksaan dalam SIPT adalah Loka Penyampling
 - Unit yang bertugas untuk menginput hasil uji dalam SIPT adalah Balai Penguji.
 - Unit yang bertugas untuk menginput kesimpulan hasil MS/TMS adalah Balai Penguji.
- i. Terkait penginputan SPIMKER KLB Keracunan Pangan:
 - Unit yang bertugas untuk melakukan penginputan adalah unit tempat lokasi kejadian KLB Keracunan Pangan.

TABEL 3.1.10

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI SESUAI STANDAR

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00%	0.00%	0.00%	Diukur pada Triwulan Berikutnya	-

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 100,00%. Pada Triwulan I 2026, belum terdapat sampel KLB, sehingga belum dapat dihitung realisasi dan capaian pada Triwulan I TA 2026.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100%. Realisasi kinerja pada Triwulan I belum dapat dihitung terhadap target tersebut karena belum terdapat sampel KLB di Triwulan I.

TABEL 3.1.11

PERBANDINGAN REALISASI TW I DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI
SESUAI STANDAR
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%	0,00%	0.00%	-	-

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain:

1. Dampak positif dari Program Nasional BPOM sehingga meningkatkan kesadaran Masyarakat akan hal-hal yang menyebabkan KLB terjadi.
2. Program Komunikasi, Informasi dan Edukasi terhadap Masyarakat melalui medsos BBPOM (Instagram, Twitter) memudahkan dalam penyebaran informasi mengenai KLB.
3. Adanya kolaborasi yang baik antara BPOM dengan Dinas terkait penanganan KLB.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Verifikasi bertingkat hasil sampling termasuk evaluasi penandaan pangan olahan untuk meminimalisir adanya kesalahan pengambilan kesimpulan.
2. Melakukan monitoring timeline dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Program Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD)
2. Program Jajanan Anak Sekolah (PJAS)
3. Program Pasar Aman

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Di laboratorium Pangan terdapat aplikasi SIMANTUL PAK yang merupakan sistem berbasis Google Sites yang digunakan sebagai pusat informasi untuk mendukung pengelolaan sampel di laboratorium pangan. Sistem ini memfasilitasi

ketertelusuran sampel sejak penerimaan hingga hasil pengujian, monitoring dan evaluasi proses pengujian melalui timeline kegiatan. Selain itu, SIMANTUL PAK juga digunakan untuk pengaturan tugas personel, serta pengelolaan data dan pelaporan terkait kegiatan pengujian, sehingga proses pengelolaan sampel menjadi lebih tertib, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.

2. Di laboratorium mikrobiologi tersedia aplikasi Kartu Stok Online berbasis Google AppSheet yang digunakan untuk pencatatan pembuatan, penggunaan, dan pengendalian media/reagen. Aplikasi ini mempermudah pemantauan stok serta memastikan pencatatan yang lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, dan aman, sehingga penggunaan media/reagen menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tersedianya aplikasi DIKOLABORASI Balai Kalibrasi PPPOMN (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan Kalibrasi). Salah satu fitur pada aplikasi DIKOLABORASI adalah pencatatan penggunaan alat melalui pemindaian (scan) barcode yang secara otomatis menyimpan data penggunaan dalam sistem. Fitur ini memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan alat, meningkatkan ketertelusuran riwayat penggunaan, serta mendukung pengendalian dan pengelolaan peralatan laboratorium secara lebih tertib, akurat, dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.12

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE SAMPEL KLB KERACUNAN PANGAN YANG DIUJI

SESUAI STANDAR

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sampel KLB keracunan	0,00%	0.00%	0.00	0.00	Efisien

pangan yang diuji sesuai standar					
-------------------------------------	--	--	--	--	--

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar disimpulkan Efisien ($0 < 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

5. PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) adalah pangan olahan hasil produksi Industri Rumah Tangga Pangan. Sampel PIRT berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai pedoman sampling. Ditindaklanjuti sesuai ketentuan meliputi diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling serta tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya. Diperiksa dan diuji sesuai pedoman sampling adalah sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling (kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel dan ketepatan pelaporan). Tindak lanjut sesuai pedoman tindak lanjut/ketentuan lainnya adalah tahapan awal tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya kepada pelaku usaha (IRTP) maupun kepada lintas sektor seperti Dinas Kesehatan/ DPM-PTSP (OPD penerbit SPP-IRT) dll dan atau melaporkan ke Pusat jika kasus lintas wilayah.

Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan diukur dengan $= 20\%A + 20\%B + 20\%C + 10\%D + 10\%E + 20\%F$

A. Kesesuaian target sampel PIRT

Cara Perhitungan : $(A1 + A2) / 2$

$A1 = (\text{Jumlah sampel yang diperiksa sesuai dengan Pedoman Sampling/ target sampel UPT sesuai Pedoman Sampling dan renlak UPT}) \times 100\%$.

$A2 = (\text{Jumlah sampel yang diuji sesuai dengan Pedoman Sampling / jumlah sampel yang masuk laboratorium sesuai tingkatannya}) \times 100\%$.

B. Kesesuaian Parameter Uji

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel sesuai} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$

C. Ketepatan Pengambilan Kesimpulan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel yang diambil kesimpulan sesuai pedoman sampling} / \text{jumlah sampel yang diperiksa dan diuji}) \times 100\%$

D. Ketepatan waktu pengambilan sampel

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel diambil di TW 1} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$.

E. Ketepatan waktu pelaporan

Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah sampel tepat waktu} / \text{Total Sampel PIRT}) \times 100\%$.

F. Tindak lanjut Sampel PIRT

Tindak lanjut sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) tahapan awal sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut atau ketentuan lainnya.


Cara Perhitungan : $(\text{Jumlah Sampel PIRT yang ditindaklanjuti} / \text{Total jumlah sampel yang TMS}) \times 100\%$.

TABEL 3.1.13

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI
SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

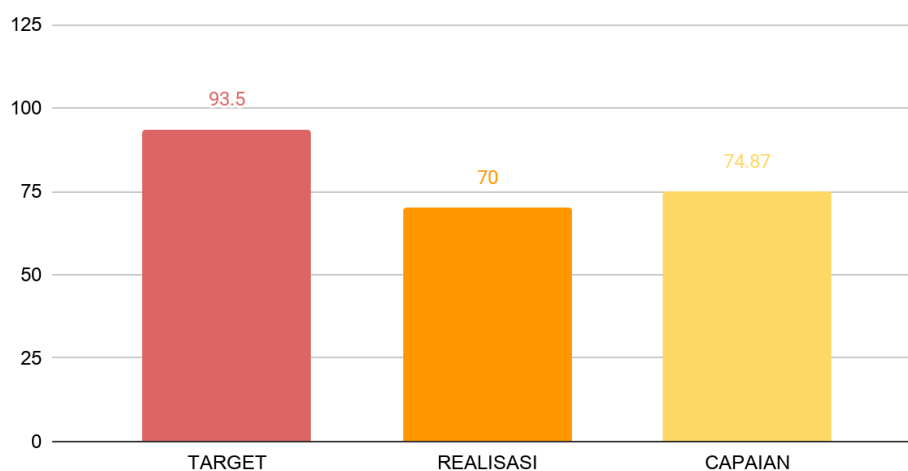
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93.50%	70.00%	74.87%	Cukup	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target indikator ini ditetapkan sebesar 93,50%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 telah dilakukan sampling terhadap 8 sampel PIRT, namun pengujian belum dapat diselesaikan sesuai parameter uji wajib dalam pedoman sampling karena kerusakan pada alat ICP-MS yang saat ini masih dalam proses perbaikan.

Kondisi tersebut menyebabkan persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan baru mencapai 70,00%, sehingga nilai pencapaian indikator pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 74,87% dengan kriteria Cukup.

Grafik 3.1.3
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 93.50%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 74.87 % dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.14

PERBANDINGAN REALISASI TW I DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI
SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KATEGORI	
	Tahun 2026	TW I	TW I		
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	93.50%	70.00%	74.87%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Terjadinya kerusakan pada alat ICP-MS yang digunakan untuk pengujian parameter logam berat pada sampel pangan.
2. Proses perbaikan alat ICP-MS yang masih berlangsung sehingga pengujian sampel belum dapat dilaksanakan secara optimal.
3. Pengujian terhadap sampel PIRT yang telah di sampling belum dapat diselesaikan sesuai parameter uji wajib sebagaimana tercantum dalam pedoman sampling.
4. Keterbatasan sarana pengujian selama alat dalam kondisi tidak berfungsi sehingga berdampak pada tertundanya tindak lanjut hasil sampling.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Melakukan perbaikan alat ICP-MS agar dapat segera digunakan kembali untuk mendukung pelaksanaan pengujian sampel.
2. Melakukan penjadwalan ulang pengujian sampel PIRT yang telah di sampling setelah alat kembali berfungsi.
3. Melakukan optimalisasi pelaksanaan pengujian sampel untuk mempercepat penyelesaian pengujian sesuai dengan parameter uji wajib.

4. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan proses perbaikan alat dapat segera diselesaikan.

D. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Di laboratorium Pangan terdapat aplikasi SIMANTUL PAK yang merupakan sistem berbasis Google Sites yang digunakan sebagai pusat informasi untuk mendukung pengelolaan sampel di laboratorium pangan. Sistem ini memfasilitasi ketertelusuran sampel sejak penerimaan hingga hasil pengujian, monitoring dan evaluasi proses pengujian melalui timeline kegiatan. Selain itu, SIMANTUL PAK juga digunakan untuk pengaturan tugas personel, serta pengelolaan data dan pelaporan terkait kegiatan pengujian, sehingga proses pengelolaan sampel menjadi lebih tertib, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.
2. Di laboratorium mikrobiologi tersedia aplikasi Kartu Stok Online berbasis Google AppSheet yang digunakan untuk pencatatan pembuatan, penggunaan, dan pengendalian media/reagen. Aplikasi ini mempermudah pemantauan stok serta memastikan pencatatan yang lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, dan aman, sehingga penggunaan media/reagen menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Tersedianya aplikasi DIKOLABORASI Balai Kalibrasi PPPOMN (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan Kalibrasi). Salah satu fitur pada aplikasi DIKOLABORASI adalah pencatatan penggunaan alat melalui pemindaian (scan) barcode yang secara otomatis menyimpan data penggunaan dalam sistem. Fitur ini memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan alat, meningkatkan ketertelusuran riwayat penggunaan alat, serta mendukung pengendalian dan pengelolaan peralatan laboratorium secara lebih tertib, akurat, dan efisien.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.15

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE SAMPEL PIRT BERISIKO YANG DITINDAKLANJUTI

SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	74.87%	4.82%	15.55	14.55	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (0>,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

6. PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- a. Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);
- b. Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen

Tindak lanjut adalah *feedback/respon* dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan.

Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder diukur dengan rumus : $(A+B) / 2$ dengan rincian sebagai berikut :


- A. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha X 100%.
- B. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor / Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor X 100%.

TABEL 3.1.16

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

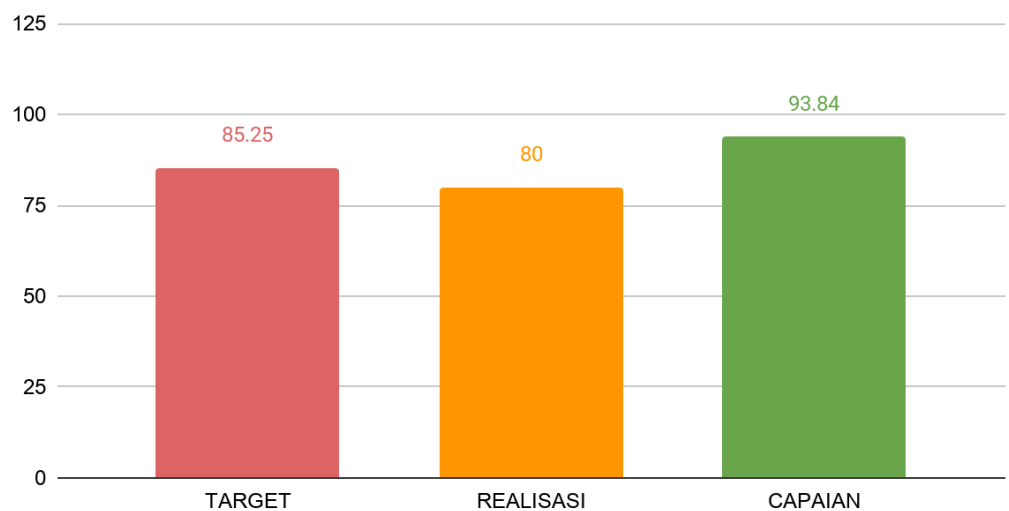
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25%	80%	93.84%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 85.25%. Dari 128 rekomendasi yang diterbitkan kepada pelaku usaha, telah diterima respon tindak lanjut sebanyak 76 respon (59,38%). Rekomendasi yang diterbitkan untuk lintas sektor pada triwulan I adalah sebanyak 4 rekomendasi dan keseluruhannya telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor (100%). Dengan demikian realisasi keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder adalah sebesar 80%, sehingga nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 93.84% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.4
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026


Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 85.25%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 93.84% dengan kategori Akan Tercapai.

TABEL 3.1.17

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG

DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25%	80,0%	93.84%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha terhadap hasil pengawasan yang telah dilakukan. Dari data tergambar bahwa pelaku usaha yang masih rendah responnya terhadap hasil pengawasan ini berasal dari pelaku usaha peredaran pangan (27,03%) dan toko obat (16,67%).
2. Belum dipahaminya alur penyampaian respon tindak lanjut yang disampaikan kepada Balai Besar POM di Bandung

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala sehingga terhadap respon tindak lanjut dibandingkan terhadap surat tindak lanjut yang diterbitkan terus dimonitor untuk mencegah terjadinya keterlambatan.
2. Dilakukan penagihan respon tindak lanjut (CAPA) melalui surat resmi penagihan CAPA sebagai pengingat terkait kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan

3. Dibangun sistem notifikasi dan reminder secara elektronik untuk mengingatkan tenggat waktu tindak lanjut bagi pelaku usaha.
4. Desk CAPA secara langsung dengan sarana yang belum menyelesaikan CAPA nya.



Gambar 3.1.3 Kegiatan desk CAPA secara mandiri yang bertujuan meningkatkan komitmen pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Kegiatan desk CAPA adalah proses evaluasi, verifikasi, dan monitoring tindakan perbaikan dan pencegahan (Corrective and Preventive Action) yang dilakukan melalui penilaian dokumen yang disampaikan oleh pihak sarana baik secara offline maupun online. Dengan melakukan desk CAPA maka sekaligus memberikan bimbingan bagaimana membuat CAPA yang jelas dan benar.
2. Diberikan sosialisasi dan edukasi kepada pelaku usaha misalnya dengan memberikan bimbingan teknis bagaimana menyusun CAPA yang efektif, focus pada akar masalah dan pencegahan berulang.
3. Penggunaan platform digital dalam monitoring CAPA yaitu aplikasi Satu POM Jabar dan Galura Inspeksi. Monitong

progress CAPA yang dikirimkan oleh pelaku usaha dan evaluasi oleh petugas

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Berdasarkan informasi yang didapat maka untuk menunjang keberhasilan capaian kinerjanya, sarana yang penyampaian respon CAPA nya kurang memadai dilakukan pendampingan diantaranya dengan kegiatan desk CAPA. Kegiatan inovasi ini dinamai SANGKURIANG.
2. Untuk memudahkan dalam monitoring capaian kinerja maka dibuat kertas kerja yang memuat data sarana, tanggal pemeriksaan, tanggal surat rekomendasi/ tindak lanjut dan tanggal respon atas rekomendasi yang disampaikan. Rekapitulasi capaian kinerjanya dimonitor dan dievaluasi dalam rapat kinerja bulanan bersama pimpinan.
3. Untuk mengingatkan secara otomatis kepada pelaku usaha melalui WA jika timeline untuk penyampaian CAPA telah sampai batasnya maka telah dan sedang dikembangkan aplikasi pengembangan dari Satu POM Jabar yaitu Galura Inspeksi (Pengawasan dan Respon Tindak Lanjut yang Responsif dan Akurat). Selain itu Galura Inspeksi juga digunakan untuk memantau progress CAPA yang diterima dan dievaluasi oleh petugas

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.18

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE KEPUTUSAN/REKOMENDASI HASIL PENGAWASAN
SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG
DITINDAKLANJUTI OLEH STAKEHOLDER

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.84%	0.00%	-	-	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

7. PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana produksi (Sarprod) sediaan farmasi yaitu meliputi:

- a. Sarana Produksi Obat, Bahan Baku Obat, Produk Biologi, dan Sarana Khusus (misal Unit Transfusi Darah, Fasilitas Radiofarmaka, Sel Punca, dan Rumah Sakit).
- b. Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam dan/atau suplemen kesehatan untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi industri obat tradisional, Industri Ekstrak bahan alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha mikro obat tradisional, industri suplemen kesehatan
- c. Fasilitas produksi kosmetik, yaitu industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

Sarana tersebut diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan inspeksi pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Sarana diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada regulasi perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Perhitungan capaian persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan= rata-rata dari % Sarprod Obat, % Sarprod Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, % Sarprod Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

$\% \text{ Sarprod Obat} = \text{Rata-rata (A+B+C)}$

A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan = (Jumlah sarana yang diperiksa sesuai dengan sasaran dan cakupan renlak Tahunan/Jumlah sasaran dan cakupan target renlak) X 100%.

B. Jumlah pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana yang telah dilakukan dalam kurun waktu seTahun/ jumlah target Tahunan) X 100%.

C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut = rata-rata persentase sub aspek 1-6 :

1. Ketepatan penetapan tindak lanjut
2. Ketepatan pemenuhan waktu penyampaian tindak lanjut
3. Kesesuaian format laporan inspeksi
4. Kepatuhan pelaporan tindak lanjut melalui SIPT
5. Cakupan aspek CPOB dalam laporan inspeksi
6. Implementasi metode PLOR dalam menerangkan temuan dalam laporan inspeksi

Inspeksi bersama dengan unit pusat hanya dihitung dalam komponen B-Jumlah Pelaksanaan Inspeksi. Target Tahunan B12 minimal sejumlah target RO Tahun berjalan.

$\% \text{ Sarprod OBA dan SK} = \text{Rata-rata (A+B+C+D)}$

A. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana / jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak) X 100%

B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%


- C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) × 100%

Jika sarana tersebut tutup, tetap dihitung sebagai capaian indikator pada komponen A dan B.

% Sarprod Kosmetik = Rata-rata (A+B+C+D)

- A. Pelaksanaan inspeksi = (Jumlah realisasi pengawasan sarana/ jumlah target sesuai renlak) X 100%
- B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = (Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu/ Jumlah seluruh sarana yang diperiksa) X100%
- C. akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = (Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang sesuai / jumlah sarana yang selesai diperiksa) × 100%
- D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = (Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu/ jumlah seluruh tindak lanjut) x 100%

TABEL 3.1.19
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan	95.73%	100%	104.46%	Sangat Baik	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
----------------------------------	--	--	--	--	--

Pada TRIWULAN I, seluruh sarana produksi sediaan farmasi yang ditargetkan dapat terlaksana sesuai dengan ketentuan. Secara terperinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL 3.1.20

RINCIAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TA 2026

SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI OBAT	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Jumlah pelaksanaan inspeksi	100%
	C. Kualitas laporan inspeksi dan ketepatan tindak lanjut	100%
	CAPAIAN INDUSTRI OBAT	100%
IOT/IEBA	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI IOT/IEBA	100%
INDUSTRI SK	A. Kesesuaian Pelaksanaan inspeksi	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI SK	100%
INDUSTRI KOSMETIK	A. Kesesuaian sasaran dan cakupan pengawasan	100%
	B. Kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat	100%
	C. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi	100%
	D. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana	100%
	CAPAIAN INDUSTRI KOSMETIK	100%
CAPAIAN SARPROD SEDIAAN FARMASI		100%

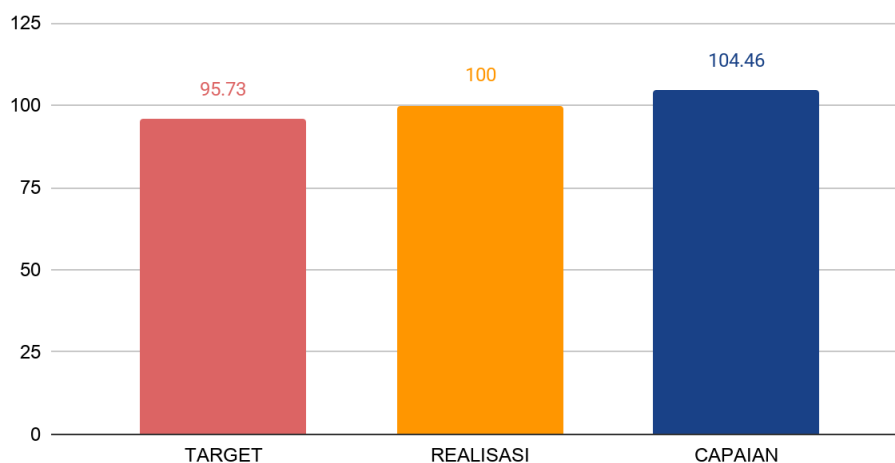
A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja TRIWULAN I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95.73%. Persentase sarana produksi

Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 104.46% dengan kriteria Sangat Baik.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Grafik 3.1.5
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95.73%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 104,46% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.21
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73%	100.00%	104.46%	Tercapai/ Melampaui	▲

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian risiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penetapan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Farmasi. Pada Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPOB 24 orang, CPOTB 45 orang dan CPKB 29 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Kepala, Senior ataupun Junior.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corrective Action dan Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.4 Kegiatan Monev Rutin

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1 POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progres tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.22

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SARANA PRODUKSI SEDIAAN FARMASI YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.46%	8.65%	12.44	11.44	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

8. PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan sarana produksi pangan olahan termasuk IRTP yang dianggap berisiko, berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. termasuk pengelolaan data sarana produksi pangan olahan. Fasilitas produksi pangan olahan meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan oleh UPT, dilihat dari ketersediaan data sarana produksi pangan olahan yang dikelola, pemenuhan berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi:

1. Ketepatan waktu tindak lanjut

2. Kesesuaian tindak lanjut termasuk koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pengawasan


Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dihitung dengan rumus
$$\% \text{ Jumlah Sarana Diperiksa \& Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan} = \frac{\text{Jumlah Sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Seluruh Sarana yang Diperiksa}} \times 100\%$$

Keterangan:

1. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
2. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek $(a+b+c/3)$ yaitu:
 - a. Ketepatan waktu : pengukuran ketepatan waktu dilihat dari ketepatan pelaporan hasil pemeriksaan melalui SIPT sesuai dengan ketentuan;
 - b. Kesesuaian tindak lanjut : kesesuaian tindak lanjut sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut (TL). TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana. Jika diperlukan koordinasi dengan lintas sektor terkait, maka tindak lanjut dapat berupa bukti koordinasi yang telah dilakukan, dapat berupa surat resmi atau notulensi pertemuan, dll.
 - c. Kesesuaian grading: kesesuaian grading akan terkait dengan indeks kepatuhan pelaku usaha, oleh karena itu perlu adanya pengecekan kesesuaian grading, dimana jika hasil:
 - pemeriksaan A dan B atau pemeriks level I dan level II maka grading sebagai A (MK).
 - pemeriksaan C atau pemeriks level III maka grading sebagai B (TMK).
 - pemeriksaan D atau pemeriks level IV maka grading sebagai C (TMK).

TABEL 3.1.23
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93%	100.00%	107.61%	Sangat Baik	

Pada Triwulan I, seluruh sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang ditargetkan dapat terlaksana dan ditindaklanjuti sesuai pedoman, termasuk untuk pemeriksaan sarana IRTP. Secara terperinci capaian indikator kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah.

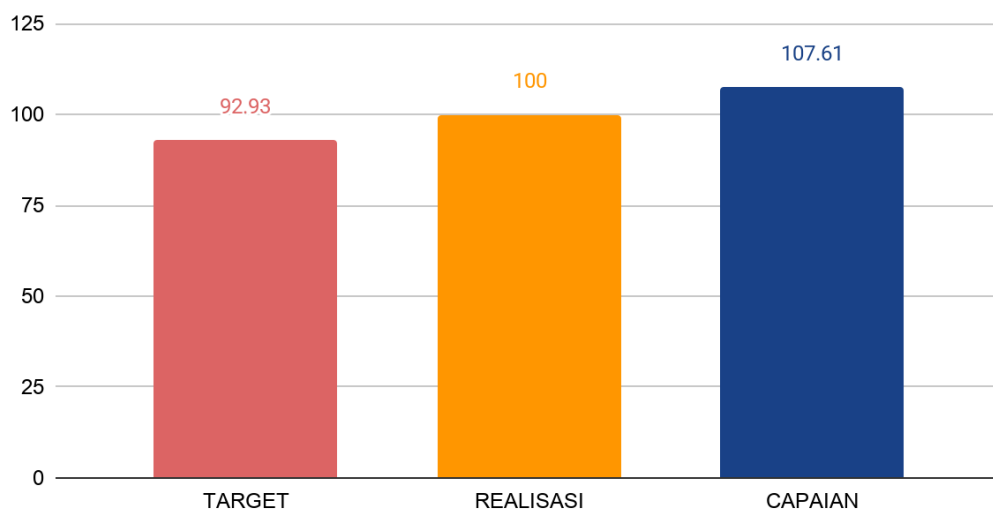
TABEL 3.1.24
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

SARANA	KESESUAIAN DENGAN PEDOMAN	% Kesesuaian
INDUSTRI PANGAN	A. Ketepatan waktu pelaporan	100%
	B. Kesesuaian tindak lanjut	100%
	C. Kesesuaian grading	100%
	CAPAIAN INDUSTRI PANGAN	100%

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 92.93%. Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 100%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 107.61% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.6
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 92.93%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 107.61% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.25
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93%	100.00%	107.61%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian risiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi sediaan Pangan Olahan termasuk IRTP. Pada Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur Pangan sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda maupun Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corrective Action dan Preventive Action (CAPA).
- Peningkatan koordinasi dengan lintas sektor dalam pengawasan pangan olahan, khususnya Pangan Industri Rumah Tangga melalui berbagai cara, baik formal maupun informal.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.5 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1 POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait secara efektif.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.26

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE SARANA PRODUKSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	107.61%	8.65%	12.44	11.44	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1.00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

9. PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi sediaan farmasi adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- a. Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitas Pengelolaan Kefarmasian;
- b. Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- d. Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Jumlah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat

yang diperiksa adalah jumlah fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang telah diperiksa pada tahun berjalan. Diperiksa dan ditindaklanjuti melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mengacu pada: regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana distribusi, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.

Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = rata-rata dari % fasilitas distribusi Obat, % fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, % fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan, % fasilitas distribusi Kosmetik yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

A. Persentase Sarana Distribusi Obat yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Dihitung berdasarkan rata-rata dari Pemenuhan Target Pemeriksaan (a) dan Kesesuaian Tindaklanjuti (b).

a) Pemenuhan Target Pemeriksaan Komponen penilaian ini ditunjukkan untuk menilai pemenuhan kuantitas pelaksanaan pemeriksaan oleh $UPT = (A/B) \times 100\%$

A. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

B. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat yang ditargetkan untuk diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.

b) Kesesuaian Tindaklanjuti Komponen penilaian ini ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian antara tindak lanjut yang telah diberikan oleh UPT setiap bulan dibandingkan dengan standar yang berlaku, yaitu Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan, dan SOP Makro Pengawasan = $\{(A/C) +$

$$(B/C) \times 100\%$$


- A. Jumlah total tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang diselesaikan dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT, sesuai standar waktu (timeline), pada periode bulan berjalan. 42
 - B. Jumlah total laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dan laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang dinyatakan sesuai dengan Pedoman Tindak Lanjut oleh independent supervisor melalui aplikasi SIPT, pada periode bulan berjalan.
 - C. Jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi dengan jumlah total fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat, yang telah diperiksa, ditindaklanjuti, dan dilaporkan melalui SIPT oleh Kepala UPT setiap bulan pada tahun berjalan.
- B. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)
- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$
 - b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
 - c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
 - d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$
- C. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan = Rata-rata (a+b+c+d)

- a. Kesesuaian pelaksanaan inspeksi = $(\text{Jumlah realisasi pengawasan sarana} / \text{jumlah target pengawasan inspeksi sesuai Renlak}) \times 100\%$ 43
- b. Kelengkapan pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat = $(\text{Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan lengkap dan tepat waktu} / \text{Jumlah seluruh sarana yang diperiksa}) \times 100\%$
- c. Akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi = $(\text{Jumlah kesimpulan pengawasan sarana yang benar} / \text{jumlah sarana yang selesai diperiksa}) \times 100\%$
- d. Kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana = $(\text{Jumlah tindaklanjut hasil pengawasan sarana yang sesuai dan tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tindaklanjut}) \times 100\%$

TABEL 3.1.27

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN TRIWULAN I TAHUN 2026

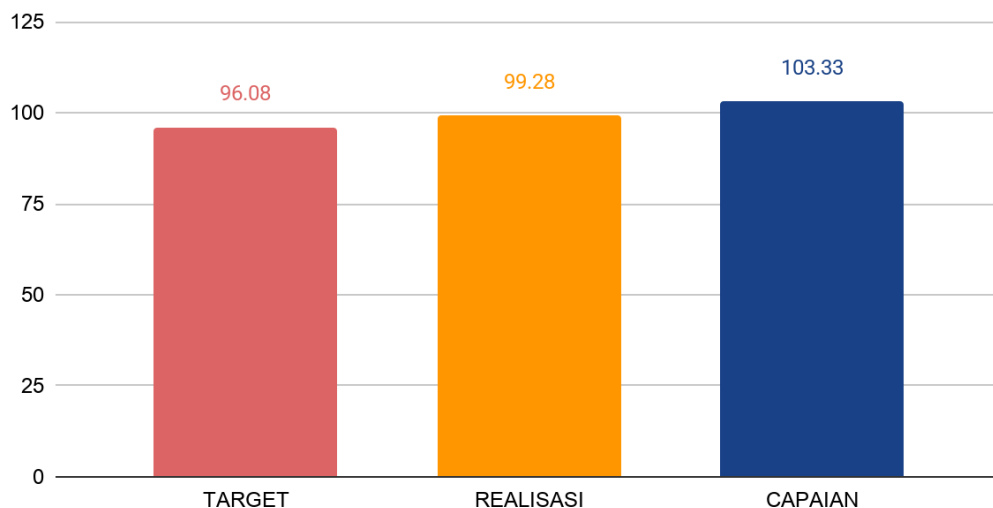
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08%	99.28%	103.33%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator kinerja ini adalah sebesar 96.08%. Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 99.28%. Dengan demikian, nilai pencapaian

indikator tersebut adalah sebesar 103.33% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.7
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 96.08%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 103.33% dengan kategori Tercapai/ Melampaui.

TABEL 3.1.28

PERBANDINGAN REALISASI TW I DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08%	99.28%	103.33%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Pemenuhan target pemeriksaan: sebagian besar pelaksanaan target sesuai dengan rencana kerja (renlak).
- Melalui verifikasi bertahap, tindak lanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman tindak lanjut
- Verifikasi SIPT secara bertahap oleh supervisor dan kepala balai serta komunikasi yang efektif dalam menunjang ketepatan dan kelengkapan pelaporan
- Diskusi antar petugas untuk penyamaan persepsi

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan pada aplikasi SIPT dan Galura Inspeksi
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Memperkuat koordinasi antara UPT dan BPOM dalam penetapan tindak lanjut
6. Pembinaan setempat kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu Mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa.

2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan.
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi.
6. Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
7. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat maupun UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.
2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya
3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan,

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.29

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE FASILITAS DISTRIBUSI SEDIAAN FARMASI YANG

DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.33 %	8.75%	11.81	10.81	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

10. PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pengawasan melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cakupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Diperiksa sesuai ketentuan berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait, meliputi:

1. Pemenuhan target sarana distribusi pangan olahan yang diperiksa
2. Ketepatan waktu pelaporan
3. Kesesuaian tindak lanjut (TL pemeriksaan dihitung terhadap TL pertama yang diberikan setelah pemeriksaan sarana.

Jumlah sarana yang diperiksa sesuai ketentuan adalah penjumlahan dari komponen-komponen sebagai berikut: jumlah sarana yang

diperiksa sesuai target, ketepatan waktu pelaporan, serta ketepatan tindak lanjut (A+B+C) dengan rincian sebagai berikut :

A = 20% x ((Jumlah sarana yang diperiksa / target jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

B = 70% X ((Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)


C = 10% X ((Jumlah sarana yang diperiksa dan dilaporkan tepat waktu / jumlah sarana yang diperiksa) x 100%)

TABEL 3.1.30

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

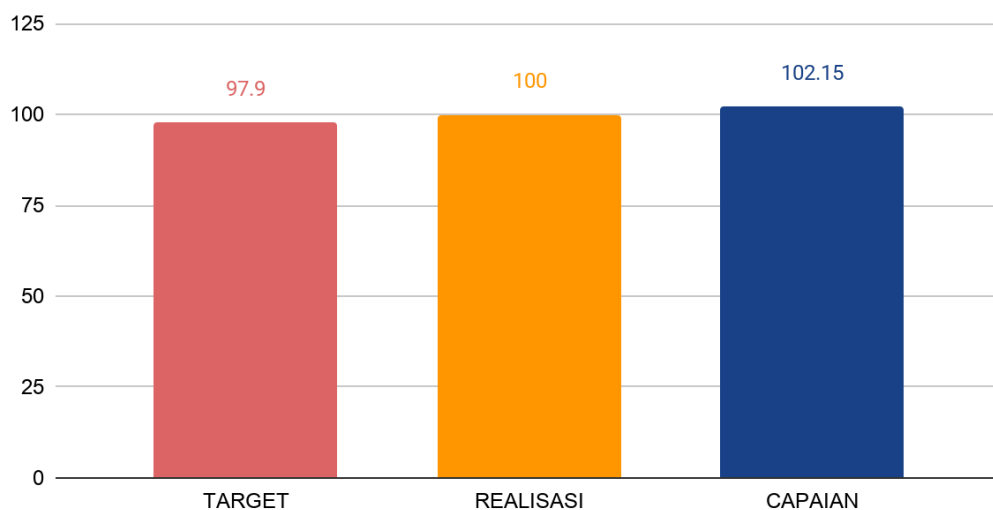
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90%	100.00%	102.15%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini sebesar 97.90%. Capaian realisasi pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencapai 100%. Dengan demikian, nilai capaian kinerja indikator tersebut sebesar 102.15%, dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.8
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target kinerja Tahun 2026 yang ditetapkan untuk indikator kinerja ini adalah sebesar 97.90%. Apabila realisasi kinerja pada Triwulan I dibandingkan dengan target tersebut, maka capaian kinerja Triwulan I mencapai 102.15% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.31

PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90%	100.00%	102.15%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Perencanaan pengawasan berbasis risiko. Sarana distribusi diprioritaskan berdasarkan kategori risiko tinggi dan riwayat pelanggaran misalnya produk tanpa izin edar
2. Pemantauan capaian kinerja secara berkala sehingga pencapaian target berada pada jalur yang tepat. Selain itu membantu mendeteksi dini hambatan dan penyimpangan
3. Melalui verifikasi bertahap, tindak lanjut yang diterbitkan sesuai dengan pedoman tindak lanjut
4. Verifikasi SIPT secara bertahap oleh supervisor dan kepala balai serta komunikasi yang efektif dalam menunjang ketepatan dan kelengkapan pelaporan
5. Diskusi antar petugas untuk penyamaan persepsi

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja tersebut antara lain:

1. Menyusun rencana pemeriksaan berbasis risiko dan prioritas bulanan/triwulanan
2. Optimalisasi sumber daya pemeriksa (tim kerja, jadwal fleksibel, pengaturan beban kerja)
3. Monitoring rutin progres pemeriksaan dan evaluasi bulanan
4. Review hasil pemeriksaan dan tindak lanjut oleh supervisor
5. Pembinaan setempat kepada sarana untuk mengurangi kesalahan atau ketidakpatuhan berulang.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Perencanaan dan Penjadwalan Pemeriksaan yang Efektif. Menyusun jadwal pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko masing-masing fasilitas untuk memastikan prioritas yang tepat. Selain itu mengalokasikan tim pemeriksa sesuai dengan kompleksitas dan jumlah fasilitas yang akan diperiksa

2. Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi. Kegiatan pelatihan dapat berupa pelatihan internal dan eksternal
3. Penggunaan Teknologi Informasi. Mengoptimalkan penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan Galura Inspeksi
4. Monitoring dan Evaluasi Berkala. Melakukan penilaian rutin terhadap capaian kinerja individu dan tim untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan
5. Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi antar inspektur.
6. Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.
7. Koordinasi dengan Stakeholder Terkait : Penguatan kolaborasi dengan stakeholder lintas sektor, seperti Dinas Kesehatan, untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pelaku usaha.



Gambar 3.1.6 Koordinasi Lintas Sektor

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan Evaluasi kinerja berkala. Data capaian kinerja digunakan untuk mengidentifikasi tren, hambatan dan perbaikan yang diperlukan. Data didapat dari SIPT, Galura Inspeksi dan rekapitulasi dari kertas kerja. Aplikasi Galura Inspeksi merupakan inovasi pengembangan dari aplikasi Satu POM Jabar.

2. Rapat tinjauan kinerja bulanan bersama pimpinan yang membahas capaian kinerja, kendala di lapangan dan tindak lanjut strategisnya
3. Membuat dashboard berbasis IT yaitu aplikasi Galura Inspeksi untuk menampilkan capaian pemeriksaan, pelaporan SIPT, tindak lanjut hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada pelaku usaha dan CAPA nya. Selain itu menampilkan capaian pemeriksaan per individu, per kabupaten/ kota, sarana memenuhi ketentuan/ tidak memenuhi ketentuan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.32

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE SARANA DISTRIBUSI PANGAN OLAHAN YANG
DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102.15%	10.41%	9.81	8.81	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

11. PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

- a. Sediaan Farmasi Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, Kosmetik, Suplemen kesehatan, dan Obat Kuasi.
- b. Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik

dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan.

- c. Iklan yang diawasi pelaksanaan tahapan evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan.
12. Sesuai ketentuan berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan; pedoman pengawasan periklanan obat, obat bahan alam, obat kuasi, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan; pedoman tindak lanjut; serta timeline yang ditetapkan pada pedoman dan SOP terkait.
 - d. Target pengawasan iklan obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, obat kuasi, kosmetik dan pangan olahan merupakan target pengawasan iklan untuk masing-masing Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang telah ditetapkan Pusat.
 - e. Pemeriksaan iklan per media sesuai dengan target yang tercantum pada surat edaran adalah rerata dari persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi per media.
 - f. Tepat waktu adalah sesuai pedoman.

Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = $(A+B+C+D+E)/5$

A. Persentase Iklan obat yang diawasi sesuai ketentuan = $a+b/2$

- a. Pemenuhan jumlah target pengawasan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi sesuai renlak}} \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{Jumlah target iklan yang diawasi}} \times 100\%$

B. Persentase iklan Obat Bahan Alam yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata $(a+b+c)$

- a. Pemenuhan target pengawasan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi}}{\text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}} \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $\frac{\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu}}{\text{jumlah iklan yang selesai diawasi}} \times 100\%$

- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- C. Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang diawasi sesuai ketentuan = rata-rata (a+b+c)
- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang selesai diawasi} / \text{jumlah target iklan pengawasan sesuai Renlak}) \times 100\%$
- b. Ketepatan waktu pelaporan = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang selesai diawasi}) \times 100\%$
- c. Akurasi pengambilan keputusan = $(\text{Jumlah keputusan hasil pengawasan iklan yang sesuai} / \text{jumlah seluruh keputusan hasil pengawasan}) \times 100\%$
- D. Persentase iklan kosmetik yang diawasi sesuai ketentuan = $(a+b) / 2$
- a. Rerata persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $\text{Jumlah persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target} / \text{jumlah media (4)}$. Persentase capaian pengawasan iklan yang diawasi pada media sesuai target = $(\text{capaian jumlah iklan per media} / \text{jumlah target per media}) \times 100\%$
- b. Rerata persentase iklan yang dilaporkan tepat waktu = $(\text{Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT} + \text{Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat}) / 2$. Persentase rerata capaian evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT = $(\text{Jumlah iklan yang evaluasi dan verifikasi oleh Operator UPT yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$. Persentase rerata capaian pelaporan ke Operator Pusat = $(\text{Jumlah iklan yang dilaporkan ke Operator Pusat yang tepat waktu} / \text{jumlah iklan yang dievaluasi}) \times 100\%$
- E. Persentase iklan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan = (a+b+c)
- a. Pemenuhan target pengawasan = $(\text{Jumlah iklan yang diawasi} / \text{jumlah target iklan sesuai renlak}) \times 40\%$
- b. Kesesuaian proporsi media iklan yang disampling = $\text{Rata-rata dari perhitungan} ((\text{jumlah iklan yang diawasi per media iklan} / \text{jumlah iklan yang diawasi}) / \text{proporsi target media}) \times 20\%$


- c. Ketepatan waktu pelaporan = (Jumlah iklan yang dilaporkan tepat waktu/ jumlah iklan yang diawasi) X 40%

TABEL 3.1.33

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

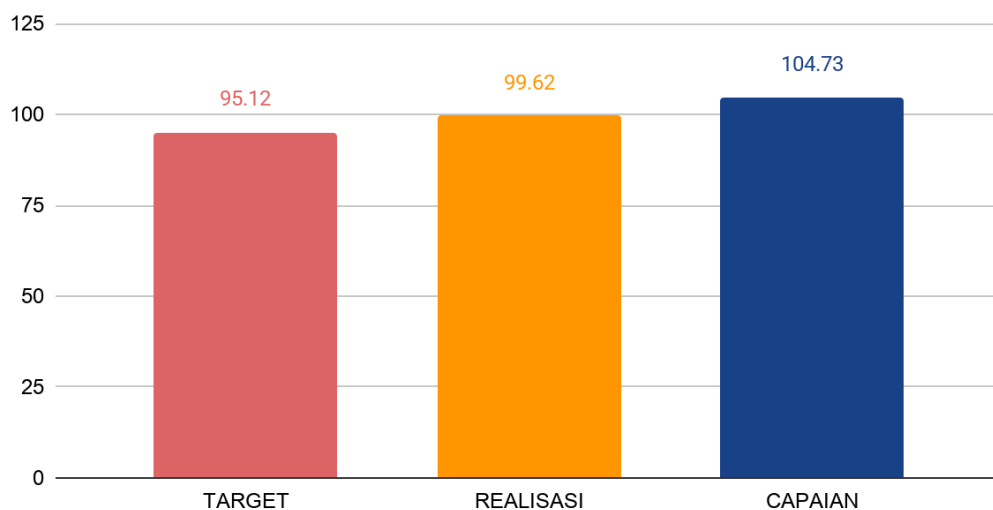
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12%	99.62%	104.73%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 95.12%. Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan sebesar 99.62%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 104.73% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.9

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 95.12%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 104.73% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.34

PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12%	99.62%	104.73%	Tercapai / Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan iklan dengan melakukan kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan iklan.
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan iklan tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan iklan.
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT Iklan .

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.
- Sharing knowledge antar personil pengawasan iklan sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel.
- Peningkatan kompetensi personil pengawasan iklan dengan mengadakan sharing knowledge tentang pengawasan iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara internal yang diselenggarakan secara luring pada bulan 14 Januari 2026.



Gambar 3.1.7 Kegiatan Sharing Knowledge Pengawasan Sampling dan Iklan untuk personil pengawasan Iklan di Sub Kelompok Inspeksi BBPOM Di Bandung

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, dengan memanfaatkan aplikasi SIPT dan Aplikasi pengawasan iklan di Pusat antara lain SiAPIK untuk

pengawasan iklan obat, SiREKA untuk pengawasan iklan Obat Bahan Alam, Kuasi dan Suplemen Kesehatan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.35

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE IKLAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN

YANG DIAWASI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN N TW I	CAPAIAN ANGGARA N	IE	TE	KATEGORI
Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	104.73%	15.76%	6.62	5.62	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

13. PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRONIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

- a. Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau.
- b. Pengawasan Label dilaksanakan dengan menilai kesesuaian terhadap standar pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik.

- c. Pengawasan Label dilakukan terhadap kemasan sampel Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang diambil di peredaran (tempat penjualan dan/atau distributor).
- d. Sesuai standar berarti pemeriksaan/evaluasi dilakukan berdasarkan regulasi perundang-undangan mencakup peraturan pemerintah, petunjuk teknis pelaksanaan pengawasan produk tembakau; pedoman tindak lanjut dan ketentuan lain yang berlaku.
- e. Produk Tembakau adalah setiap produk yang seluruhnya atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dipanaskan, diuapkan, dihisap, dihirup, dikunyah, atau dengan cara konsumsi apapun. Produk Tembakau tersebut meliputi: a.rokok; b.cerutu; c.rokok daun; d.tembakau iris; e. tembakau padat dan cair; dan f.hasil pengolahan tembakau lainnya.
- f. Rokok Elektronik adalah hasil tembakau dan/atau nikotin dan/atau bahan lain berbentuk cair, padat, atau bentuk lainnya yang berasal dari pengolahan daun tembakau maupun bahan lainnya yang Dibuat dengan cara ekstraksi atau cara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya yang disediakan untuk konsumen akhir dalam kemasan penjualan eceran yang dikonsumsi dengan cara dipanaskan menggunakan alat pemanas elektronik kemudian dihisap.

Cara perhitungan % label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar = $A+B/2$

A: Persentase Pemenuhan jumlah target pengawasan label : (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%


B: Persentase ketepatan waktu pelaporan label: (Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu / Jumlah target pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi) x 100%

TABEL 3.1.36

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK
ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR

TRIWULAN I TAHUN 2026

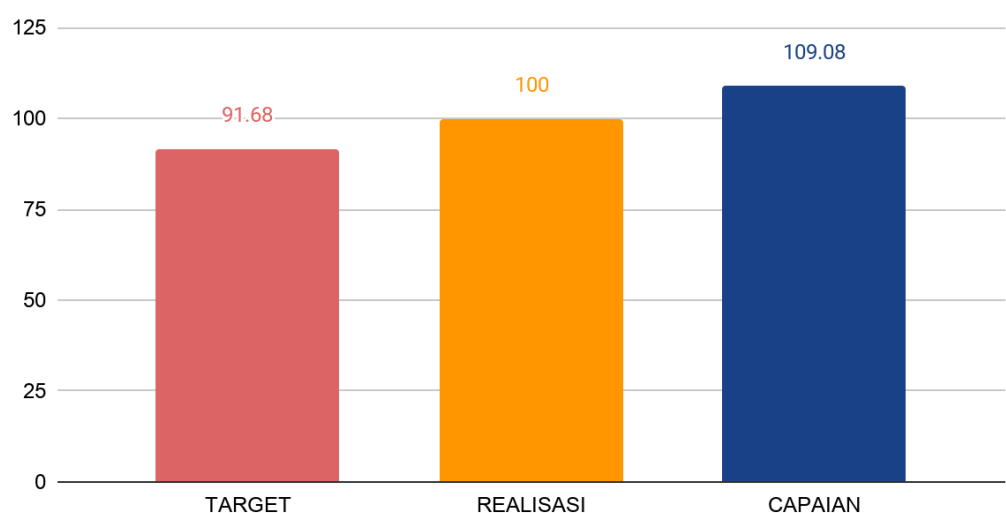
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	91.68%	100.00%	109.08%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 91.68%. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar sebesar 100.00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 109.08% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.10

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91.68%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 109.08% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.37

PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISAS I TW I	CAPAIA N TW I	KATEGORI	
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	91.68%	100.00%	109.08%	Tercapai/ Melampaui	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Peningkatan kompetensi personil yang melakukan pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik dengan mengikuti Bimbingan Teknis Pengawasan Produk Tembakau dan Rokok Elektrik
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam memberikan kesimpulan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik
- Peningkatan pemahaman dalam pelaporan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik tepat waktu sesuai pedoman.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil pengawasan label produk tembakau dan/atau rokok elektrik
- Melakukan monitoring timeline pelaporan SIPT label produk tembakau dan/atau rokok elektrik

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, dengan memanfaatkan aplikasi SIPT.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.38

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE LABEL PRODUK TEMBAKAU DAN/ATAU ROKOK
ELEKTRIK YANG DIAWASI SESUAI STANDAR
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN N TW I	CAPAIAN ANGGARA N	IE	TE	KATEGO RI
Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai standar	109.08%	11.08%	9.85	8.85	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektrik yang diawasi sesuai ketentuan

disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

14. PERSENTASE PEMENUHAN TARGET AMR DI WILAYAH UPT

Indikator "Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT" mengukur kesesuaian Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM dalam melaksanakan kegiatan pengendalian Antimicrobial Resistance (AMR) dan mencapai target yang telah ditetapkan. Target yang dimaksud adalah indikator teknis pengendalian AMR sebagaimana tertuang dalam rencana aksi pengendalian AMR di lingkungan Badan POM.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di Wilayah UPT dihitung berdasarkan rerata capaian UPT dalam melaksanakan rencana aksi pengendalian AMR sesuai target yang ditetapkan, yaitu:

- 1) Penggunaan Tools Pengawasan AMR (A)
- 2) Pelaksanaan Bimtek (B)
- 3) Pelaksanaan Advokasi (C), dan
- 4) Pelaksanaan Publikasi (D)

15. NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN LABORATORIUM

Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) adalah standar yang ditetapkan BPOM berdasar rencana peningkatan kemampuan laboratorium BPOM. Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM merupakan agregasi dari Standar Kemampuan Laboratorium tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, dan tingkat 1.

a. Tingkat 4 Laboratorium Balai Regional.

Terdapat 7 laboratorium regional yang berlokasi di Medan, Pekanbaru, Semarang, Samarinda, Makassar, Manado, dan Surabaya, dan masing-masing memiliki wilayah kerja regional. Laboratorium Balai Regional melakukan pengujian unggul dan dasar Obat dan Makanan; mengoordinir Balai Besar/Balai POM/Loka POM dalam satu regional dan melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.

b. Tingkat 3 Laboratorium Balai Besar/Balai POM di tingkat provinsi:

Sebanyak 27 balai besar dan balai POM yang bekerja di tingkat provinsi. Lab tingkat 3 melakukan pengujian dasar kimia dan mikrobiologi dan parameter lain selain parameter unggul, serta melakukan pengujian konfirmasi dari tier di bawahnya.


- c. Tingkat 2 Laboratorium Balai POM di tingkat Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 2 merupakan laboratorium Balai POM yang berlokasi di kota seperti Bogor, Tangerang, Tasikmalaya, Surakarta, Kediri, Jember, dan Payakumbuh, yang fokus pada tingkat kabupaten/kota. Laboratorium tingkat 2 Melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1 dan 2;
- d. Tingkat 1 Laboratorium Loka POM di Kabupaten/Kota:
Laboratorium tingkat 1 melakukan pengujian dasar Kimia dan Mikrobiologi tingkat 1.

Pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium UPT Badan POM terdiri beberapa komponen:

- a. SKL tingkat 4 dan 3, terdiri dari 4 (empat) komponen yaitu pemenuhan terhadap:
 - Standar Ruang Lingkup;
 - Standar Peralatan;
 - Standar Kompetensi Laboratorium;
 - Standar Metode yang terverifikasi.
- b. SKL tingkat 2 dan 1 terdiri 3 komponen yaitu:
 - Pemenuhan terhadap Standar Ruang Lingkup;
 - Standar Peralatan;
 - Standar Kompetensi Laboratorium.

TABEL 3.1.39
CAPAIAN KINERJA INDIKATOR
NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN
PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN
LABORATORIUM
TRIWULAN I TAHUN 2026

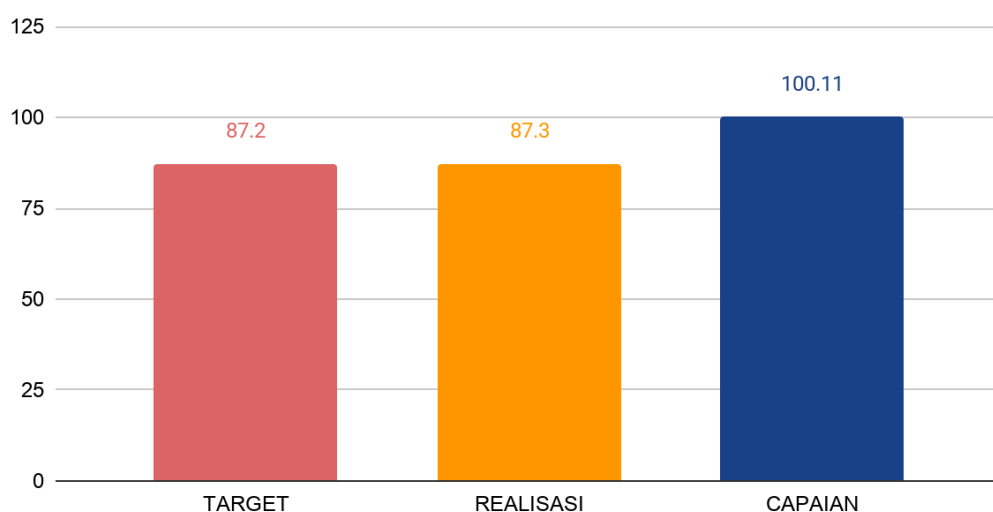
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN N TW I	KRITERIA
-----------	----------------	-------------------	----------------------	----------

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.20	87.30	100.11%	Sangat Baik	
---	-------	-------	---------	-------------	---

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 87.20%. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium sebesar 87.30%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.11% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.11
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja TRIWULAN I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 87.80%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 99.43% dengan kategori Akan Terpenuhi.

TABEL 3.1.40

PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN
PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN
LABORATORIUM
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.80%	87.30%	99.43%	Akan Tercapai	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Pemenuhan SRL pada TRIWULAN I sebesar 88,50%, SRL laboratorium kimia 85,10% dengan rincian laboratorium obat sebesar 78,30%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 88,80%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 95,00%, SRL laboratorium pangan sebesar 78,10%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 92,00%.
2. Pemenuhan peralatan sebesar 89,40%, dengan rincian nilai pemenuhan peralatan kimia sebesar 92,95% dan pemenuhan peralatan mikrobiologi sebesar 85,93%.
3. Pemenuhan kompetensi laboratorium pengujian kimia dan mikrobiologi sebesar 90%.
4. Pemenuhan metode terverifikasi sebesar 71,60%, dengan rincian pemenuhan metode terverifikasi laboratorium obat sebesar 50,00%, SRL laboratorium OBA dan SKOK sebesar 55,20%, SRL Laboratorium Kosmetik sebesar 85,40%, SRL laboratorium

pangan sebesar 74,30%, dan SRL laboratorium mikrobiologi sebesar 93,20%.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain :

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup : Membuat roadmap pemenuhan SRL Obat, Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi, Kosmetik, Pangan dan Mikrobiologi disesuaikan dengan kendala permasalahan yang ada.
2. Pemenuhan Kompetensi : Membuat roadmap peningkatan kompetensi penguji sesuai kemampuan melakukan pengujian pada masing-masing laboratorium.
3. Pemenuhan Peralatan : Membuat roadmap penambahan alat dan perbaikan alat yang rusak di Tahun anggaran 2026.
4. Pemenuhan metode terverifikasi : Membuat roadmap penambahan metode terverifikasi pada masing-masing laboratorium.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Untuk pemenuhan standar ruang lingkup pada TRIWULAN I Tahun 2026 telah dilakukan verifikasi metode analisa sebanyak 1 parameter uji pada SRL Obat dan 1 parameter uji pada SRL pangan.
- Untuk pemenuhan kompetensi SDM pada TRIWULAN I Tahun 2026, laboratorium obat, obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan obat kuasi, laboratorium kosmetik dan mikrobiologi sudah memenuhi kedua aspek penilaian kompetensi. Sedangkan laboratorium pangan belum memenuhi aspek 2 penilaian kompetensi.
- Untuk pemenuhan metode analisa terverifikasi pada TRIWULAN I Tahun 2026 Laboratorium Obat sebanyak 2 Metode Analisa, laboratorium obat bahan alam, suplemen Kesehatan dan obat kuasi 2 Metode Analisa.
- Untuk pemenuhan peralatan pada TRIWULAN I Tahun 2026

diambil dari data aplikasi DIKOLABORASI untuk pemenuhan peralatan kimia dan peralatan biologi.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Adanya aplikasi appsheet pada laboratorium kosmetik (aplikasi Sistik (Sistem Informasi Kosmetik) yang kemudian direplikasi oleh laboratorium obat bahan alam, suplemen kesehatan dan obat kuasi, serta laboratorium pangan. Aplikasi appsheet ini digunakan untuk mempermudah ketertelusuran data sampel dari masuk sampai ke hasil pengujian, mempermudah kontrol dan monitoring sampel melalui timeline pengujian dan mempermudah pelaporan dari mulai SPK, SPP, CP LCP sampai monev penarikan data hasil pengujian bulanan.
2. Di laboratorium mikrobiologi tersedia aplikasi Kartu Stok Online berbasis Google AppSheet yang digunakan untuk pencatatan pembuatan, penggunaan, dan pengendalian media/reagen. Aplikasi ini mempermudah pemantauan stok serta memastikan pencatatan yang lebih tertib, terdokumentasi dengan baik, dan aman, sehingga penggunaan media/reagen menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Di laboratorium Pangan terdapat aplikasi SIMANTUL PAK yang merupakan sistem berbasis Google Sites yang digunakan sebagai pusat informasi untuk mendukung pengelolaan sampel di laboratorium pangan. Sistem ini memfasilitasi ketertelusuran sampel sejak penerimaan hingga hasil pengujian, monitoring dan evaluasi proses pengujian melalui timeline kegiatan. Selain itu, SIMANTUL PAK juga digunakan untuk pengaturan tugas personel, serta pengelolaan data dan pelaporan terkait kegiatan pengujian, sehingga proses pengelolaan sampel menjadi lebih tertib, terpantau, dan terdokumentasi dengan baik.
4. Tersedianya aplikasi DIKOLABORASI Balai Kalibrasi PPPOMN (Digitalisasi Tata Kelola Peralatan Laboratorium dan Layanan

Kalibrasi). Salah satu fitur pada aplikasi DIKOLABORASI adalah pencatatan penggunaan alat melalui pemindaian (scan) barcode yang secara otomatis menyimpan data penggunaan dalam sistem. Fitur ini memudahkan pemantauan dan evaluasi penggunaan alat, meningkatkan ketertelusuran riwayat penggunaan alat, serta mendukung pengendalian dan pengelolaan peralatan laboratorium secara lebih tertib, akurat, dan efisien.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.41

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
NILAI PEMENUHAN LAB PENGUJIAN SEDIAAN FARMASI DAN
PANGAN OLAHAN UPT SESUAI STANDAR KEMAMPUAN
LABORATORIUM
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	100.11%	0.03%	3301.04	3300.04	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

5. PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG DIDAMPINGI DALAM PENCAPATAN KABUPATEN/KOTA PANGAN AMAN

1. Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan

keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan



2. Pendampingan yang dilakukan meliputi:
 - a. advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah
 - b. mengaktifasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota
 - c. mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM
3. Kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:
 - a. Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan
 - b. Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60)

**SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIFITAS PENGAWASAN SARANA
KEGIATAN KE-2 PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.00% dengan kriteria BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.42.

TABEL 3.1.42

**CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-2
TRIWULAN I TAHUN 2026**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.59%	1.59%	100.00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.00%	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar. Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk

pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan). Setiap sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dilakukan sampling sejumlah 1 produk dengan mengacu pada Pedoman Sampling Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Tahun 2026

Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan = Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan / Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT X 100%.

Keterangan:


- Jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah total jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti di Tahun berjalan, serta dilaporkan ke Pusat melalui SIPT.
- Jumlah sarana produksi pangan fortifikasi keseluruhan yang berada di wilayah UPT menggunakan baseline data sarana produksi pangan fortifikasi Tahun 2023 yang memiliki nomor izin edar.

TABEL 3.1.43

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

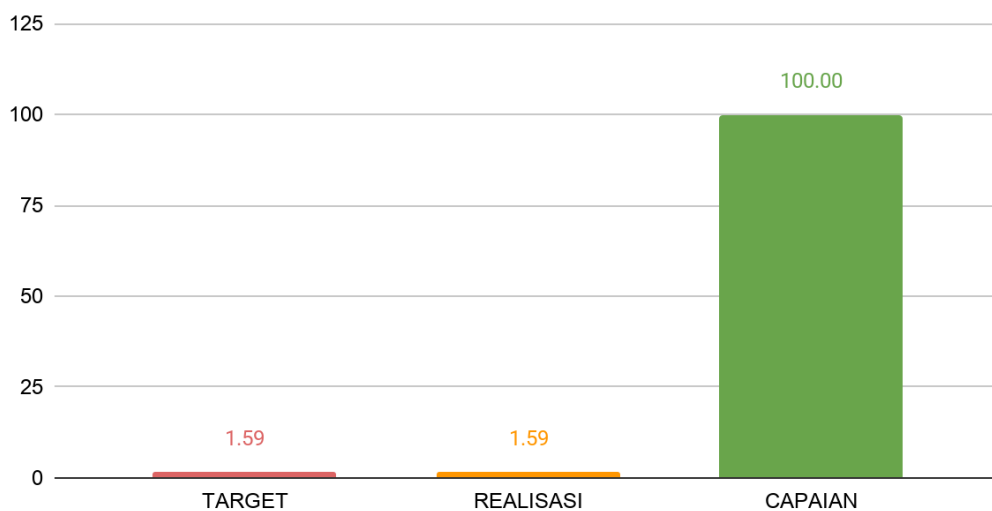
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.59%	1.59%	100.00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 1.59%. Jumlah sarana pangan fortifikasi yang berada di cakupan pengawasan Balai Besar POM di Bandung adalah sebanyak 63 sarana. Pada Triwulan I, sarana pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebanyak 1 (satu) sarana, sehingga persentase cakupan sebesar 1.59%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.12

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 63.00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 2.52% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.44

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00%	1.59%	2.52%	Perlu Upaya Keras	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada Triwulan I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Penyusunan kajian resiko pengawasan yang menjadi dasar dalam penyusunan target pengawasan telah dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
- Peningkatan kompetensi inspektur yang melakukan pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. Pada Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung telah memiliki inspektur CPPOB sebanyak 39 orang dengan jenjang yang bervariasi, baik Inspektur Madya, Muda dan Pertama.
- Peningkatan pemahaman dan ketepatan dalam menyusun Berita Acara, Laporan Inspeksi dan surat tindak lanjut serta evaluasi Corrective Action and Preventive Action (CAPA).

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Verifikasi bertingkat hasil pengawasan untuk meminimalisir adanya kesalahan keputusan tindak lanjut dan ketepatan hasil inspeksi.
- Melakukan monitoring timeline, baik timeline penerbitan surat tindak lanjut, pelaporan inspeksi dan pelaporan SIPT.
- Koordinasi dan komunikasi dengan pusat atau UPT lain terus ditingkatkan, baik melalui komunikasi formal dan informal.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

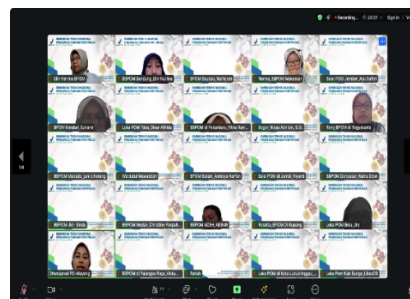
Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Kegiatan Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan secara konsisten dan komprehensif, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan.



Gambar 3.1.8 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi

- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel
- Pelatihan personel yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya.
- Bimbingan Teknis Nasional Pengawas Pangan Fortifikasi yang diselenggarakan oleh PPSDM POM Bersama Direktorat Pengawasan Sarana Produksi Pangan Olahan.



Gambar 3.1.9 Bimbingan Teknis Nasional Pengawasan pangan fortifikasi

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung

pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Penggunaan aplikasi 1POM JABAR untuk memantau dan mengevaluasi hasil pemeriksaan. Melalui aplikasi ini, progress tindak lanjut dari pelaku usaha atau lintas sektor akan terlihat dengan jelas, sehingga semua hasil inspeksi akan dapat dimonitoring dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
- Kegiatan SANGKURIANG (Sinergitas Penguatan Kerjasama untuk Respon Tindak Lanjut Hasil Pengawasan) berupa pertemuan dan koordinasi dengan lintas sektor dan pelaku usaha untuk membahas tindak lanjut hasil pengawasan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan komitmen lintas sektor dan pelaku usaha dalam menindaklanjuti hasil pengawasan

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.45

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE CAKUPAN SARANA PRODUKSI PANGAN FORTIFIKASI
YANG DIPERIKSA DAN DITINDAKLANJUTI SESUAI KETENTUAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00%	3.40%	29.42	28.42	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

**SASARAN MENINGKATNYA EFEKTIVITAS KIE DI MASING-MASING
KEGIATAN KE-3 WILAYAH KERJA UPT**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan keempat indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100.24% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.46.

TABEL 3.1.46

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-3

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	90.76	100.96%	Sangat Baik	
2. Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10.00%	10.00%	100,00%	Baik	
3. Jumlah desa pangan aman	10.00%	10.00%	100.00%	Baik	
4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00%	10.00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100.24%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

**1. TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan

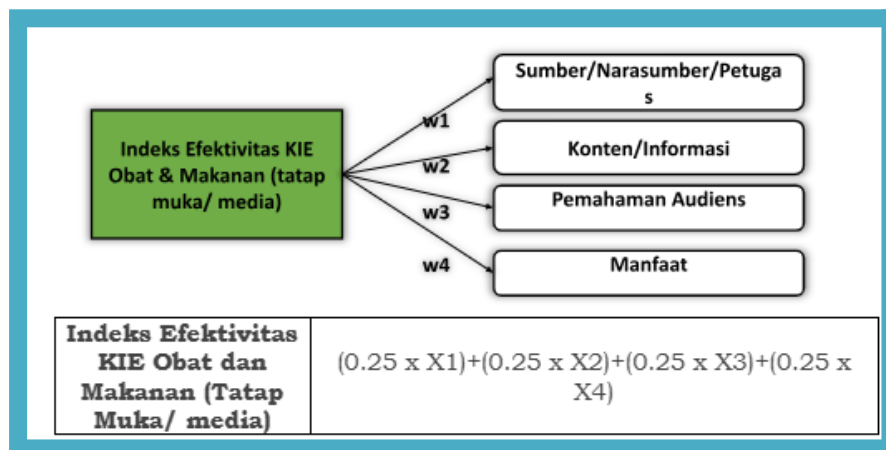
Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang. Indeks efektivitas KIE terdiri atas 4 indikator/kriteria yaitu:

1. Sumber atau Narasumber KIE
2. Konten atau Informasi KIE
3. Pemahaman Audiens KIE
4. Manfaat KIE bagi Audiens KIE

Indeks efektivitas KIE diperoleh berdasarkan data hasil survei efektivitas KIE langsung dan atau KIE Media yang diisi responden dan diinput ke dalam aplikasi evaluasi KIE. Target responden yaitu masyarakat penerima manfaat KIE yang menjadi peserta kegiatan KIE yang sedang diselenggarakan UPT BPOM dan atau responden yang pernah mengakses kanal-kanal media KIE BPOM atau menerima produk informasi BPOM dalam 1 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisisioner dan survey secara daring. Jumlah responden adalah Penghitungan jumlah minimal sampel responden menggunakan tabel *krejcie morgan* terhadap jumlah populasi yang mengacu pada target KIE Tahunan yang diproporsikan pada tiap triwulan

Indeks efektivitas KIE UPT dihitung secara otomatis melalui rumus/formula yang ditetapkan dan dapat dipantau melalui dashboard utama aplikasi evaluasi KIE dengan akun masing-masing UPT.

Rumus/formula Indeks Efektivitas KIE unit kerja sebagai berikut:



Gambar 3.1.10 Rumus Indeks Efektifitas KIE

TABEL 3.1.47

KATEGORI TINGKAT EFEKTIVITAS KIE

SKOR INDEKS 100	INTERPRETASI EFEKTIVITAS
<65,00	Tidak Efektif
65,01 – 75,00	Kurang Efektif
75,01 – 85,00	Cukup Efektif
85,01 – 95,00	Efektif
95,01 - 100	Sangat Efektif

TABEL 3.1.48

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

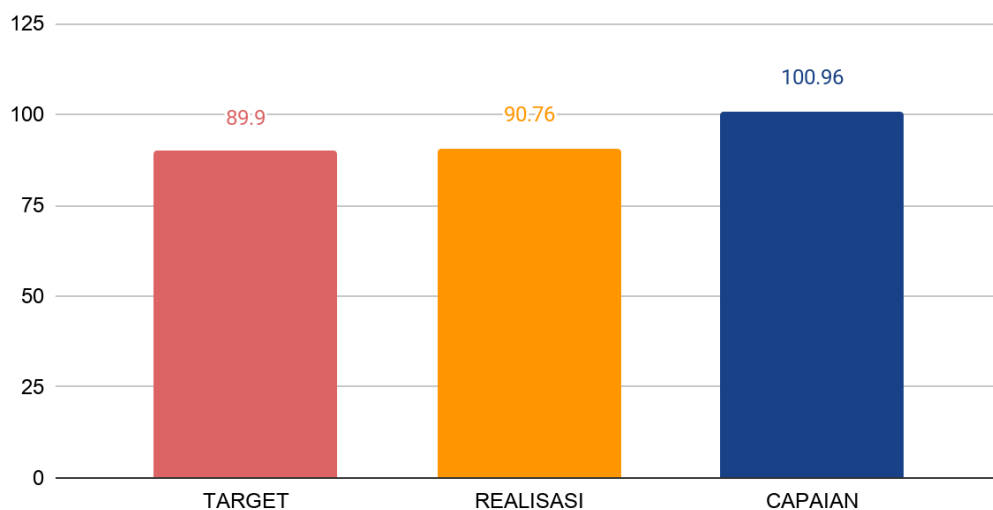
TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	90.76	100.96%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 89.90%. Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung sebesar 90.76%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,96% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.13
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 89.90%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 100.96% dengan kategori Tercapai/Melampaui.

TABEL 3.1.49
PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN
TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN
OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI
	89.90%	90.76%	100.96%	Tercapai/Melampaui

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	90.76	100,96%	Tercapai/ Melampaui	
---	-------	-------	---------	------------------------	---

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

1. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan bekerja sama dengan Tokoh Masyarakat
2. Melakukan KIE melalui subsite BBOM Bandung dan sosial media melalui infografis dan videografis yang menarik di Instagram secara masif dengan topik yang terjadwal
3. Melakukan KIE melalui Bahan Informasi (Kalender)
4. Melakukan KIE melalui Media Cetak (Leaflet)
5. Melakukan KIE melalui Media Digital (e-kiosk)
6. Melakukan KIE bekerjasama dengan Pramuka, sekolah, kaum inklusi, organisasi kepemudaan lainnya serta masyarakat umum.
7. Membuat link survey yang mudah diakses oleh responden.



Gambar 3.1.11 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 05 Maret 2026



Gambar 3.1.12 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 01 Maret 2026

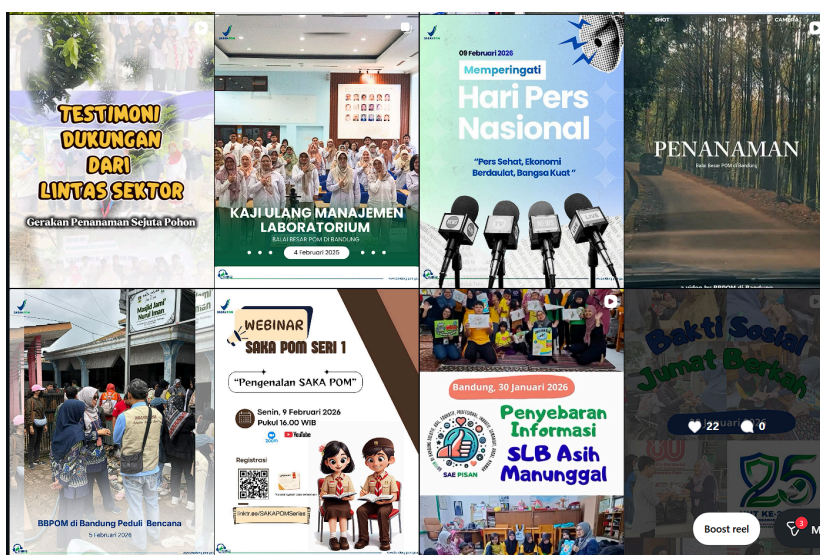


Gambar 3.1.13 Kegiatan KIE bersama Tokoh Masyarakat pada tanggal 27 Februari 2026

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026



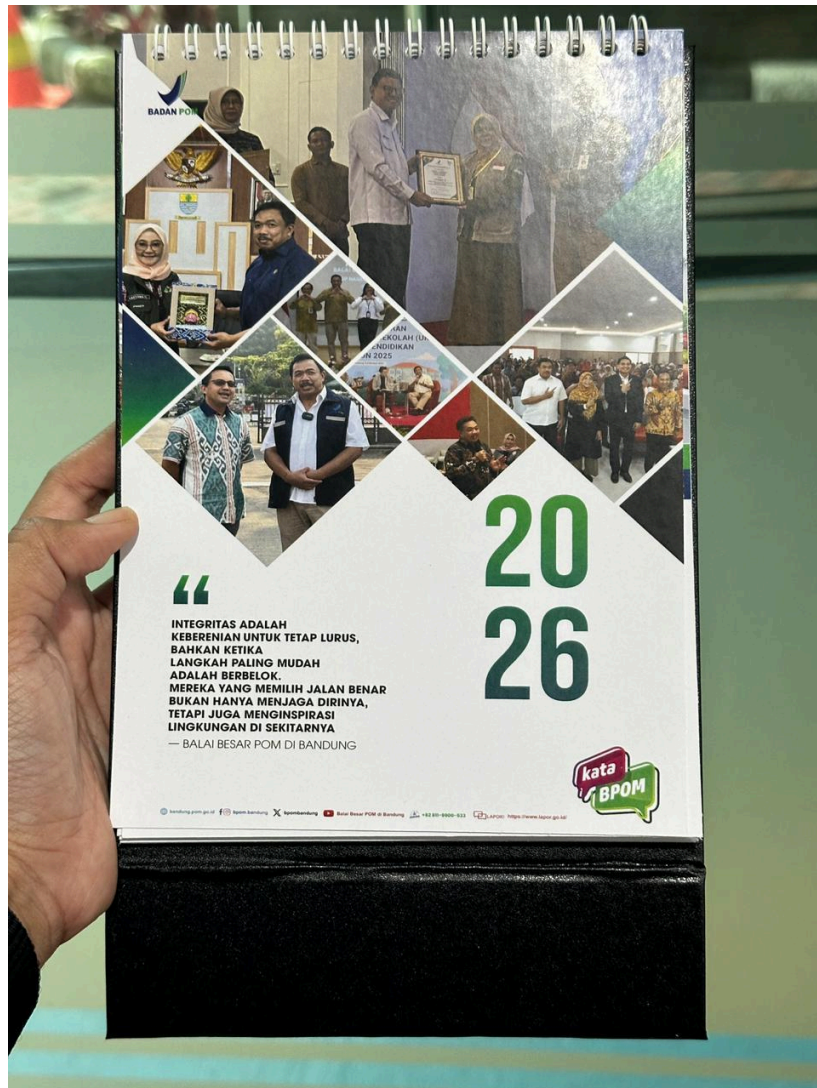
Gambar 3.1.14 KIE melalui Sosial Media bulan Januari 2026



Gambar 3.1.15 KIE melalui Sosial Media bulan Februari 2026



Gambar 3.1.16 KIE melalui Sosial Media bulan Maret 2026

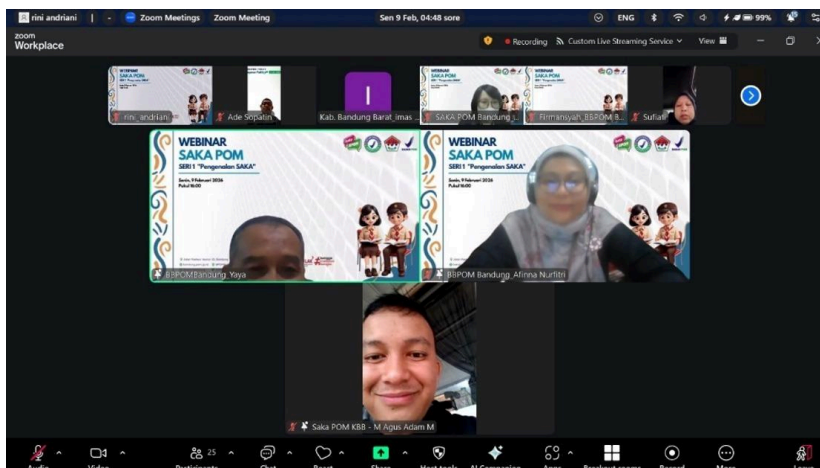


Gambar 3.1.17 KIE melalui Bahan Informasi (Kalender) pada Bulan Februari 2026

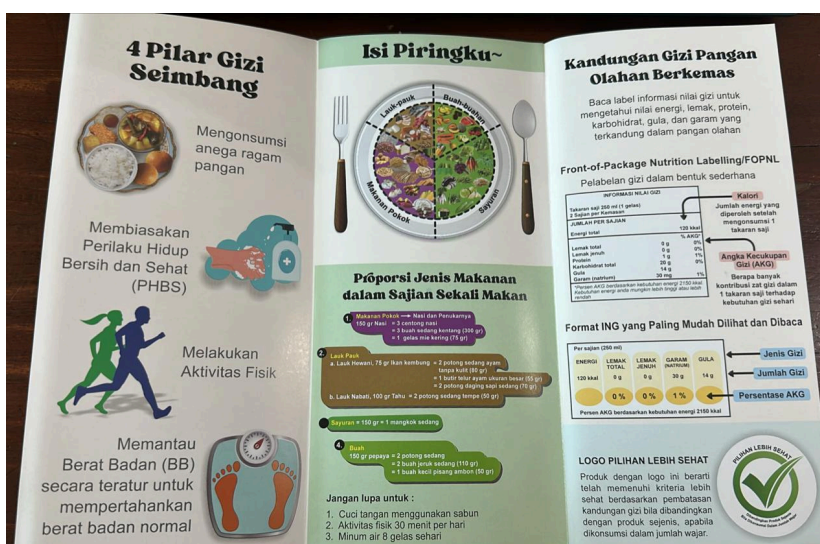


Gambar 3.1.18 Kegiatan Penyebaran Informasi bersama Golongan Inklusi Tuna Grahita Pada tanggal 30 Januari 2026

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026



Gambar 3.1.19 Kegiatan Penyebaran Informasi bersama Pramuka Secara daring tanggal 09 Februari 2026



Gambar 3.1.20 KIE melalui Media Cetak (Leaflet) pada bulan Maret 2026

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026



Gambar 3.1.21 KIE melalui KIE melalui Media Digital (e-kiosk) pada bulan Maret 2026



Gambar 3.1.22 Kegiatan Penyebaran Informasi bersama Pramuka Secara daring tanggal 02 Maret 2026

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

1. Meningkatkan cakupan KIE yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lintas sektor/lembaga lain
2. Melaksanakan KIE melalui webinar tentang Obat dan Makanan kepada pelaku usaha maupun masyarakat luas.
3. Melaksanakan KIE secara merata di seluruh wilayah BBPOM di Bandung secara komprehensif
4. Menjaga konsistensi kegiatan melalui media sosial

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Melakukan survei efektivitas KIE secara periodik kepada responden yang telah menerima KIE
2. Melakukan monitoring terhadap pemenuhan jumlah responden, termasuk proses cleansing data jika terdapat data responden ganda.
3. Memberikan penjelasan terkait pengisian kuesioner efektivitas KIE kepada responden sebelum dilakukan survei efektivitas KIE untuk memastikan pertanyaan pada kuesioner dapat dipahami dengan benar oleh responden
4. Melakukan evaluasi dan analisa terhadap hasil pengukuran masing-masing, untuk dapat mengembangkan strategi KIE yang lebih efektif.
5. Meningkatkan inovasi pengelolaan media sosial termasuk mengenali karakter/algorithm dari setiap platform untuk penyesuaian konten sesuai dengan target pengguna platform.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Pelaksanaan KIE Tematik sebagai pengembangan dari KIE dengan tema umum, akan semakin meningkatkan manfaat KIE

karena tema yang disampaikan akan sesuai dengan kebutuhan peserta/audiens. Pelaksanaan KIE tematik ini dapat dilakukan oleh setiap poksi/fungsi dengan berbagai kombinasi program dan tema yang akan disampaikan

- Pembuatan materi/konten baik di KIE langsung atau media sosial dapat melibatkan unsur-unsur terkait, misalnya penyusunan materi KIE langsung dapat melibatkan melibat personil dengan keahlian dan kompetensi yang sesuai, atau pembuatan konten dalam media sosial melibatkan gen Z untuk meningkatkan keberterimaan informasi di segmen-segmen pengguna medsos.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.50

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

TINGKAT EFEKTIVITAS KIE SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN DI WILAYAH KERJA BBPOM DI BANDUNG

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.96%	60.64%	1.66	0.66	Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung disimpulkan Efisien ($0 < 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

2. JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan program yang didalamnya ada intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan dan gizi kepada komunitas sekolah.

- a. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi dalam rangka pemberdayaan keamanan pangan terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.
- b. Intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor, Sosialisasi Keamanan Pangan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi Sekolah, dan Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi.
- c. Kriteria Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan adalah:
 1. Memiliki SK Tim dan Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 2. Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah
 3. Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi dalam rangka pembudayaan keamanan pangan yaitu memastikan anak usia sekolah khususnya, dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan dan perilaku keamanan pangan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan. BBPOM di Bandung melakukan intervensi di Kabupaten/Kota lain dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dipilih yang belum pernah diintervensi sejak 2024-2025.
2. Apabila Kabupaten/Kota sedikit, maka bisa dilakukan intervensi ulang.

Tahapan kegiatan sebagai berikut:

- a. Sekolah Full Intervensi yang berjumlah 17 sekolah dengan tahapan :

1. Advokasi lintas sektor program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
2. Sosialisasi Keamanan pangan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
3. Bimtek Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah
4. Monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
5. Pengawasan sekolah yang sudah di intervensi Keamanan pangan.

b. Sekolah Perluasan merupakan sekolah yang mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan di luar dari sekolah yang mendapatkan full intervensi. Jumlah sekolah perluasan yang akan mendapatkan sosialisasi Keamanan Pangan yaitu 30 sekolah.

TABEL 3.1.51

TAHAPAN


Tahapan	UPT BPOM yang akan melaksanakan program Tahun 2026	
	Skor	Target Pelaksanaan 2026*
Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	25%	Januari – April (TW 1 – TW 2)
Sosialisasi Keamanan Pangan	20%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	25%	Batch 1: Maret – Mei (TW 1 – TW 2) atau Batch 2: Juli – Sept (TW3)
Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	25%	Juni - Juli (TW 3) atau Nov – Des (TW 4)
Pengawasan	5%	Februari – Desember (TW 2-4)
	100%	

TABEL 3.1.52

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN
KEAMANAN PANGAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

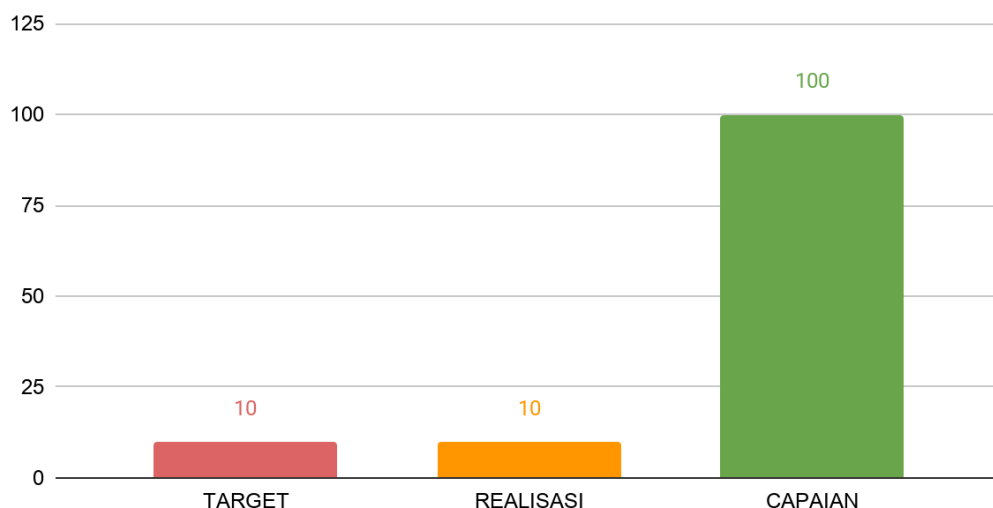
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah sekolah yang melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10.00%	10.00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10.00%. Progress Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sebesar 10.00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.14

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 10.00% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.53

PERBANDINGAN REALISASI TW 1 DENGAN TARGET TAHUNAN SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.00%	10.00%	10.00%	Perlu Upaya Keras	

C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

Pedoman Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan berubah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Pembuatan perencanaan sesuai dengan pedoman terbaru.
- Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian dengan Pedoman Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

Pada TW I, kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah rapat pembahasan perencanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun anggaran 2026. Pada rapat dibahas tentang:

1. Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 yang meliputi advokasi, sosialisasi, bimbingan Teknis Kader Keamanan Pangan Sekolah, Monitoring dan Sertifikasi dan Pengawasan Sekolah yang diintervensi tahun 2025
2. Penentuan persentase target setiap bulan
3. Penentuan kabupaten/kota yang akan diintervensi tahun 2026



Gambar. 3.1.23 Rapat Pembahasan Perencanaan Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Hasil rapat pembahasan perencanaan dijadikan acuan pelaksanaan Program PPABK BBPOM di Bandung tahun 2026. Kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi fokus (lokus) Program Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan tahun 2026 adalah Kabupaten Bandung.

Setelah menetapkan lokus kabupaten/kota BBPOM di Bandung merencanakan kegiatan Advokasi dengan Pemerintah Kab. Bandung. Kegiatan perencanaan advokasi meliputi, surat menyurat dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Bandung.

D. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.54

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

JUMLAH SEKOLAH YANG MELAKSANAKAN PEMBUDAYAAN KEAMANAN PANGAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	100.00%	0%	-	-	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan disimpulkan Tidak Efisien ($>1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

3. JUMLAH DESA PANGAN AMAN

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Monitoring dan Evaluasi.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

- a. kader keamanan pangan desa yang aktif
- b. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa
- c. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain)

Dihitung berdasarkan jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin d.

Realisasi bulanan akan dihitung berdasarkan progress tahapan berikut. Jika terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan di dalam tahapan, waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program, maka seluruh tahapan waktu pelaksanaan dan pembobotan program-program akan mengacu pada Surat Pemberitahuan dari unit pengampu.

TABEL 3.1.55

TAHAPAN PROGRAM DESA PANGAN AMAN


No.	Kegiatan	Skor	Target Pelaksanaan
1.	Advokasi	25%	Februari – April
2.	Pelatihan kader	25%	Maret-Mei atau Juli-Agustus
3.	Bimtek komunitas	20%	Mei – Juni atau September -Oktober
4.	Monev	20%	Juni-Juli atau Oktober-November
5.	Pengawasan	10%	Februari - November
	Total Skor	100%	

TABEL 3.1.56

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH DESA PANGAN AMAN

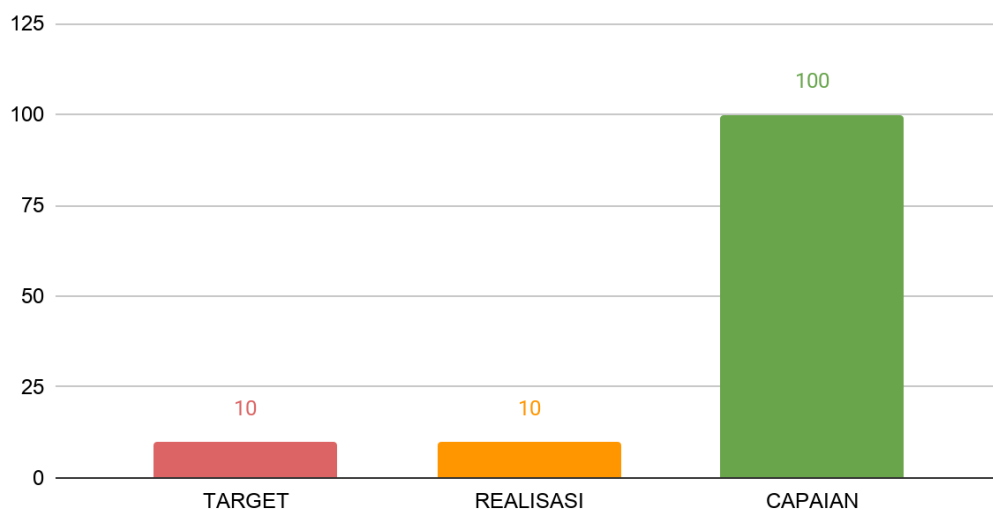
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah Desa Pangan Aman	10.00%	10.00%	100.00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10.00%. Progres Jumlah Desa Pangan Aman sebesar 10.00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.15
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 10,00% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.57

PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
JUMLAH DESA PANGAN AMAN
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI
Jumlah Desa Pangan Aman	100.00%	10.00%	10.00%	Perlu Upaya Keras

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 sebesar 100% disebabkan antara lain :

- a. Triwulan I dengan periode bulan Januari-Maret 2026 dilakukan dengan menyusun perencanaan tahunan program desa pangan aman dengan target 10%. Kegiatan yang dilakukan disusun menjadi rencana triwulan dan bulanan sehingga capaian realisasi 100% dari target.



Gambar 3.1.24 Rapat Koordinasi Perencanaan Tahunan Gernas SAPA 2026

- b. Pelaksanaan Desa Pangan Aman dilaksanakan sesuai dengan juknis dan timeline yang telah ditetapkan oleh Direktorat PMPU PO.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut pada periode berikutnya antara lain:

- a. Peningkatan koordinasi dengan Pemda setempat dan OPD terkait agar semua rangkaian kegiatan berjalan lancar dan tepat waktu.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja
Kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja yaitu penyelesaian penyusunan rencana program desa pangan aman yang diselesaikan sesuai waktu yang ditetapkan.

E. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.58

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

JUMLAH DESA PANGAN AMAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
-----------	-----------------	---------------------	----	----	----------

Jumlah Desa Pangan Aman	100.00%	0.00%	-	-	Tidak Efisien
-------------------------	---------	-------	---	---	---------------

Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah Desa Pangan Aman disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran sebanding dengan capaian kinerja.

4. JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD atau melalui mekanisme lainnya, sebagai tempat pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan acuan yang meliputi advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan dapat berupa advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek dan penyuluhan komunitas pasar, Sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas pasar, pengawasan keamanan pangan dan monitoring evaluasi pengawalan terhadap pasar yang diintervensi Tahun sebelumnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pengelola pasar, anggota asosiasi pasar, pedagang pasar, pengunjung pasar dan/atau pihak lainnya yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar), pemberdayaan komunitas pasar, rencana program pengawalan pada Tahun berikutnya dan/atau bentuk kegiatan lainnya. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi supply dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik oleh pedagang pasar.

Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi atau disesuaikan dengan kondisi pada wilayah dengan jumlah pasar terbatas, termasuk pasar di daerah destinasi wisata

Dihitung dari jumlah jumlah pasar yang mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.

Realisasi bulanan dihitung berdasarkan progress tahapan:

TABEL 3.1.59

TAHAPAN PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS


No	Tahapan	Skor	Jadwal
1	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	25%	Januari - April
2	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	25%	Maret - Juni
3	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	20%	Maret - Juni
4	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	20%	Mei- Juli
5	Pengawasan	10%	Februari - Juli
	Total Skor	100%	

TABEL 3.1.60

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS

TRIWULAN I TAHUN 2026

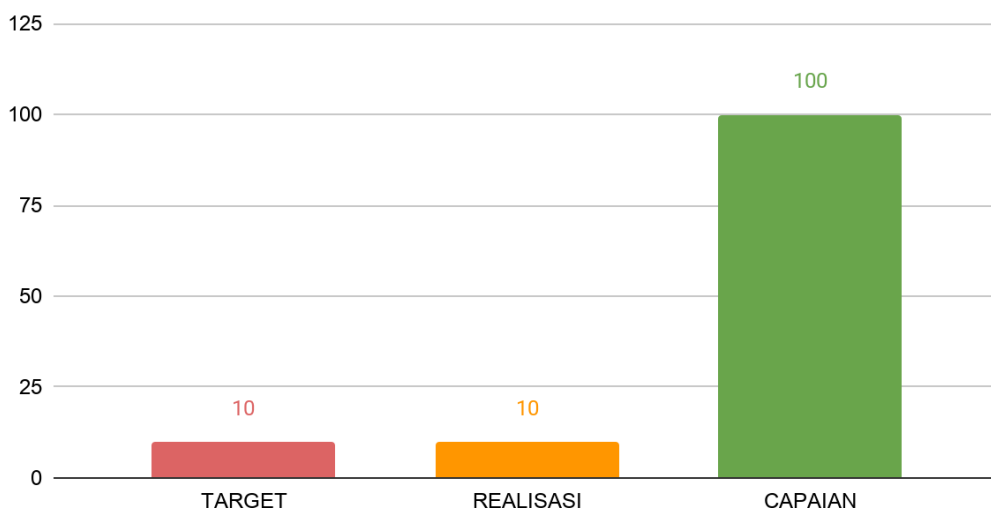
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00%	10.00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 10.00%. Pada Triwulan I 2026, Jumlah

pasar pangan aman berbasis komunitas sebesar 10.00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100.00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.16
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja



B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100.00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 10.00% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.61
PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	10.00%	10.00%	Perlu Upaya Keras	▼

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas berubah-ubah, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- c. Pembuatan perencanaan sesuai dengan pedoman terbaru.
- d. Monitoring dan evaluasi terhadap kesesuaian dengan Pedoman Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

Pada TW I, kegiatan yang dilakukan pertama kali adalah rapat pembahasan perencanaan Program PPABK tahun anggaran 2026.

Pada rapat dibahas tentang:

4. Pembahasan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Program PPABK tahun 2026 yang meliputi advokasi, Bimbingan Teknis Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan, Pengawasan Keamanan Pangan, dan Pengawasan Pasar yang diintervensi tahun 2025
5. Penentuan persentase target setiap bulan
6. Penentuan kabupaten/kota yang akan diintervensi tahun 2026



Gambar. 3.1.25 Rapat Pembahasan Perencanaan Program Gerakan Masyarakat Sehat Sadar Pangan Aman

Hasil rapat pembahasan perencanaan dijadikan acuan pelaksanaan Program PPABK BBPOM di Bandung tahun 2026. Kabupaten/kota yang akan menjadi lokasi fokus (lokus) Program PPABK tahun 2026 adalah Kabupaten Bandung.

Setelah menetapkan lokus kabupaten/kota BBPOM di Bandung merencanakan kegiatan Advokasi dengan Pemerintah Kab. Bandung. Kegiatan perencanaan advokasi meliputi, surat menyurat dan koordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten Bandung.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- a. Berdasarkan informasi kinerja yang didapatkan digunakan sebagai dasar untuk membuat perencanaan pada TW IV
- b. Pedoman Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas yang baru dapat menumbuhkan inovasi sosialisasi keamanan pangan dalam bentuk video "Kabayan Ngelmu" yang dapat diakses secara *online* di 1POMJabar.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.62

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
JUMLAH PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00%	0.00%	-	-	Tidak Efisien



Berdasarkan tabel diatas, indikator Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

**SASARAN MENINGKATNYA PENDAMPINGAN UMKM DALAM
KEGIATAN KE-4 PEMENUHAN STANDAR KEAMANAN DAN MUTU**

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 35.23% dengan kriteria **KURANG**. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.63.

TABEL 3.1.63

**CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-4
TRIWULAN I TAHUN 2026**

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	40.00%	14.09%	35.23%	Kurang	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			35.23%	Kurang	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik diukur dengan membandingkan jumlah UMKM yang memenuhi standar dengan jumlah UMKM yang sedang didampingi pada Tahun berjalan. UMKM yang didampingi mencakup UMKM pangan olahan, kosmetik dan obat tradisional. Adapun ruang lingkup UMKM-nya adalah sebagai berikut :

- a) UMKM pangan mencakup skala usaha mikro dan kecil yang belum memiliki izin edar atau PIRT yang akan naik kelas ke MD;
- b) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - UMKM yang memproduksi Obat Tradisional,
 - UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum Tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (start-up),
 - UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap,
 - UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor;

UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) dan yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

A. Ruang Lingkup UMKM:

1. UMK pada pangan olahan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:
 - a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; dan
 - b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Ruang Lingkup UMKM OBA dan Kosmetik:
 - a. UMKM pada OBA mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - b. UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.

- B. UMKM yang memenuhi standar adalah:
1. UMK yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi adalah UMK Pangan Olahan yang mampu menerapkan prinsip CPPOB ditandai dengan diterbitkannya IP CPPOB skala UMK;
 2. UMKM OBA yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan Obat Bahan Alam yang baik ditandai dengan diterbitkannya Rekomendasi Sertifikat CPOTB secara Bertahap (tahap 1 atau tahap 1 ke tahap 2 atau tahap 2 ke tahap 3);
 3. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan :
 - a) Penerbitan Rekomendasi Sertifikat Pemenuhan Aspek (SPA) CPKB
 - b) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik
- C. Kriteria UMKM yang didampingi:
1. Untuk UMK Pangan Olahan :
 - a. UMK yang didampingi mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan Olahan.
 - a. UMK dihitung berdasarkan UMK yang difasilitasi BPOM melalui UPT BPOM selama Tahun berjalan.

Sebagai informasi, tahapan Pendampingan UMK Pangan Olahan yang dilakukan di UPT meliputi : Penetapan target UMK Pangan Olahan, Bimtek CPPOB, Fasilitasi Pendampingan UMK Pangan Olahan, penerbitan IP CPPOB, serta Monev dan pelaporan.
 2. Untuk UMKM OBA:
 - a. Usaha yang sudah mempunyai produk obat bahan alam dan/atau obat kuasi namun belum memiliki izin edar;
 - b. *Start-up* yang akan memproduksi obat bahan alam dan/atau obat kuasi, khususnya *start-up* yang telah mendapatkan pendampingan dari program Dana Alokasi Khusus (DAK);
 - c. UMKM yang sudah mempunyai nomor izin edar PIRT dan harus beralih ke obat bahan alam;
 - d. UMKM Obat Bahan Alam yang sudah didampingi namun belum

- memiliki Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- e. UMKM Obat Bahan Alam yang akan melakukan Sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap ke tahap selanjutnya (Tahap 2 dan/ atau Tahap 3); dan
 - f. UMKM Obat Bahan Alam yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan Start-up / UMKM Obat Bahan Alam yang akan didampingi memiliki kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 21022 dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) setempat dan akan mengajukan sertifikasi Pemenuhan Aspek CPOTB secara Bertahap;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan digunakan sebagai fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap.

3. Untuk UMKM Kosmetik:

- a. UMKM yang memproduksi kosmetik;
- b. UMKM kosmetik yang masih merintis dalam pemenuhan aspek CPKB (*start-up*);
- c. UMKM kosmetik yang sudah didampingi namun belum memiliki SPA CPKB/ Sertifikat CPKB; dan
- d. UMKM kosmetik yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.

Prioritas pemilihan UMKM kosmetik yang akan didampingi pada Tahun berjalan, dengan salah satu kriteria sebagai berikut :

- Telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan nomor KBLI 20232 dari PTSP setempat dan akan mengajukan sertifikasi CPKB;
- Telah memiliki rencana lokasi sarana produksi yang akan dijadikan fasilitas produksi; dan
- Memiliki komitmen yang tinggi dalam pemenuhan aspek CPKB.

D. Tahapan Pendampingan UMKM

1. Pangan Olahan

TABEL 3.1.64

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM PANGAN OLAHAN

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Pengumpulan Data UMK Pangan Olahan	Januari - Maret	5	Data UMK Pangan Olahan
2	Seleksi dan Penetapan UMK pangan olahan target	Januari - Maret	10	Penetapan dalam bentuk SK Kepala UPT BPOM
3	Pelaksanaan Bimtek CPPOB	Februari - Juni	30	Pelaksanaan Bimtek CPPOB sesuai dengan metode dan kurikulum yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
4	Pelaksanaan Pendampingan UMK Pangan Olahan	Februari - Desember	50	Pelaksanaan Fasilitasi Pendampingan Penerapan CPPOB sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman/ Juklak Pendampingan
5	Pelaporan	Februari - Desember	5	Monev dilaksanakan per TW, dan Monev dilakukan bulan Januari- Desember Pelaporan bentuk softfile ke Dit PMPU PO cc Deputi III

2. Obat Bahan Alam

TABEL 3.1.65

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM OBAT BAHAN ALAM

No	Tahapan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1.	Penetapan target UMKM obat tradisional	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan ke Dit. PMPU OT, SK Kos
2.	Bimbingan teknis UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan

3.	Pendampingan UMKM Obat Bahan Alam oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4.	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan sertifikasi, pendampingan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB secara Bertahap
5.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Sept - Des	10	

3. Kosmetik

TABEL 3.1.66

TAHAPAN PENDAMPINGAN UMKM KOSMETIK

No	Rincian Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Bobot (%)	Keterangan
1	Penetapan target UMKM Kosmetik	Jan - Feb	10	Setiap UPT melaporkan kepada Dit. PMPU OTSKK
2	Bimbingan teknis UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	Maret - April	20	Pelaksanaan bimbingan teknis disesuaikan dengan kebutuhan
3	Pendampingan UMKM Kosmetik oleh Fasilitator	April - Okt	40	Pelaksanaan pendampingan disesuaikan dengan kebutuhan
4	Sertifikasi	Sept - Des	20	Pelaksanaan dilakukan mulai dari pengajuan persetujuan denah bangunan, sertifikasi SPA CPKB, pendampingan dan penyusunan CAPA sampai dengan penerbitan rekomendasi pemenuhan aspek CPKB
5	Monev dan Pelaporan	Sept - Des	10	

Sesuai dengan nota dinas Sekretaris Utama nomor: PR.08.02.21.09.25.308 tanggal 30 September 2026, Perhitungan Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB harus menyesuaikan dengan perhitungan manual IKU baru, yaitu sebagai berikut :

Perhitungan target B1 - B11:

Persentase UMKM yang didampingi = A / B


- A. Jumlah progress tahapan pendampingan UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik
- B. Jumlah Target UMK Pangan Olahan, UMKM OBA, dan UMKM Kosmetik yang didampingi di Tahun berjalan

TABEL 3.1.67

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

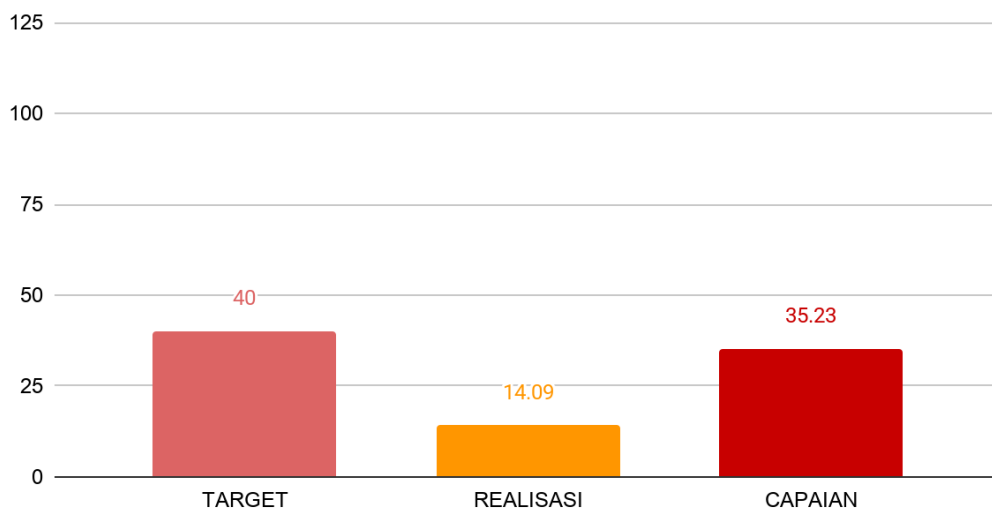
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	40.00%	14.09%	35.23%	Kurang	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 40.00%. Persentase UMKM yang

didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan sebesar 14.09%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 35.23% dengan kriteria Kurang.

Grafik 3.1.17
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 100% untuk tahapan pendampingan yang dilaksanakan. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 14.09% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.68

PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	100,00%	14.09%	14.09%	Perlu Upaya Keras	
---	---------	--------	--------	-------------------	---

C. Analisis Penyebab Kegagalan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kegagalan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Kegiatan Bimtek UMKM OBA, Kosmetika dan Pangan Olahan belum dilaksanakan tidak sesuai dari target waktu yang telah dijadwalkan

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Melaksanakan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan
- Revisi target RAPK UMKM

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

Tahapan Seleksi Target Pendampingan UMKM

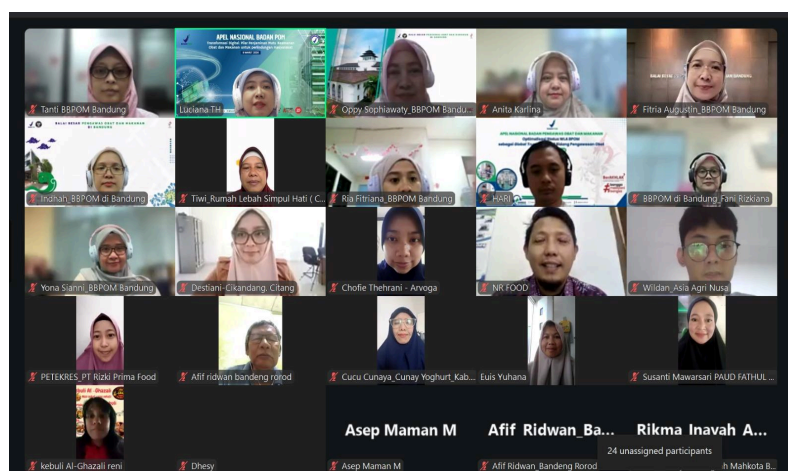
Untuk menetapkan UMKM yang akan dijadikan target dalam program pendampingan UMKM Tahun 2026 dilakukan tahapan seleksi UMKM. Pada tahapan ini BBPOM Di Bandung membuka pendaftaran yang disosialisasikan secara terbuka melalui medsos BBPOM Di Bandung,



Gambar 3.1.26 Informasi pendaftaran pendampingan UMKM

Selain itu BBPOM Di Bandung juga berkolaborasi dengan instansi atau stake holder terkait dimana pada tahapan ini memberikan usulan UMKM yang dapat dicalonkan menjadi target pendampingan.

Dari UMKM yang mendaftar secara langsung dan UMKM yang diusulkan oleh stake holder tersebut, dilakukan pemilihan target berdasarkan kelengkapan dokumen yang disampaikan oleh masing-masing UMKM. Untuk UMKM yang lolos tahapan evaluasi dokumen selanjutnya dilaksanakan tahapan seleksi yang dilakukan melalui wawancara terhadap UMK secara daring (aplikasi zoom).



Gambar 3.1.27 Wawancara terhadap UMKM yang lolos seleksi

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, BBPOM Di Bandung memiliki inovasi PRABU UMKM JUARA (Pendampingan Pelaku Usaha agar Berdaya Unggul untuk UMKM Juara yang merupakan inovasi dalam rangka pelaksanaan program pendampingan UMKM. Dalam pelaksanaannya Prabu UMKM Juara berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat diantaranya adalah dengan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Barat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.69

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

PERSENTASE UMKM YANG DIDAMPINGI DAN MEMPEROLEH REKOMENDASI SERTIFIKAT CARA PEMBUATAN OBA, KOS YANG BAIK DAN/ATAU IP CPPOB PANGAN OLAHAN

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	35.23%	0.00%	-	-	Tidak Efisien



Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN TERLAKSANANYA PENINDAKAN KEJAHATAN SEDIAAN
KEGIATAN KE-5 FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF DI
WILAYAH KERJA UPT

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 101.63% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.70.

TABEL 3.1.70

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-5
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	41.00%	41.67%	101.63%	Sangat Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			101.63%	Sangat Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Capaian dihitung dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara dan pencapaian target perkara dalam proses penyidikan, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut:

- 1) SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) sebesar 15%;
- 2) Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

(JPU)) sebesar 40%;

- 3) P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum) sebesar 30%; dan
- 4) Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum) sebesar 15%.

Setelah itu, dilakukan pembobotan terhadap 4 (empat) tahapan penyelesaian berkas perkara sebagai berikut:

= ((Jumlah perkara SPDP x 0.15 + Jumlah perkara Tahap I x 0.55 + Jumlah perkara P21 x 0.85 + Jumlah perkara Tahap II x 1) / Jumlah target perkara) x 100%.


Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3. Apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai oleh perkara SP3 tersebut. Perkara carryover yang dihitung menjadi capaian perkara merupakan seluruh perkara yang belum tahap 2 sampai dengan Tahun N-1. Perkara carry over dikecualikan apabila telah ditetapkan DPO atau dalam proses penetapan DPO atau sudah ditetapkan SP3.

Perkara dengan tersangka yang sudah di tetapkan DPO, tetap dilaporkan dalam laporan kemajuan penyidikan yang dilaporkan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan.

TABEL 3.1.71

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

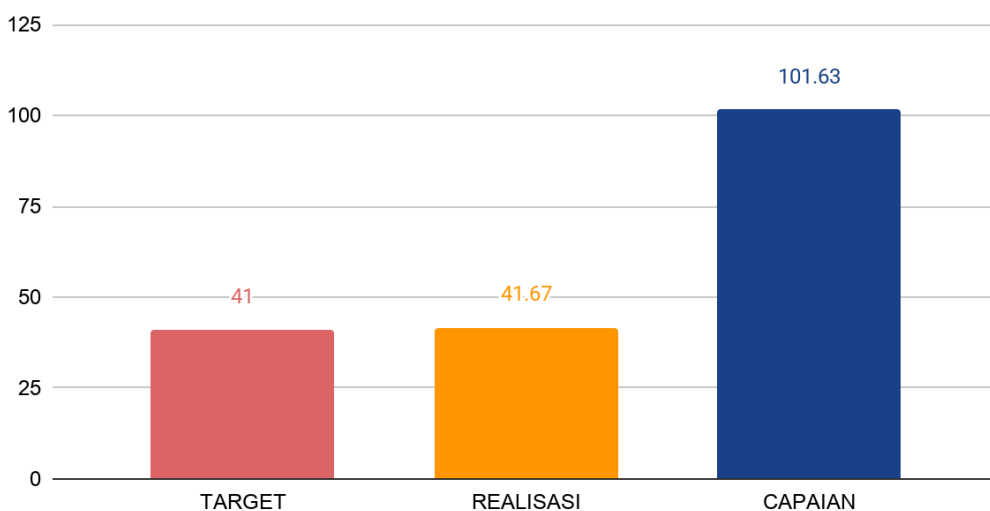
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	41.,00%	41.67%	101.63%	Sangat Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 41.00%. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung sebesar 41.67%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 101.63% dengan kriteria Sangat Baik.

Grafik 3.1.18
Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 84.00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 49.61% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.72
PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	84.00%	41.67%	49.61%	Perlu Upaya Keras	
---	--------	--------	--------	-------------------	---

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Koordinasi dan komunikasi yang telah terjalin baik dengan ICJS yaitu Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Korwas PPNS Polda Jawa Barat sehingga penyelesaian berkas perkara dapat dilaksanakan dengan baik dalam waktu se-optimal mungkin. Pada Triwulan I Tahun 2026, koordinasi yang baik tersebut menghasilkan terlaksananya Tahap II atas 2 (dua) perkara carry over yaitu perkara tahun 2025.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke Poksi Penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut.
- Membangun jejaring informasi secara berkelanjutan tentang kasus tindak pidana bidang obat dan makanan yang terjadi di wilayah *catchment area* BBPOM di Bandung.
- Melakukan koordinasi dengan lintas sektor ICJS terkait diberlakukannya UU No. 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) per tanggal 02 Januari 2026. Pemberlakuan UU ini masih menunggu penerbitan peraturan juknis/juklak dalam penerapannya terutama dalam beberapa hal yang berubah dari ketentuan sebelumnya terkait pelaksanaan penyidikan oleh PPNS. Sejak pemberlakuan UU ini,

PPNS BBPOM di Bandung secara proaktif telah melaksanakan mengikuti berbagai kegiatan yang bersifat sosialisasi/ BIMTEK/seminar/ sejenisnya yang berkaitan dengan pemberlakuan KUHAP baru, baik yang diselenggarakan oleh lintas sektor (Kejaksaan Agung, Polda Metro Jaya, Polda Jawa Barat, dll) maupun yang diselenggarakan internal Badan POM RI. Diharapkan melalui kegiatan yang telah diikuti, terdapat kesamaan pemahaman dan persepsi dalam lingkup CJS untuk menghindari timbulnya potensi hambatan dalam penanganan perkara BBPOM di Bandung.

- Memelihara koordinasi berkelanjutan dengan pejabat di Direktorat Kriminal Khusus Polda Jabar dan Metro Jaya khususnya dalam proses pelaksanaan bantuan teknis dan taktis sehingga dapat menunjang kegiatan operasi penindakan dan sepanjang proses penyidikan.
- Meningkatkan koordinasi dengan Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk setiap berkas perkara yang sedang ditangani agar penyelesaian berkas dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

- Penyidikan Obat dan Makanan
Perkara yang dihitung adalah perkara yang telah diterbitkan SPDP-nya kepada Kejaksaan melalui Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Pada TRIWULAN I Tahun 2026, jumlah perkara di bidang Obat dan Makanan yang ditangani sebanyak 7 (tujuh) perkara carry over. PPNS BBPOM di Bandung tidak melakukan operasi penindakan selama Triwulan I mengingat pemberlakuan KUHAP baru yang dalam beberapa aspek berubah dari tata cara pelaksanaan penyidikan sebelumnya. Selama Triwulan I, PPNS BBPOM di Bandung fokus untuk meningkatkan kompetensi dan menyamakan persepsi dengan lintas sektor terkait penerapan KUHAP baru.
Perkara Tahun 2026 yang sedang ditangani merupakan tindak lanjut dari operasi penindakan yang dilakukan pada tahun-tahun

sebelumnya dimana terdapat 7 perkara dimana seluruhnya berstatus P21. Atas intensifikasi yang dilakukan PPNS, maka pada TRIWULAN I Tahun 2026 terhadap 2 (dua) perkara dapat diselesaikan hingga tahap 2. Adapun 5 (lima) perkara carry over yang tersisa sedang diusahakan penyelesaiannya hingga Tahap II melalui intensifikasi dan koordinasi terhadap lintas sektor terkait.

- Investigasi Awal
Kegiatan investigasi awal adalah kegiatan untuk memastikan adanya dugaan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dari informasi dari masyarakat, temuan hasil dari Kelompok Substansi Pemeriksaan baik dalam rangka pemeriksaan rutin maupun dalam rangka sertifikasi, pengaduan masyarakat melalui Kelompok Substansi Informasi dan Komunikasi, berdasarkan surat dan/atau informasi dari Badan POM RI, pengembangan kasus yang ditangani, serta penelusuran melalui media online (patroli siber). Selama TRIWULAN I Tahun 2026, dilakukan kegiatan investigasi awal sebanyak 30 kali terhadap 24 sarana dengan hasil sejumlah 5 sarana dinyatakan berpotensi untuk dapat dilakukan penindakan.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

- Memaksimalkan investigasi atau penelusuran kasus yang didasarkan pelaporan dari masyarakat melalui Poksi Infokom dan diteruskan ke Poksi Penindakan sehingga dapat dihasilkan output berupa perkara dari pelaporan tersebut. Pendalaman juga dilakukan terhadap informasi yang berasal dari Direktorat Siber yang merupakan hasil profiling terhadap data patroli siber yang telah dilaporkan.
- Melaksanakan operasi penindakan terhadap sarana yang patut diduga melakukan perbuatan kejahatan obat dan makanan sebagai upaya pemenuhan target kinerja Tahun 2026.

- Mengupayakan pemenuhan persyaratan administrasi yang diwajibkan bagi petugas PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.73

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEBERHASILAN PENYIDIKAN KEJAHATAN SEDIAAN
FARMASI DAN PANGAN OLAHAN BBPOM DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	101.63%	10.42%	9.75	8.75	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien (>1,00) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN KEGIATAN KE-6 TERLAKSANANYA KEGIATAN PEMANTAUAN SIBER DAN DETEKSI KEJAHATAN DI BIDANG SEDIAAN FARMASI DAN PANGAN OLAHAN YANG EFEKTIF

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU). Dari perhitungan indikator tersebut, diperoleh nilai pencapaian sasaran sebesar 100,00% dengan kriteria BAIK. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.74.

TABEL 3.1.74

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-6
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			100,00%	Baik	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI BANDUNG

Analisis Kejahatan Obat dan Makanan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Analisis Penelusuran Siber adalah Hasil Kegiatan Patroli Siber dan Penjejak Digital (Profiling Siber) yang dilakukan berdasarkan identifikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diperjual-belikan atau didistribusikan secara daring di lingkup wilayah kerja UPT BPOM yang dilaporkan setiap bulan kepada Direktur Siber Obat dan Makanan sesuai dengan

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.02.1.2.02.22.97 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Siber Obat dan Makanan dan Surat Direktur Siber Obat dan Makanan Nomor T-PD.04.01.63.01.24.16 tanggal 15 Januari 2024 perihal Pelaporan Laporan Siber (Patroli Siber dan Profiling) UPT BPOM;

2. Analisis hasil pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan di UPT sesuai dengan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.01.22.12 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Cegah Tangkal Kejahatan Obat dan Makanan yang terdiri dari :
 - a. Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan (1 laporan dilaporkan tiap Tahun).
 - b. Laporan analisis kerawanan kejahatan berbasis kewilayahan (1 laporan dilaporkan tiap Tahun).

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan dihitung berdasarkan rata-rata dari nilai:

- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber (50%)
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan (25%)
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT (25%)

Keterangan:


- a. Persentase Ketepatan Waktu Pelaporan Analisis Penelusuran Siber dihitung dari jumlah laporan analisis penelusuran siber yang dilaporkan tepat waktu dibagi dengan jumlah target laporan analisis penelusuran siber dalam satu Tahun.
- b. Persentase Nilai Kualitas Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan dihitung dari nilai analisis kerawanan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dibagi dengan nilai maksimal penilaian analisis (25).
- c. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Cegah Tangkal oleh UPT dihitung dari jumlah rekomendasi cegah tangkal yang telah ditindaklanjuti UPT dibagi jumlah seluruh rekomendasi cegah tangkal yang disampaikan ke UPT.

TABEL 3.1.75

CAPAIAN KINERJA INDIKATOR

PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI
BANDUNG

TRIWULAN I TAHUN 2026

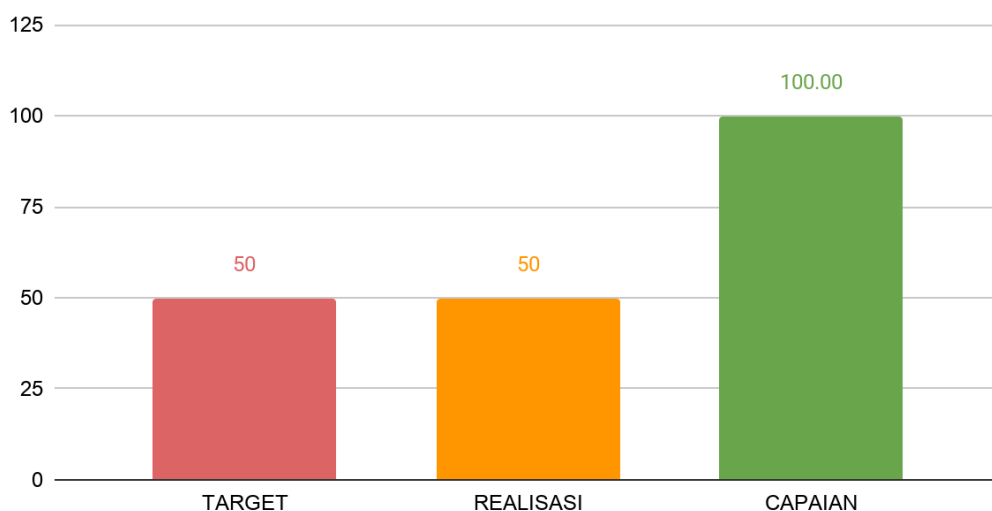
INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50,00%	50,00%	100,00%	Baik	

A. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026

Pada Triwulan I Tahun 2026, target yang ditetapkan pada indikator sasaran ini adalah sebesar 50,00%. Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung sebesar 50,00%. Dengan demikian, nilai pencapaian indikator tersebut adalah sebesar 100,00% dengan kriteria Baik.

Grafik 3.1.19

Perbandingan Target dengan Realisasi Capaian Kinerja




B. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan I Tahun 2026 dengan Target Tahun 2026

Target Tahun 2026 yang ditetapkan pada indikator sasaran strategis adalah sebesar 91,00%. Jika realisasi kinerja pada Triwulan I dihitung terhadap target tersebut, maka capaian kinerja pada Triwulan I sebesar 54.94% dengan kategori Perlu Upaya Keras.

TABEL 3.1.76

PERBANDINGAN REALISASI TW 3 DENGAN TARGET TAHUNAN
PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI
BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TAHUN 2026	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KATEGORI	
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	90,00%	50,00%	54.94%	Perlu Upaya Keras	

C. Analisis Penyebab Keberhasilan Pencapaian Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja sasaran kegiatan tersebut pada TRIWULAN I Tahun 2026 disebabkan antara lain :

- Pelaksanaan patroli siber menggunakan aplikasi *inawebcrawler* yang memudahkan petugas dalam input dan olah data. Dalam aplikasi tersebut tersedia menu pengaturan yang memungkinkan *cut-off* data dilakukan secara otomatis pada waktu yang telah diaturkan. Hal ini menyebabkan pelaporan patroli siber dapat dilaksanakan tepat waktu.
- Manajemen personil juga memberikan kontribusi penting dalam keberhasilan capaian kinerja ini. Kepatuhan seluruh personil untuk

input data sebelum masa cut-off sehingga ketika cut-off dilakukan, jumlah data yang ter-input sudah mencukupi. Penanggung jawab kegiatan selalu memberikan peringatan kepada personil untuk melakukan entry data dan memastikan kecukupan data yang di-input ketika melakukan cut-off.

- Kegiatan penyusunan Analisis Kerawanan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Kewilayahan telah direncanakan akan diselesaikan pada TW IV Tahun 2026. Telah ditetapkan target Tahun 2026 UPT sebanyak 1 analisis yang kemudian akan diberikan penilaian oleh Kepala UPT.
- Kegiatan pelaporan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal juga telah ditetapkan sebanyak 1 laporan tiap Tahun. Direncanakan pelaporan akan dilaksanakan di TW IV Tahun 2026. Saat ini analisis/ *policy brief* tahun 2026 belum diterbitkan oleh Direktorat Cegah Tangkal sehingga belum ada rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Adapun rekomendasi analisis kejahatan dari tahun-tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti seluruhnya.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran tersebut antara lain:

- Memelihara dan meningkatkan kepatuhan personil dalam melakukan patroli siber dan input data melalui aplikasi yang ditentukan.
- Melakukan inventarisasi rekomendasi analisis/*policy brief* Dit. Cegah Tangkal yang ditujukan kepada UPT dan memantau pelaksanaan rekomendasi terutama yang melibatkan poksi lain.
- Melakukan koordinasi dengan poksi-poksi UPT dalam pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi agar sesuai dengan yang diharapkan.

D. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Berikut adalah kegiatan yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian kinerja:

1. Penelusuran Siber

Penelusuran siber dilakukan melalui 2 (dua) kegiatan yakni Kegiatan Patroli Siber dan Penjejukan Digital (Profiling Siber).

Patroli siber dilakukan dengan cara melakukan penelusuran terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan yang dilakukan secara daring terutama terhadap komoditi yang diduga illegal, seperti : TIE, BKO, Iklan TMS, dll. Perkembangan pemasaran produk melalui media daring seperti media social, platform e-commerce, dan website yang semakin meningkat merupakan potensi besar terjadinya pelanggaran. Patroli siber dilakukan dengan mengumpulkan data terkait peredaran produk meliputi data produk (identitas, dugaan pelanggaran, jumlah terjual, jumlah stok, dan harga jual), data penjual (nama penjual, platform yang digunakan, lokasi penjual) dan alamat atau link penjualan beserta *capture* laman penjualan. Seluruh data tersebut umumnya tersedia di platform yang digunakan dan tidak membutuhkan keahlian atau peralatan khusus dalam pengumpulannya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dimana dan kapan saja serta oleh siapa saja. Pada pelaksanaannya, secara internal Poksi Penindakan menetapkan target minimal 50 (limapuluh) link penjualan untuk dilaporkan tiap bulan. Pada TRIWULAN I Tahun 2026 ditemukan 166 *link* penjualan online yang terindikasi melakukan pelanggaran. Terhadap seluruh *link* tersebut direkomendasikan untuk dilakukan *takedown*.

Berikut rekapitulasi hasil patroli siber yang dilakukan selama TW I Tahun 2026 :

TABEL 3.1.77

REKAPITULASI HASIL PATROLI SIBER

Berdasarkan Komoditi	
Komoditi	Jumlah
Obat	4
Obat Bahan Alam	797
Kosmetik	316
Suplemen Kesehatan	14
Pangan	142
Jumlah	1279

Berdasarkan Wilayah	
Kota/Kab	Jumlah
Kota Bandung	240
Kab. Bandung	135
Kab. Bandung Barat	21
Kota Cimahi	39
Kota Bekasi	121
Kab. Bekasi	556
Kab. Cianjur	10
Kota Cirebon	1

Kab. Cirebon	60
Kab. Garut	13
Kab. Indramayu	15
Kab. Karawang	14
Kab. Kuningan	1
Kab. Majalengka	4
Kab. Purwakarta	14
Kab. Subang	14
Kota Sukabumi	5
Kab. Sukabumi	4
Kab. Sumedang	12
Jumlah	1279

Kemudian terhadap 1 (satu) link dengan penjualan terbesar dilakukan profiling menggunakan aplikasi yang sama dengan yang digunakan dalam pelaporan patrol siber. Hasil patrol siber dan profiling sepenuhnya dikelola dan diolah oleh Direktorat Siber Obat dan Makanan Badan POM RI.

2. Pelaksanaan fungsi cegah tangkal kejahatan Obat dan Makanan
Fungsi cegah tangkal di UPT dilaksanakan melalui penyusunan analisis kerawanan kejahatan dan tindak lanjut rekomendasi cegah tangkal. Penyusunan analisis dilakukan dengan membuat kajian/ analisis terhadap isu-isu kejahatan sesuai dengan wilayah UPT. Termasuk dalam kegiatan ini adalah Pemetaan Kerawanan Kejahatan Obat dan Makanan melalui Aplikasi Dashboard Penindakan (ADP). Data yang di-input ke dalam aplikasi bersumber dari hasil kegiatan intelijen, hasil kegiatan penindakan/ penyidikan, hasil pengujian pihak ketiga di UPT, data permohonan bantuan ahli yang ditujukan kepada UPT dari pihak Kepolisian, pemberitaan media sosial, dll. Berdasarkan hasil monev dari Dit Cegah Tangkal Badan POM RI, pemetaan kerawanan kejahatan yang dilakukan BBPOM di Bandung per 31 Maret 2026 bahwa terdapat 67 data yang di-input ke ADP untuk selanjutnya dilakukan monev oleh Dit. Cegah Tangkal, dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 3.1.78
REKAPITULASI RAWAN KASUS

Berdasarkan Komoditi	
Komoditi	Jumlah
Obat	1
Narkotika	19
OOT	42
Obat Bahan Alam	2
Kosmetik	2
Pangan	1
Jumlah	67

Terkait penyusunan analisis kerawanan kejahatan yang akan dilaksanakan UPT, saat ini Poksi Penindakan sedang menilai isu yang berpotensi diangkat ke dalam analisis.

Terhadap rekomendasi tindak lanjut kerawanan kejahatan, baik yang bersumber dari analisis Dit Cegah Tangkal maupun yang bersumber dari analisis yang disusun oleh BBPOM di Bandung, dilakukan hal-hal berikut:

- Penyebaran informasi rekomendasi kepada poksi-poksi lain yang terkait melalui Ketua Tim kerja.
- Komunikasi intensif dengan para ketua tim kerja terkait mengenai rekomendasi yang diberikan dengan harapan agar ketua tim dapat melakukan sinergi dalam hal pelaksanaan rekomendasi dengan pelaksanaan tugas rutin.
- Secara rutin memantau tindak lanjut/ feedback dari poksi-poksi terkait.
- Penyusunan laporan feedback untuk disampaikan pada TW IV Tahun 2026.

E. Pemanfaatan Informasi Kinerja

Dari informasi kinerja yang didapatkan, setiap fungsi yang terlibat membuat program/kegiatan dalam fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja tersebut, selain itu juga membuat inovasi kegiatan baik internal maupun eksternal, sebagai berikut :

1. Monitoring dan evaluasi dalam upaya mencapai target kinerja dan mengukur performa poksi di BBPOM di Bandung

2. Analisa kebutuhan sumber daya, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mempertahankan/ meningkatkan capaian kinerja. Pada kondisi actual telah dilakukan revisi anggaran ditujukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penggalangan stakeholder dengan tema yang akan ditetapkan kemudian. Kegiatan penggalangan tersebut direncanakan akan terlaksana pada Triwulan IV.
3. Melaksanakan penyusunan analisis kejahatan obat dan makanan pada Triwulan IV sebagai upaya pemenuhan target kinerja Tahun 2026. Penggunaan data silang yang mendukung tercapainya kinerja fungsi lain, misalnya : data penelusuran siber dapat digunakan sebagai *raw data* dalam penyusunan analisis kerawanan kejahatan BBPOM di Bandung.

F. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

TABEL 3.1.78

ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
PERSENTASE KEPATUHAN PENYAMPAIAN LAPORAN ANALISIS
PENJEJAKAN DIGITAL YANG DISELESAIKAN OLEH BBPOM DI
BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	CAPAIAN TW I	CAPAIAN ANGGARAN	IE	TE	KATEGORI
Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	100,00%	13.15%	7.60	6.60	Tidak Efisien

Berdasarkan tabel diatas, indikator Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung disimpulkan Tidak Efisien ($0 < 1,00$) karena capaian realisasi Anggaran tidak sebanding dengan capaian kinerja.

SASARAN
KEGIATAN KE-7 LAYANAN PUBLIK UPT YANG PRIMA

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 1 (satu) indikator yang merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang dihitung pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.79.

TABEL 3.1.79

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-7

TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Indeks Pelayanan Publik UPT	0,00%	0,00%	0,00%	-	
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

INDEKS PELAYANAN PUBLIK UPT

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D melalui pengukuran secara sistematis dengan mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang mengacu Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP). Tim penilai PEKPPP di lingkungan BPOM ditetapkan melalui Keputusan Kepala BPOM, dan dibawah koordinasi Biro Hukum dan Organisasi.

Penilaian dilakukan berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi: Kebijakan Pelayanan (bobot 24%); Profesionalisme SDM (25%); Sarana Prasarana (18%); Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (11%); Konsultasi dan Pengaduan (10%); dan Inovasi (12%).

Terdapat 3 (tiga) jenis kuesioner yang digunakan dalam penilaian

PEKPPP, yaitu Formulir F-01 yaitu penilaian mandiri yang diisi oleh unit penyelenggara pelayanan untuk memperoleh data perspektif; Formulir F-02 yaitu penilaian yang dilakukan oleh tim penilai berdasarkan penyampaian dokumen yang disampaikan dan verifikasi data melalui wawancara untuk memperoleh nilai objektif; Formulir F-03 yang diisi oleh pengguna layanan untuk memperoleh data persepsi.

Penetapan nilai Indeks Pelayanan Publik berdasarkan pembobotan Formulir F02 dan Formulir F03 untuk mendapatkan nilai Indeks Pelayanan Publik, dengan persentase F02 : F03 yaitu 75% : 25%.

Kategori nilai:

TABEL 3.1.80

KATEGORI NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (<i>Dengan Catatan</i>)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (<i>Dengan Catatan</i>)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Di TRIWULAN I kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan layanan sertifikasi, layanan pengujian, dan layanan permintaan informasi dan pengaduan. Selain itu telah dilakukan kegiatan pemenuhan sebagai unit penyelenggara pelayanan publik antara lain adalah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) mandiri, monitoring dan evaluasi petugas pelayanan publik, pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dan kelompok rentan, pengembangan sistem informasi pelayanan publik, dan layanan pengaduan.

SASARAN TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH UNIT
KEGIATAN KE-8 ORGANISASI YANG OPTIMAL

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dari 4 (empat) indikator yang seluruhnya merupakan indikator kinerja utama (IKU) yang diukur pada akhir Tahun. Hasil selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1.81.

TABEL 3.1.81

CAPAIAN KINERJA SASARAN KEGIATAN KE-8
TRIWULAN I TAHUN 2026

INDIKATOR	TARGET TW I	REALISASI TW I	CAPAIAN TW I	KRITERIA	
1. Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
2. Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
3. Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
4. Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	0,00%	0,00%	0,00%	-	-
NILAI PENCAPAIAN SASARAN			0,00%	-	-

Penjelasan mengenai capaian indikator sasaran kegiatan kesatu, sebagai berikut:

1. NILAI PEMBANGUNAN ZI UPT BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Serta Keputusan Kepala Badan POM Nomor 289 Tahun 2024 tentang Pedoman Pembangunan dan Evaluasi Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, bahwa seluruh Unit Kerja diwajibkan melakukan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM merupakan salah satu langkah untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat menyelenggarakan pelayanan publik kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam rangka mewujudkan good governance dan clean government menuju Badan POM yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akuntabilitas kinerja.

Evaluasi Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM bertujuan untuk:

- a. Memastikan bahwa pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah berjalan sesuai yang diharapkan.
- b. Menjadi dasar penetapan dan pengajuan unit WBK/WBBM.

Nilai Pembangunan ZI diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tim Penilai Internal dengan menggunakan lembar kerja evaluasi yang terlebih dahulu dilakukan self-assessment dan reuiu oleh auditor internal serta Tim Penilai Unit Kerja Eselon I

Cara perhitungan terbagi dari 2 (dua komponen) yaitu :

TABEL 3.1.82

KRITERIA PENILAIAN PMPZI

N O	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
1	Manajemen Perubahan	8%
2	Penataan Tatalaksana	7%
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	10%
4	Penguatan Akuntabilitas Kinerja	10%
5	Penguatan Pengawasan	15%
6	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	10%
No	KOMPONEN HASIL	BOBOT
1	Birokrasi yang bersih dan akuntabel	22,5 %

NO	KOMPONEN PENGUNGKIT	BOBOT
2	Pelayanan Publik yang prima	17,5 %

2. NILAI AKIP BALAI BESAR DI BANDUNG

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri PAN&RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Satuan Kerja dan/atau Unit Kerja. Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM.

Penjumlahan 5 (lima) komponen penilaian AKIP, yaitu:

1. Perencanaan Kinerja;
2. Pengukuran Kinerja;
3. Pelaporan Kinerja;
4. Evaluasi Kinerja Internal;
5. Capaian Kinerja.

Bobot masing-masing komponen, sebagai berikut:

TABEL 3.1.83

BOBOT KOMPONEN PENILAIAN AKIP

No	Komponen	Bobot
1	Perencanaan Kinerja	24
2	Pengukuran Kinerja	24
3	Pelaporan Kinerja	12
4	Evaluasi Kinerja Internal	20
5	Capaian Kinerja	20
	Nilai Evaluasi	100

Predikat nilai AKIP terdiri dari:

TABEL 3.1.84

PREDIKAT NILAI AKIP

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
1	AA	>90- 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>good governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh level. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisiensi (<i>Reform</i>).
2	A	>80- 90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa Satuan Kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil.
3	BB	>70- 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi.
4	B	>60- 70	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada Satuan Kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja.
5	CC	>50- 60	Cukup (memadai). Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada Satuan Kerja.
6	C	>30- 50	Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga

No	Predikat	Nilai	Interpretasi
			masih perlu banyak perbaikan mendasar.
7	D	0-30	Sangat Kurang. Sistem dan tatatan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar khususnya dalam implementasi SAKIP.

3. NILAI KINERJA ANGGARAN BALAI BESAR DI BANDUNG

Nilai Kinerja Anggaran adalah penilaian terhadap kinerja anggaran UPT BPOM yang diperoleh dari Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. 8 (Delapan) indikator pembentuk nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:

1. Revisi DIPA (bobot 10%)
2. Deviasi Halaman III DIPA (bobot 15%)
3. Penyerapan Anggaran (bobot 20%)
4. Belanja Kontraktual (bobot 10%)
5. Penyelesaian Tagihan (bobot 10%)
6. Pengelolaan UP dan TUP (bobot 10%)
7. Capaian Output (bobot 25%)
8. Dispensasi SPM (Pengurang nilai IKPA)

Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan penilaian kinerja perencanaan anggaran yang dilakukan dengan mengukur efektifitas penggunaan anggaran dan efisiensi penggunaan anggaran. Indikator pembentuk Nilai EKA adalah:

1. Variabel efektivitas: Capaian RO (bobot 75%)
2. Variabel efisiensi: Penggunaan SBK (bobot 10%) dan Efisiensi SBK (bobot 15%)

Nilai Kinerja Anggaran = (Nilai EKA x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran :

TABEL 3.1.85
KATEGORI KONVERSI NILAI KINERJA ANGGARAN

Nilai	Kategori	Konversi Nilai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

4. INDEKS MANAJEMEN RISIKO BALAI BESAR DI BANDUNG

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

TABEL 3.1.86
KARAKTERISTIK TINGKAT MATURITAS

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
<i>Risk Naive</i>	Manajemen risiko tergantung pada individu perorangan
<i>Risk Aware</i>	Risiko didefinisikan dengan cara yang berbeda dan kedisiplinan dalam proses tidak ketat
<i>Risk Defined</i>	Kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.
<i>Risk Managed</i>	Aktivitas manajemen risiko organisasi terkoordinasi di seluruh area bisnis. Menggunakan perangkat manajemen risiko dan proses yang umum apabila diperlukan, dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, pengukuran dan pelaporan
<i>Risk Enabled</i>	Mendiskusikan risiko bersama dengan perencanaan strategis, alokasi modal, dan dalam pengambilan keputusan sehari-hari. Sistem peringatan dini untuk memberitahukan dewan dan

Kategori Tingkat Maturitas	Karakteristik
	manajemen apabila risiko berada diatas batas yang ditetapkan

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

- Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah satu alat manajemen dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan
- Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko
- Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Utama yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manajemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

TABEL 3.1.87

NILAI MATURITAS MANAJEMEN RISIKO

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
<i>Risk Naive</i>	0-16	1	-
<i>Risk Aware</i>	17-32	2	Peningkatan <i>Risk Naive</i> menuju <i>Risk Aware</i>
<i>Risk Defined</i>	33-48	3	Peningkatan <i>Risk Aware</i> menuju <i>Risk Defined</i>
<i>Risk Managed</i>	49-64	4	Peningkatan <i>Risk Defined</i> menuju <i>Risk Managed</i>
<i>Risk Enabled</i>	65-80	5	Peningkatan <i>Risk Managed</i> menuju <i>Risk Enabled</i>

Cara perhitungan level maturitas :

$$\text{Skor Maturitas} = \text{Skor Total} / 16$$

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan penilaian oleh Inspektorat Utama.

3.3. RENCANA TINDAK LANJUT REKOMENDASI

Berdasarkan data kinerja pada periode sebelumnya, Tindak Lanjut atas rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya pada setiap indikator adalah sebagai berikut :

TABEL 3.3.1

MATRIKS TINDAKLANJUT REKOMENDASI

TAHUN 2025

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	<p>- Aplikasi SIPT belum menampilkan data timeline pengujian (SLA) untuk sampel rutin Sediaan Farmasi, baru diterapkan pada pengujian sampel pihak ketiga, sehingga pemantauan timeline pengujian masing-masing sampel masih dilakukan secara manual.</p> <p>- Beban kerja alat HPLC sangat tinggi terutama untuk pengujian sampel kosmetik dengan penambahan Parameter Uji Kritis (PUK) pada tahun 2026 sesuai dengan Pedoman Sampling 2026 berdampak terhadap pemenuhan timeline pengujian yang dipersyaratkan</p>	<p>- Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi dilakukan secara manual yang dibuat internal</p> <p>- Pengadaan alat HPLC</p>	Desember 2026		<p>- Sistem pemantauan SLA sampel rutin Sediaan Farmasi dilakukan secara manual yang dibuat internal</p> <p>- Pengadaan alat HPLC</p>	Desember 2026	
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	Sarana pelayanan yang ada di wilayah Balai Besar POM Bandung belum memahami KTD dan cara pelaporan KTD ke BPOM	<p>- Pemberian KIE kepada tenaga kesehatan di Saryanfar</p> <p>- monitoring pelaporan KTD</p> <p>- Pendampingan kepada yankes baik secara daring (WAG dan zoom) maupun pendampingan langsung</p>	Desember 2026	Pemberian KIE kepada tenaga kesehatan di Saryanfar	<p>- Monitoring pelaporan KTD</p> <p>- Pendampingan pelaporan KTD kepada yankes baik secara daring (WAG dan Zoom) maupun pendampingan langsung</p>	Desember 2026	
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ketidakterersediaan multishaker untuk pengujian berdampak pada waktu pengujian dikarenakan harus dilakukan secara manual dengan tangan	Pengadaan alat multishaker	Desember 2026		Pengadaan alat multishaker	Desember 2026	
		Pada proses uji PK logam dengan ICPMS/AAS membutuhkan reagen dengan kemurnian tinggi namun dengan anggaran terbatas tidak dapat terpenuhi untuk pengujian seluruh sampel	Pengajuan peningkatan Anggaran reagen	Desember 2026		Penambahan/revisi anggaran	Desember 2026	
		Beban kerja ICPMS menyebabkan alat mudah sekali terjadi error	Pengajuan anggaran kontrak service untuk pemeliharaan ICPMS	Desember 2026		Proses pengadaan	Desember 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		sehingga berdampak terhadap pemenuhan Timeline Uji				kontrak service ICPMS		
		Load sampel yang tinggi berdampak terhadap tingginya kebutuhan suku cadang ICPMS	Pengajuan peningkatan Anggaran suku cadang alat ICPMS	Desember 2026		Proses pengajuan penambahan/re alokasi/revisi anggaran	Desember 2026	
		Kelengkapan Parameter uji tidak dapat terpenuhi dikarenakan terdapat beberapa sampel uji yang tidak memenuhi minimal jumlah (5 Plo) sampel uji untuk pengujian mikrobiologi dikarenakan keterbatasan anggaran	Review terhadap target, untuk disesuaikan dengan ketersediaan anggaran sehingga pemenuhan parameter uji kritis dapat tercapai	Desember 2026		Rapat review sampling dan pengujian	Juni 2026	
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum ada sampel KLB	-	-	-	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Sampel PIRT belum dapat diuji karena alat ICPMS rusak	Perbaiki alat ICPMS	Desember 2026		Perbaiki alat ICPM	Desember 2026	
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Respon CAPA yang diterima belum sesuai dengan jumlah tindak lanjut pemeriksaan yang diterbitkan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan surat pengingat CAPA/ respon kepada pelaku usaha atau instansi terkait baik melalui aplikasi Satu POM Jabar atau manual 2) Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha berupa Desk CAPA 3) Pelaksanaan koordinasi terkait respon hasil pengawasan dengan instansi terkait 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar 5) Sosialisasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor melalui kegiatan hybrid sosialisasi regulasi terkini 	TW I, TW II, TW III dan TW IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. menerbitkan surat permintaan CAPA kepada pelaku usaha yang belum memberikan respon 2. Pelaksanaan pendampingan CAPA dalam bentuk Desk CAPA secara langsung 3. Pemantauan CAPA melalui aplikasi Galura 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Menyampaikan surat pengingat CAPA/ respon kepada pelaku usaha atau instansi terkait baik melalui aplikasi Satu POM Jabar atau manual 2) Pelaksanaan pendampingan kepada pelaku usaha berupa Desk CAPA 3) Pelaksanaan koordinasi terkait respon hasil pengawasan dengan instansi terkait 4) Pemantauan CAPA melalui aplikasi Galura Inspeksi/ Satu POM Jabar 5) Sosialisasi kepada pelaku usaha dan lintas sektor melalui kegiatan hybrid sosialisasi regulasi terkini 	TW II, TW III dan TW IV	Terdapat peningkatan jumlah respon tindak lanjut dibandingkan dengan kondisi sebelumnya
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa	1. Monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum menggunakan data dari	1. Penarikan dan pemantauan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan	Desember 2026		1. Penarikan dan pemantauan data dari SIPT dilakukan secara	Desember 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
	dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	SIPT, masih menggunakan data monev manual 2. Belum ada pemantauan timeline pelaporan di SIPT. 3. Belum ada pemantauan kesesuaian surat TL dan kesesuaian kesimpulan hasil pemeriksaan antara petugas Balai dan verifikator pusat.	2. Pemantauan data surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA dilakukan kroscek antara data SIPT yang ditarik dan data Galura 3. Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi dan SIPT			rutin setiap awal bulan 2. Pemantauan data surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA dilakukan kroscek antara data SIPT yang ditarik dan data Galura 3. Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi dan SIPT		
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1. Pemantauan monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pemenuhan standar sesuai pedoman belum efektif 2. Pemantauan timeline pelaporan hanya dari data SIPT. 3. Kesesuaian surat TL dan kesesuaian kesimpulan hasil pemeriksaan antara petugas Balai dan verifikator pusat.	1. Penarikan dan pemantauan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan 2. Pemantauan data surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA dilakukan kroscek antara data SIPT yang ditarik dan data Galura 3. Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi dan SIPT	Desember 2026		1. Penarikan dan pemantauan data dari SIPT dilakukan secara rutin setiap awal bulan 2. Pemantauan data surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA dilakukan kroscek antara data SIPT yang ditarik dan data Galura 3. Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi dan SIPT	Desember 2026	
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT 3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2026		1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi	Desember 2026	
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1) Pengumpulan database hasil pemeriksaan sarana, pemantauan surat TL dan CAPA dilakukan secara manual dan melalui SIPT; 2) Tidak ada pemantauan timeline, kesesuaian TL pada SIPT	1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi 2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT	Desember 2026		1) Pemantauan data base hasil pemeriksaan, pengiriman surat TL, penerimaan dan evaluasi CAPA pada aplikasi Galura Inspeksi	Desember 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		3) Surat TL yang diupload pada SIPT belum disahkan oleh kepala UPT	3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi			2) Pemantauan timeline, kesimpulan hasil pemeriksaan dan kesesuaian TL pada SIPT 3) Pemantauan timeline dan kesesuaian surat TL pada aplikasi Srikandi		
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	1. Kesulitan pengawasan iklan OBA yang ditampilkan di media lokal (TV dan radio lokal) yang sesuai jadwal 2. Kesulitan pengawasan iklan pangan yang ditampilkan di media TV nasional	1. Monev renlak dilakukan setiap bulan 2. Pengawasan iklan pangan dilakukan di jam kerja sesi I	Desember 2026		1. Monev renlak dilakukan setiap bulan 2. Pengaturan jadwal iklan dilakukan di jam kerja	Desember 2026	
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	Timeline pelaporan label rokok pada tahun 2025 tercapai 83,33%.	1. Perencanaan perjalanan dines untuk label rokok maksimal di minggu ke 3 bulan berjalan. 2. Monev timeline pelaporan label rokok setiap bulan	Desember 2026		1. Pengaturan perjalanan dines untuk label rokok . 2. Monev timeline pelaporan label rokok sampai TW 4	Desember 2026	
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep masih banyak	1) Melakukan Bimtek kepada PJT apotek ; 2) advokasi kepada lintas sektor; 3) Publikasi apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep; 3). advokasi kepada pemda (TW 1 dan 2)	TW I, TW II, TW III dan TW IV	Kegiatan dilaksanakan di setiap TW : 1) Melakukan Bimtek kepada PJT apotek ; 2) advokasi kepada lintas sektor; 3) Publikasi apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep; advokasi kepada pemda cirebon telah dilaksanakan. kegiatan dihadiri oleh kepala UPT dan staf serta Walikota Cirebon, Sekda dan OPD lainnya.	1) Melakukan Bimtek kepada PJT apotek ; 2) advokasi kepada lintas sektor; 3) Publikasi apotek yang memberikan antimikroba tanpa resep	TW II, TW III dan TW IV	Bimtek di TW 1 twlah dilaksanakan kepada sarama apotel dan PBF di wilayah cirebon
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan metoda analisa terverifikasi, ruang lingkup pengujian, peralatan dan kompetensi laboratorium sudah memenuhi target yang ditetapkan	Melakukan monev terhadap pemenuhan nilai SKL yang meliputi Standar ruang lingkup, peralatan, kompetensi dan metode terverifikasi	TW I, TW II, TW III dan TW IV	Monev pemenuhan nilai SKL TW I	Monev pemenuhan nilai SKL TW II-IV	TW II, TW III dan TW IV	Pemenuhan SKL TW I memenuhi target yan telah ditetapkan
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Kabupaten/kota belum terpapar Program Kabupaten/Kota Pangan Aman	Melaksanakan advokasi Program KKPA dan/atau sosialisasi pengisian tools penilaian mandiri KKPA ke 19 Kab/kota	TW 4 2026	Persiapan dan komunikasi secara lisan dengan beberapa Kab/Kota yang direnakan untuk dilakukan pendampingan. sebelum Badan POM pusat	Kegiatan advokasi dan sosialisasi kegiatan KKPA belum dilakukan karena terjadi perubahan jadwal kick off KKPA secara nasional oleh Badan POM menjadi tanggal	TW 2 2026	Advokasi atau sosialisasi KKPA ke Kab Kota terlaksana

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
					melakukan kick of kegiatan KKPA	12 Maret 2026. BBPOM Bandung merencanakan akan melaksanakan kegiatan KKPA di minggu ke 3 bulan April 2026		
		Belum ada komitmen dan kesadaran dari pemerintah daerah dalam pengisian tools penilaian mandiri kabupaten/kota pangan aman	Melaksanakan koordinasi dan pendampingan secara intensif ke Kab/kota yang menjadi target pendampingan	TW 4 2026	Persiapan dan komunikasi secara lisan dengan beberapa Kab/Kota yang direnakan untuk dilakukan pendampingan. sebelum Badan POM pusat melakukan kick of kegiatan KKPA	Melakukan koordinasi dan pendampingan ke Kab/Kota secara intensif sepanjang tahun 2026	TW 4 2026	Kab Kota yang ditargetkan didampingi akan memenuhi batas penilaian Kab Kota Pangan Aman
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Ketersediaan sampel produk di sarana produksi pangan fortifikasi	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan poksi pengujian dan unit pengampu	TW 4 2026		Melakukan koordinasi renlak dan monev capaian dengan poksi pengujian	TW2,TW3, TW4 2026	
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	1) indeks fektifitas KIE pada TW 1 memenuhi target sebesar 90.76%, jumlah target responden tatap muka sudah tercapai, untuk target responden media masih belum dicapai, karena target adalah target tahunan. Sehingga akan dipenuhi sampai akhir tahun	Melakukan monitoring pencapaian target repsonden media agar dapat dicapai maksimal diakhir tahun	TW 4 2026	Dilakukan monitoring pencapaian target indeks dan responden	-	-	Tercapainya target indeks Survey Eff KIE dan target responden baik Tatap Muka maupun Media diakhir tahun 2026
18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Masih kurangnya komitmen sekolah terkait keamanan pangan	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan organisasi perangkat daerah terkait program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	TW II, TW III dan TW IV	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Bandung terkait rencana Audiensi dan pelaksanaan Advokasi	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimtek kader keamanan pangan sekolah, monev dan sertifikasi sekolah	TW II, TW III dan TW IV	
		Masih kurangnya kesadaran sekolah tentang keamanan pangan	Partisipasi aktif komunitas sekolah dalam mengikuti seluruh tahapan mulai dari sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan, monitoring dan sertifikasi sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	TW IV 2026	-	pengukuran indeks kesadaran komunitas sekolah tentang keamanan pangan akan diukur setelah sekolah yang diintervensi melaksanakan seluruh tahapan kegiatan	TW IV 2026	
		Kader Keamanan Pangan Sekolah belum maksimal dalam mensosialisasikan Keamanan pangan	Mendorong keaktifan kader keamanan pangan sekolah untuk mensosialisasikan keamanan pangan secara masive baik secara langsung atau melalui media sosial supaya informasi terbaru terkait keamanan pangan dapat diketahui secara luas	TW III, TW IV		Melaksanakan monev dan pengawalan kepada sekolah yang menerima intervensi program	TW III, TW IV	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
19	Jumlah desa pangan aman	Masih kurangnya komitmen desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam keamanan pangan	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan organisasi perangkat daerah terkait program desa pangan aman	TW II, TW III dan TW IV	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Bandung terkait rencana Audiensi dan pelaksanaan Advokasi	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor dan pemda, bimtek kader keamanan pangan, bimtek komunitas masyarakat, fasilitasi dan monev	TW II, TW III dan TW IV	
		Masih kurangnya komitmen pemerintah desa/kelurahan untuk tetap konsisten melaksanakan Program Desa Pangan Aman	Peningkatan komitmen pemerintah Desa /Kelurahan untuk dapat melanjutkan program Desa Pangan Aman dengan cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi yang telah disusun oleh kader keamanan pangan	TW IV 2026	-	Melakukan pengawasan kepada desa/kelurahan yang telah menerima intervensi program Desa Pangan Aman	TW IV 2026	
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Masih kurangnya komitmen dari pengelola pasar dan pemerintah daerah terkait dalam keamanan pangan	Melaksanakan koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan organisasi perangkat daerah terkait program pasar pangan aman berbasis komunitas	TW II, TW III dan TW IV	Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kab. Bandung terkait rencana Audiensi dan pelaksanaan Advokasi	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor dan pemda, bimtek pengelola pasar, penyuluhan kepada komunitas pasar, kampanye, sampling dan pengujian	TW II, TW III dan TW IV	
		Masih kurangnya komitmen pimpinan/kader keamanan pangan di pasar tentang keamanan pangan	Peningkatan tindakan lanjut hasil sampling dan pengujian	TW IV 2026	-	Melaksanakan monev kepada petugas pasar dan pengawasan terhadap hasil sampling dan pengujian	TW IV 2026	
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pedagang tentang keamanan pangan	Peningkatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada pedagang	TW II, TW III	-	Melaksanakan penyuluhan dan kampanye terkait keamanan pangan	TW II, TW III	
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan	Pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan umk	TW 4 2026	Pengumpulan dan seleksi pelaku usaha serta komitmen dalam pemenuhan kepatuhan	Melakukan bimtek OBA, Kos dan Pangan serta pendampingan dalam menerapkan aspek CPOTB,CPKB dan IP CPPOB	TW2,TW3, TW4 2026	
		Masih kurangnya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha tentang persyaratan dan regulasi yang berlaku	Peningkatan pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha UMK	TW 4 2026	Pengumpulan dan seleksi pelaku usaha serta komitmen dalam pemenuhan kepatuhan	Melakukan bimtek OBA, Kos dan Pangan serta pendampingan dalam menerapkan aspek CPOTB,CPKB dan IP CPPOB	TW2,TW3, TW4 2026	
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan	Pada akhir Triwulan I tahun 2026, terdapat 7 perkara carry over	Intensifikasi penyelesaian perkara carry over dan koordinasi lebih intens dengan Linsek CJS dalam penyelesaian perkara carry over	TW IV 2026		Intensifikasi penyelesaian perkara carry over dan	TW IV 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
	Pangan Olahan BBPOM di Bandung	dimana seluruhnya sudah P21.				koordinasi lebih intens dengan Linsek CJS dalam penyelesaian perkara carry over		
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	Belum dilakukan dilakukan penyusunan analisis kejahatan tahun 2026, beserta laporan penyusunan dan nilai penyusunan analisis.	Penyusunan analisis, penilaian, dan laporan penyusunan analisis kejahatan tahun 2026 pada Triwulan IV.	TW IV 2026	Pengumpulan data rutin rawan kasus, profiling dan patroli siber TW 1	Pengumpulan data rutin rawan kasus, profiling dan patroli siber TW 2,3,4 dan analisis kajian cegah tanggal 2026	TW IV 2026	Tersusunnya Laporan Analisis Kejahatan tahun 2026
		Belum dilakukan penyusunan rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan untuk Semester I tahun 2026	Penyusunan rekapitulasi rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan tahun 2026 pada akhir Semester II menunggu kajian yang belum disampaikan oleh Direktorat Cegah Tanggal Badan POM RI.	TW II 2026	Monev pelaporan data rawan kasus dan patroli siber sampai dengan TW 1	Monev pelaporan data rawan kasus dan patroli siber sampai dengan TW 2	TW 2, TW 3, dan TW 4	Telah disusun rekapitulasi rekapitulasi tindak lanjut rekomendasi analisis kejahatan obat dan makanan untuk tahun 2026
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Terdapat perubahan/pembaruan regulasi tentang perizinan, sehingga standar pelayanan perlu dilakukan revidu, serta ada penambahan jenis pelayanan sehubungan dengan pelimpahan kewenangan untuk layanan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, obat Kuasi	Melakukan revidu standar pelayanan publik untuk 10 jenis layanan yang ada, serta melaksanakan forum konsultasi publik untuk mendapatkan masukan Standar Pelayanan	TW II 2026	Menyusun KAK kegiatan Forum Konsultasi Publik	Melakukan revidu Standar Pelayanan Publik	TW II 2026	Tersusunnya Standar Pelayanan Publik tahun 2026
		Terdapat satu inovasi pelayanan publik yang diikutkan lomba inovasi pelayanan publik	Melakukan revidu, telaah, dan pengembangan terhadap inovasi pelayanan publik yang sudah dimiliki, dan selanjutnya yang memungkinkan dapat diikutkan dalam lomba inovasi pelayanan publik	TW IV 2026	Penyajian data latar belakang, implementasi, dan monev output dari masing-masing inovasi	Melakukan penguatan dalam hal pengukuran dampak masing-masing inovasi	TW II, TW III, TW IV	Terdapat data monev inovasi pelayanan publik
		Perlunya memperluas layanan untuk kelompok inklusi	Melaksanakan kegiatan yang melibatkan kelompok rentan / disabilitas	TW I 2026	Kegiatan Penyebaran Informasi di SLB tanggal 30 Januari 2026	-	-	Terdapat kegiatan layanan publik yang melibatkan kelompok rentan
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	Belum terdapat penetapan pengelola Inovasi kegiatan	Menetapkan pengelola inovasi kegiatan dan mengukur dampak dari inovasi tersebut			Penunjukan PIC Inovasi oleh masing-masing AoC Poksi dan melakukan pengukuran dampak inovasinya tersebut	TW 3 2026	
		Belum terlaksana Continuous improvement	Melaksanakan continuous improvement dan meningkatkan kualitas tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko sehingga mampu menciptakan birokrasi yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima			Penyusunan, pelaksanaan dan Monev Rencana Aksi RB 2026	TW IV 2026	
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	Pelaksanaan kegiatan perencanaan kinerja masih memiliki beberapa kelemahan, meliputi: Pada renstra 2025-2029	Melakukan perbaikan atas beberapa aspek kelemahan di kegiatan perencanaan kinerja	TW IV 2026		Melakukan perbaikan atas beberapa aspek kelemahan di kegiatan	TW IV 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
		belum merinci sumber dana dari kebutuhan pendanaan; Dokumen IKU, PK, RAPK belum dipublikasi di esr.MenPan; Dokumen Reviu dan Kertas Kerja target Tahun 2025 belum sesuai; adanya perbedaan target RAPK dengan Laporan Evaluasi Internal				perencanaan kinerja		
		Pelaksanaan kegiatan pengukuran kinerja masih memiliki beberapa kelemahan, meliputi : perbedaan nomenklatur indikator pada manual IKU dan SK IKU dan PK; Perbedaan penyajian realisasi data kinerja di simetris, LEI, dan Lapkin Interim; pelaksanaan reward dan punishment atas capaian kinerja, dan laporan kendala dan RTL pada aplikasi simetris belum tertib	<p>a. Menyempurnakan manual IKU 20252029 agar seluruh indikator sesuai dengan SK IKU dan PK serta menambahkan penjelasan penanggung jawab data disesuaikan dengan fungsi/bidang terkait pengampu indikator di UPT;</p> <p>b. Memastikan keselarasan penyajian data hasil pengukuran kinerja dengan menyajikan perbandingan data pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim;</p> <p>c. Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment di tahun 2025 sesuai SK Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor HK.02.02.103.1031.09.20.1976A Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment Atas Pencapaian Kinerja;</p> <p>d. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan</p>	TW IV 2026		<p>a. Menyempurnakan manual IKU 20252029 agar seluruh indikator sesuai dengan SK IKU dan PK serta menambahkan penjelasan penanggung jawab data disesuaikan dengan fungsi/bidang terkait pengampu indikator di UPT;</p> <p>b. Memastikan keselarasan penyajian data hasil pengukuran kinerja dengan menyajikan perbandingan data pada aplikasi SIMETRIS, Laporan Evaluasi Internal, dan Laporan Kinerja Interim;</p> <p>c. Mengimplementasikan pemberian reward dan punishment di tahun 2025 sesuai SK Kepala Balai Besar POM di Bandung Nomor HK.02.02.103.1031.09.20.1976A Tahun 2020 tentang Mekanisme Pemberian Reward dan Punishment Atas Pencapaian Kinerja;</p> <p>d. Memastikan seluruh pengisian data kinerja pada aplikasi</p>	TW IV 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
						SIMETRIS telah lengkap dengan menyajikan informasi terkait kendala/hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara berkala sesuai dengan periode pelaporan yang telah ditetapkan		
		Pelaksanaan kegiatan pelaporan kinerja masih memiliki beberapa kelemahan	<p>a. Menyusun revisi laporan kinerja yang disertai dengan penjelasan terkait perubahannya serta menyesuaikan tanggal pengesahan sesuai dengan tanggal laporan diformalkan;</p> <p>b. Menyusun matriks tindak lanjut evaluasi dengan penjelasan rencana aksi yang selaras dan berkesinambungan dengan periode sebelumnya pada setiap indikator kinerja</p> <p>c. Mengoptimalkan peran tim Manajemen Kinerja untuk mendukung implementasi SAKIP terutama untuk memastikan keselarasan antar dokumen pelaporan;</p> <p>d. Menyempurnakan laporan kinerja interim dengan menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses pencapaian target kinerja pada masing-masing Indikator.</p>	TW IV 2026		<p>a. Menyusun revisi laporan kinerja yang disertai dengan penjelasan terkait perubahannya serta menyesuaikan tanggal pengesahan sesuai dengan tanggal laporan diformalkan;</p> <p>b. Menyusun matriks tindak lanjut evaluasi dengan penjelasan rencana aksi yang selaras dan berkesinambungan dengan periode sebelumnya pada setiap indikator kinerja</p> <p>c. Mengoptimalkan peran tim Manajemen Kinerja untuk mendukung implementasi SAKIP terutama untuk memastikan keselarasan antar dokumen pelaporan;</p> <p>d. Menyempurnakan laporan kinerja interim dengan menjelaskan upaya yang telah dilakukan dalam rangka efisiensi penggunaan sumber daya dalam proses pencapaian target kinerja pada</p>	TW IV 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
						masing-masing Indikator.		
		Pelaksanaan kegiatan evaluasi akuntabilitas kinerja masih memiliki beberapa kelemahan	a. Memastikan keselarasan sasaran kegiatan yang disajikan dalam laporan evaluasi internal dan dokumen perjanjian kinerja; b. Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM	TW IV 2026		a. Memastikan keselarasan sasaran kegiatan yang disajikan dalam laporan evaluasi internal dan dokumen perjanjian kinerja; b. Menyusun laporan evaluasi internal secara lengkap dan rinci sesuai kebijakan implementasi SAKIP di BPOM	TW IV 2026	
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	Nilai komponen deviasi Hal III masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi RPD secara berkala	TW IV 2026		Monitoring dan Evaluasi RPD dan Revisi RPD setiap triwulan	TW IV 2026	
		Nilai komponen Penyerapan Anggaran masih belum maksimal	Melakukan monitoring dan evaluasi Penyerapan Anggaran secara berkala	TW IV 2026		Monitoring dan Evaluasi Penyerapan Anggaran Setiap Bulan	TW IV 2026	
		Penetapan target belum menyesuaikan dengan kondisi efisiensi dan relaksasi	Melakukan revisi Target RO sesuai rekomendasi	TW II 2026	Revisi Anggaran dan Target RO TA 2026	Penetapan Revisi DJA	April 2026	
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	Berdasarkan Keputusan Kepala BPOM HK.02.02.1.7.07.20.267 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM, tingkat maturitas manajemen risiko tahun 2025 pada Balai Besar POM di Bandung sebesar 2,938 dengan kategori Risk Aware	a. Melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko;			Melakukan pengembangan kompetensi secara berkesinambungan terkait manajemen risiko melalui pelatihan/sertifikasi/refreshment/workshop/ awareness manajemen risiko untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko	TW IV 2026	
			b. Mendokumentasikan justifikasi penentuan skor risiko pada setiap risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak pada penyusunan risk register; c. Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM dengan memperhatikan catatan kelemahan sebagaimana telah disampaikan pada poin 5.c;			Mendokumentasikan justifikasi penentuan skor risiko pada setiap risiko sebagai dasar dalam menentukan level kemungkinan dan dampak pada penyusunan	TW IV 2026	

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	IKU	Kondisi Awal	Rekomendasi	Timeline	Progres Rencana Aksi			Kondisi Akhir
					Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai		
						Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line	
			d. Melakukan reuiu terhadap penentuan respon risiko dan/atau deskripsi tindakan mitigasi pada RTP; e. Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.			risk register;		
						Melakukan tinjauan kembali terhadap identifikasi dan analisa risiko sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko Badan POM	TW IV 2026	
						Melakukan reuiu terhadap penentuan respon risiko dan/atau deskripsi tindakan mitigasi pada RTP	TW IV 2026	
						Merumuskan tindakan mitigasi pada RTP yang berbeda dari pengendalian eksisting, sehingga dapat efektif menurunkan level risiko residual.	TW IV 2026	

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
1	3165.AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	3	21.43	Belum dilakukan dilakukan penyusunan analisis kejahatan tahun 2026, beserta laporan penyusunan dan nilai penyusunan analisis.	Penyusunan analisis, penilaian, dan laporan penyusunan analisis kejahatan tahun 2026 pada Triwulan IV.	Pengumpulan data rutin rawan kasus, profiling dan patroli siber TW 1	Pengumpulan data rutin rawan kasus, profiling dan patroli siber TW 2,3,4 dan analisis kajian cegah tangkal 2026	TW IV 2026
2	3165.BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	951	283	29.76	Belum dilaksanakan kegiatan desk capa evaluasi dokumen sertifikasi dan kegiatan desk e-registrasi pangan olahan	Pelaksanaan kegiatan bimtek dan desk e-registrasi pangan olahan berkoordinasi dengan	Melaksanakan desk capa mandiri dari masing-masing petugas sertifikasi dalam rangka	Pelaksanaan kegiatan bimtek dan desk e-registrasi pangan olahan berkoordinasi dengan Direktorat	TW II, TW III dan TW IV

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
							Direktorat Registrasi Pangan Olahan Pelaksanaan kegiatan Desk CAPA sebagai upaya peningkatan dan percepatan layanan sertifikasi	percepatan layanan sertifikasi	Registrasi Pangan Olahan Pelaksanaan kegiatan Desk CAPA sebagai upaya peningkatan dan percepatan layanan sertifikasi	
3	3165.BDB.001	Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	17	0	10	Masih kurangnya komitmen sekolah terkait keamanan pangan	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor dan pelaksanaan tahapan sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai renlak dan pedoman	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab. Bandung terkait rencana pelaksanaan kegiatan Germas SAPA di kab. Bandung	Melaksanakan kegiatan Advokasi dan melaksanakan seluruh tahapan program sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan sesuai renlak dan pedoman	TW II, TWII dan TW IV
4	3165.BDB.002	Desa Pangan Aman	6	0	10	Masih kurangnya komitmen desa/kelurahan dan pemerintah daerah dalam keamanan pangan	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor dan pelaksanaan tahapan desa pangan aman sesuai renlak dan pedoman	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab. Bandung terkait rencana pelaksanaan kegiatan Germas SAPA di kab. Bandung	Melaksanakan kegiatan Advokasi dan melaksanakan seluruh tahapan program desa pangan aman sesuai renlak dan pedoman	TW II, TWII dan TW IV
5	3165.BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	0	10	Masih kurangnya komitmen dari pengelola pasar dan pemerintah daerah terkait dalam keamanan pangan	Melaksanakan advokasi dengan lintas sektor dan pelaksanaan tahapan pasar pangan aman berbasis komunitas sesuai renlak dan pedoman	Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan kab. Bandung terkait rencana pelaksanaan kegiatan Germas SAPA di kab. Bandung	Melaksanakan kegiatan Advokasi dan melaksanakan seluruh tahapan program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas sesuai renlak dan pedoman	TW II, TWII dan TW IV
6	3165.BDC.001	KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21,335	9219	43.21	Terjadi blokir anggaran sebesar 69,48 % yang mengakibatkan tidak mungkin mencapai target output awal.	Mengusulkan revisi penyesuaian output sesuai dengan hasil pembahasan bersama Biro Perencanaan Badan POM dari target output 21.335 orang menjadi 12.300 orang	Revisi Anggaran dan Target RO TA 2026	Penetapan Revisi DJA	April 2026

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
7	3165.BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	204	51	25.00					
8	3165.BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0	25	Pelaksanaan Kegiatan dilaksanakan di Triwulan II dan III	Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN, serta pelaksanaan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan		Pelaksanaan kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi ASN dan Non ASN, serta pelaksanaan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	TW II, III 2026
9	3165.BMB.001	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT	22	2	9.09	Anggaran terblokir sekitar 85% dari pagu awal tahun	Upaya memaksimalkan anggaran yang tersedia/tidak terblokir dengan upayan capaian output yang maksimal dan optimal. serta mengupayakan penyesuaian target output dari 22 menjadi 17 unit	Revisi Anggaran dan Target RO TA 2026	Penetapan Revisi DJA	April 2026
10	3165.PDD.001	Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	25.00	Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan	Pelaksanaan kegiatan Bimtek Internal bagi penguji, pemeliharaan alat laboratorium, dan melaksanakan pengadaan bahan penyelenggaraan laboratorium.		Percepatan Pelaksanaan Kegiatan dan Pengadaan	TW 4 2026
11	3165.QCD.U02	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	8	0	0.00	Pada akhir Triwulan I tahun 2026, terdapat 7 perkara carry over dimana seluruhnya sudah P21.	Intensifikasi penyelesaian perkara carry over dan koordinasi lebih intens dengan Linsek CJS dalam penyelesaian perkara carry over		Intensifikasi penyelesaian perkara carry over dan koordinasi lebih intens dengan Linsek CJS dalam penyelesaian perkara carry over	TW IV 2026
12	3165.QDC.001	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	95	90	94.74	Adanya penyesuaian Target RO	Revisi Target RO		Revisi Target RO	TW 2

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
13	3165.QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	22	3	14.09	- Masih kurangnya komitmen pelaku usaha dalam pemenuhan - Revisi target UMKM	Melakukan desk CAPA kepada pelaku usaha	Pengumpulan dan seleksi pelaku usaha serta komitmen dalam pemenuhan kepatuhan	Melakukan bimtek OBA, Kos dan Pangan serta pendampingan dalam menerapkan aspek CPOTB,CPKB dan IP CPPOB	TW2,TW3, TW4 2026
14	3165.QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	195	26.17	Adanya penyesuaian Target RO	Revisi Target RO		Revisi Target RO	TW 2
15	3165.QIA.002	Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1,781	364	20.44	Adanya penyesuaian Target RO	Revisi Target RO		Revisi Target RO	TW 2
16	3165.QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	324	29	8.95	belum meratanya kompetensi inspektur dalam melaksanakan pengawasan	- Sharing knowledge antar inspektur sangat membantu meningkatkan pemahaman dan kompetensi personel - Pelatihan personil yang dilaksanakan secara online melalui aplikasi IDEAS dan media pelatihan lainnya		update data kompetensi terkini yang diakui oleh unit pengampu melakukan bimtek CPKB internal	TW2,TW3, TW4 2026
17	3165.QIC.003	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa oleh UPT	40	1	2.50	Database sarana produsen fortifikasi yang bisa dilakukan sampling tidak update	Sinkronisasi data inspeksi dengan data sertifikasi dan pengujian mengenai sarana produksi fortifikasi yang bisa dilakukan sampling		update data sarana fortifikasi yang terkini	TW2,TW3, TW4 2026
18	3165.QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1,072	129	12.03	Adanya penyesuaian Target RO	Revisi Target RO		Revisi Target RO	TW 2
19	3165.RAB.001	Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	Pemilihan alat laboratorium yang diadakan harus memenuhi TKDN yang disyaratkan, namun alat laboratorium yang dibutuhkan sedikit yang memiliki	Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium		Pelaksanaan pengadaan alat laboratorium	TW 3

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	Program/Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian	Kendala/Hambatan	Rencana Aksi TW Sebelumnya dan/ TW Periode ini	Progres Rencana Aksi		
								Rencana Aksi yang Sudah Selesai	Belum Selesai	
									Rencana Aksi yang Belum Selesai	Time Line
						TKDN yang disyaratkan				
20	6384.EBA.956	Layanan BMN	1	0	25	Pelaksanaan Kegiatan ditriwulan III	Pelaksanaan kegiatan pendampingan satwil keuangan dan BMN		Pelaksanaan kegiatan pendampingan satwil keuangan dan BMN	TW 3
21	6384.EBA.994	Layanan Perkantoran	1	0	25	Realisasi sudah sesuai perencanaan	pelaksanaan kegiatan rutin pemeliharaan dan operasional kantor		pelaksanaan kegiatan rutin pemeliharaan dan operasional kantor	TW 4 2026

3.4 REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2026 Balai Besar POM di Bandung memperoleh anggaran sebesar Rp38.711.257.000,-. Pada TA 2026 terdapat pengurangan Pagu Belanja ke RO Khusus sebesar Rp5.914.388.000,-, sehingga Pagu Anggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung TA 2025 menjadi Rp32.796.869.000,- dengan pagu dikurangi Blokir sebesar Rp32.480.885.000,-. Realisasi anggaran pada Triwulan I Tahun 2026 dengan presentase 22.20% yaitu sebesar Rp7.211.414.065,-.

TABEL 3.3.1

REALISASI ANGGARAN BALAI BESAR POM DI BANDUNG
TAHUN 2026

PROGRAM	PAGU (Rp)	PAGU DIKURANGI BLOKIR	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
Program Pengawasan Obat dan Makanan	13.360.185.000	13.044.201.000	2.869.423.416	22.00%
Program Dukungan Manajemen	19.436.684.000	19.436.684.000	4.341.990.649	22.34%
TOTAL	32.796.869.000	32.480.885.000	7.211.414.065	22.20%

Berikut adalah realisasi anggaran berdasarkan sasaran kegiatan dan alokasi anggaran dan realisasinya berdasarkan indikator sasaran kegiatan:

TABEL 3.3.2

ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN
INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	7.269.869.000	206.633.769	2.84%

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU	REALISASI	CAPAIAN
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	30.821.000	1.047.500	3.40%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	4.263.303.000	2.465.937.032	57.84%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	24.479.000	0	0.00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	572.012.000	59.605.996	10.42%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23.440.000	3.082.500	13.15%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	205.247.000	72.460.353	35.30%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	20.091.714.000	4.402.646.915	21.91%
TOTAL		32.480.885.000	7.211.414.065	22.20%

Penyerapan anggaran per sasaran kegiatan pada Tahun 2026 dari yang terbesar secara berurutan adalah sebagai berikut :

- 1) Sasaran Kegiatan ketiga yaitu Meningkatkan efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp4.263.303.000,- dan realisasi sebesar Rp2.465.937.032,-, dengan capaian 57.84%.

- 2) Sasaran Kegiatan ketujuh yaitu: Layanan Publik UPT yang Prima dengan pagu sebesar Rp205.247.000,- dan realisasi sebesar Rp72.460.353,- dengan capaian 35.30%.
- 3) Sasaran Kegiatan kedelapan yaitu: Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal dengan pagu sebesar Rp20.091.714.000,- dan realisasi sebesar Rp4.402.646.915,- dengan capaian 21.91%.
- 4) Sasaran Kegiatan keenam yaitu: Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif dengan pagu sebesar Rp23.440.000,- dan realisasi sebesar Rp3.082.500,- dengan capaian 13.15%.
- 5) Sasaran Kegiatan kelima yaitu: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp572.012.000,- dan realisasi sebesar Rp59.605.996,- dengan capaian 10.42%.
- 6) Sasaran Kegiatan kedua yaitu: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi dengan pagu sebesar Rp30.821.000,- dan realisasi sebesar Rp1.047.500,- dengan capaian 3.40%.
- 7) Sasaran Kegiatan Kesatu yaitu: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT dengan pagu sebesar Rp7.269.869.000,- dan realisasi sebesar Rp206.633.769,-, dengan capaian 2.84%.
- 8) Sasaran Kegiatan keempat yaitu: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu dengan pagu sebesar Rp24.479.000,- dan realisasi sebesar Rp0,- dengan capaian 0.00%.

Pada TA 2026, RPD yang tercantum dalam Halaman III DIPA BBPOM di Bandung sebesar Rp. 37.650.601.000,-, maka deviasi sebesar 0 dengan kategori Baik (Hijau). Secara rinci dijelaskan tabel berikut :

TABEL 3.3.3
HASIL PERHITUNGAN DEVIASI RPD
TAHUN 2026

Bulan	% RPD Halaman III DIPA	% Realisasi	Deviasi	Kategori
Januari	100.00	100.00	0.00	Baik

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Februari	100.00	100.00	0.00	Baik
Maret	100.00	100.00	0.00	Baik

Target Rencana Penarikan Dana (RPD) Per Triwulan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun Anggaran 2025 bahwa target RPD per triwulan, mengacu pada target penyerapan anggaran per triwulan:

- a. Triwulan I, sebesar minimal 15 persen;
- b. Triwulan II, sebesar minimal 40 persen;
- c. Triwulan III, sebesar minimal 60 persen; dan
- d. Triwulan IV, sebesar minimal 99 persen.

TABEL 3.3.4
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2026

Target Realisasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian
15%	22.20%	148%

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan output dari suatu kegiatan. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input. Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian.

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Efisiensi ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Apabila $IE \geq SE$: kegiatan efisien
Apabila $IE < SE$: kegiatan tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Dalam laporan kinerja ini, pengukuran tingkat efisiensi bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dalam laporan kinerja ini dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan hanya didasarkan pada rasio antara output dan input (berupa dana).

Hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Sasaran Kegiatan pada Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3.5
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN
TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
	Capaian (%)	Capaian (%)			
a	b	c	d=b/c	e=d-1	f
1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.81	5.83	17.81	16.81	TIDAK EFISIEN
2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang	0.00	0.00	-	-	-

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	b	c	d=b/c	e=d-1	f	
	telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	101.46	3.85	26.33	25.33	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	0.00	0.00	-	-	-
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	74.87	4.82	15.55	14.55	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	93.84	0.00	-	-	TIDAK EFISIEN
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	104.46	8.65	12.08	11.08	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan	107.61	8.65	12.44	11.44	TIDAK EFISIEN

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI	
	Capaian (%)	Capaian (%)				
a	b	c	d=b/c	e=d-1	f	
	ditindaklanjuti sesuai ketentuan					
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	103.33	8.75	11.81	10.81	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	102.15	10.41	9.81	8.81	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	104.37	15.76	6.62	5.62	TIDAK EFISIEN
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	109.08	11.08	9.85	8.85	TIDAK EFISIEN
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	23.09	-	-	-
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT	100.11	0.03	3301.04	3300.04	TIDAK EFISIEN

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama	Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
	Capaian (%)	Capaian (%)			
a	b	c	d=b/c	e=d-1	f
sesuai Standar Kemampuan Laboratorium					
15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	-	-	-
16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	100.00	3.40	29.42	28.42	TIDAK EFISIEN
17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	100.96	60.64	1.66	0.66	EFISIEN
18 Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	100.00	0.00	-	-	TIDAK EFISIEN
19 Jumlah desa pangan aman	100.00	0.00	-	-	TIDAK EFISIEN
20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	100.00	0.00	-	-	TIDAK EFISIEN
21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi	35.23	0.00	-	-	TIDAK EFISIEN

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Indikator Kinerja Utama		Volume	Anggaran per Sasaran Strategis	IE	TE	KATEGORI
		Capaian (%)	Capaian (%)			
a		b	c	d=b/c	e=d-1	f
	sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan					
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	101.63	10.42	9.75	8.75	TIDAK EFISIEN
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejukan Digital yang Diselesaikan olehBBPOM di Bandung	100.00	13.15	7.60	6.60	TIDAK EFISIEN
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	35.30	-	-	-
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	0.00	22.34	-	-	-
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	-	-	-
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	-	-	-
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	-	-	-
TOTAL		97.00	22.20	4.37	3.37	TIDAK EFISIEN

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

Pada Tahun 2026, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) indikator secara kumulatif masuk kedalam kategori Tidak Efisien (3.37).

Sedangkan hasil pengukuran Tingkat Efisiensi Kegiatan pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.3.6
PENGUKURAN TINGKAT EFISIENSI
BERDASARKAN KEGIATAN/OUTPUT
TAHUN 2026

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	23,440,000	3,082,500	13.15%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	951	Keputusan	283	29.76%	205,247,000	72,460,353	35.30%
3	3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	0	10.00%	67,933,000		0.00%
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	10.00%	92,775,000		0.00%
5	3165.BDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	Lembaga	0	10.00%	35,767,000		0.00%
6	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21335	Orang	9219	43.21%	4,057,740,000	2,463,687,032	60.72%
7	3165.BIA.001 Pengawasan dan Pengendalian Produk	204	Produk	51	25.00%	14,552,000	1,612,233	11.08%
8	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	16.66%	655,030,000	60,656,266	9.26%
9	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	22	Layanan	2	9.09%	9,088,000	2,250,000	24.76%
10	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan	1	Laboratorium	0	25.00%	2,352,396,000	1,285,000	0.05%

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
	Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice							
11	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	8	Perkara	0	0.00%	572,012,000	59,605,996	10.42%
12	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	95	Orang	90	94.74%	6,480,000	0	0.00%
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	25	UMKM	3	11.20%	24,479,000	0	0.00%
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	195	26.17%	587,126,000	21,907,695	3.73%
15	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1781	Sampel	364	20.44%	1,422,773,000	82,954,451	5.83%
16	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	324	Sarana	29	8.95%	359,775,000	30,879,200	8.58%
17	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	40	Sarana	1	2.50%	30,821,000	1,047,500	3.40%
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1072	Sarana	129	12.03%	642,183,000	67,995,190	10.59%
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	1,884,584,000	0	0.00%
20	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	25.00%	2,500,000	0	0.00%
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	25.00%	19,434,184,000	4,341,990,649	22.34%

LAPORAN KINERJA INTERIM
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG
TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Program/ Kegiatan/ RO	Volume				Anggaran		
		Satuan	Target 2025	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/d \times 100)$	f	g	$h=(g/f \times 100)$
TOTAL						32.480.885.000	7.211.414.065	22.20%

Pada Tahun 2026, BBPOM di Bandung melaksanakan 21 (dua puluh satu) Rincian Output (RO) dengan nilai TE masuk kategori Tidak Efisien. Dari data perhitungan tingkat efisiensi, nilai TE tertinggi adalah Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan (TE=0.80) karena adanya beberapa anggaran blokir sehingga terdapat penyesuaian capaian output. Berdasarkan perhitungan Nilai TE, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan BBPOM di Bandung pada TA 2025 terlaksana secara TIDAK EFISIEN (TE=-0.09)

Namun, tingkat efisiensi adalah bersifat relative, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasio antara output dan input, dalam bentuk anggaran. Ke depan, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan input yang lain, dengan dukungan data yang lebih memadai.

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

4.2 SARAN

4.1 KESIMPULAN

Laporan Kinerja Interim Balai Besar POM Balai Besar POM di Bandung Tahun 2026 mengukur pencapaian kinerja Tahun 2026 berdasarkan target pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2026 yang ditetapkan tanggal 26 Februari 2026. Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Renstra Balai Besar POM di Bandung Tahun 2025-2029. Berikut hasil pencapaian sasaran kegiatan pada Tahun 2026, yaitu:

1. Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan pada Penetapan Kinerja dan Rencana Aksi Penetapan Kinerja Tahun 2026 sebanyak 8 (delapan) sasaran kegiatan. Dari sasaran kegiatan tersebut diukur berdasarkan 28 (dua puluh delapan) indikator sasaran kegiatan, dengan hasil sebagai berikut: 3 (tiga) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Sangat Baik, 2 (dua) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Baik, dan 1 (satu) pencapaian sasaran kegiatan dengan kriteria Kurang. Secara rinci setiap sasaran kegiatan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
2. Hasil capaian kinerja sasaran kegiatan pada Tahun 2026 adalah sebagai berikut:
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan pertama sebesar 100.46% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah Jawa Barat serta keberhasilan Balai Besar POM di dalam menguatkan lab pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di UPT.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedua sebesar 100.00% dengan kategori Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas Pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketiga sebesar 100.24% dengan kriteria sangat baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan efektifitas KIE di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan keempat sebesar 35.23% dengan kriteria Kurang, ini menunjukkan kurangnya upaya Balai Besar POM di Bandung dalam meningkatkan pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu sediaan farmasi dan pangan olahan di Jawa Barat.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran strategis kelima sebesar 101.63% dengan kriteria Sangat Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di Jawa Barat.

- ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan keenam sebesar 100,00% dengan kriteria Baik, ini menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam melaksanakan kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan ketujuh diukur pada akhir tahun, ini belum menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam memberikan layanan publik UPT yang prima.
 - ❖ Capaian kinerja sasaran kegiatan kedelapan diukur pada akhir tahun, ini belum menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di Bandung dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan unit organisasi yang optimal.
3. Pada Tahun 2026, hasil pengukuran tingkat efisien berdasarkan indikator sasaran kegiatan sebanyak 28 (dua puluh delapan) didapatkan hasil TIDAK EFISIEN sebesar (TE = 3.37).

4.2 SARAN

Pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dalam periode Renstra 2025 - 2029. Capaian Kinerja pada Tahun 2026 ini akan menjadi dasar dalam penetapan dan pencapaian target Renstra sampai dengan Tahun 2029, serta pencapaian Sasaran Kegiatan dan Tujuan BBPOM di Bandung.

Dari capaian sasaran kegiatan Tahun 2026 ini, ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan oleh BBPOM di Bandung, dalam meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan dalam periode selanjutnya, yaitu :

1. Koordinasi dan kolaborasi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Wilayah Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.
2. Melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka implementasi Prioritas Direktif Presiden dan penajaman belanja, melalui peningkatan kualitas rewiu perencanaan anggaran dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan, penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berbasis kinerja.
3. Peningkatan dan penguatan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, baik itu premarket, post market, penyidikan dan pemberdayaan masyarakat, yang lebih efektif dan efisien.

4. Meningkatkan implementasi manajemen risiko dalam melaksanakan aktifitas pengendalian risiko yang telah diidentifikasi, sehingga seluruh risiko dapat dikendalikan dan tujuan sasaran kegiatan dapat tercapai.
5. Melaksanakan reformasi birokrasi secara konsisten dan terus menerus serta berkesinambungan.
6. Penyesuaian Target Rincian Output (RO) dan kinerja karena adanya efisiensi Pergeseran Anggaran Ke Dalam RO Khusus Berdasarkan Hasil Identifikasi Keuangan Dalam Rangka Penguatan Dukungan Pelaksanaan Prioritas Direktif Presiden dan Penajaman Belanja Per Satuan Kerja Untuk Digeser/Direalokasi Ke BA-BUN TA 2026.

LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2026
PERJANJIAN KINERJA (PK) 2026
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) 2026
PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I 2026
LAPORAN EVALUASI INTERNAL TRIWULAN I 2026
CAPAIAN OUTPUT TRIWULAN I 2026

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDUNG

NOMOR HK.02.02.8A.10.25.246 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung tentang Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2026.
- Kesatu** : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua** : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 07 Oktober 2025

**KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI BANDUNG,**



I MADE BAGUS GERAMETTA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG NOMOR
HK.02.02.8A.10.25.246 TAHUN 2025 TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG TAHUN 2026

RENCANA KINERJA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
BANDUNG TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	90.75
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94.25
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	86.68

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	85.8
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	87.81
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20
		Jumlah desa pangan aman	10
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.21
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	74
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
10	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.75
11	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.75
		Nilai AKIP UPT BPOM	83.25
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3.00

KEPALA BALAI BESAR PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANDUNG



I MADE BAGUS GERAMETTA



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE BAGUS GERAMETTA

Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandung

I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan

TARUNA IKRAR

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANDUNG**

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65 persen
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27.79 persen
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92 persen
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 persen
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.5 persen
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25 persen
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73 persen
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93 persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08 persen
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.9 persen
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12 persen
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.68 persen
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 persen
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.8 nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53 persen
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 persen

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.9 nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	17 Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	6 Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2 Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	34.21 persen
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	84 persen
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 persen
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	91.95 nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	81.5 nilai
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 nilai
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 32,796,869,000 (Tiga Puluh Dua Miliar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	13,360,185,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	19,436,684,000

Bandung, 26 February 2026

Pihak Pertama
Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di
Bandung



I MADE BAGUS GERAMETTA

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas Obat dan
Makanan



TARUNA IKRAR



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI BESAR POM DI BANDUNG
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	92.65	1,422,773,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27.79	6,480,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	341,088,800
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	45,779,000
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	93.5	181,958,200
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	85.25	6,926,200
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	95.73	176,754,900
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	92.93	176,754,900
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	96.08	354,171,000
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	97.9	320,760,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	95.12	26,528,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	91.68	14,552,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	64,699,000
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			87.2	87.2	87.2	87.4	87.4	87.4	87.6	87.6	87.6	87.8	4,347,478,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												10.53	18,300,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		1.59	1.59	7.94	15.87	39.68	39.68	39.68	63	63	63	63	30,821,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	89.9	4,066,828,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	10	30	45	55	70	75	80	95	100	17	79,994,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	10	25	30	50	65	75	80	85	95	6	95,879,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	40	70	80	85	95	100	100	100	2	36,143,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	5	13	40	40	40	55	66	82	82	93	94	34.21	24,479,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	38	40	41	42	43	45	46	47	51	52	55	84	612,126,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	23,440,000
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.93	230,442,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												91.95	19,663,371,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												81.5	356,141,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	12,211,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												3	59,991,000
Total														32,796,869,000	

Bandung, 26 February 2026

Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung



I MADE BAGUS GERAMETTA

**BERITA ACARA EVALUASI INTERNAL
TRIWULAN I TAHUN 2026**

Pada hari Senin tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu dua puluh enam bertempat Kantor Balai Besar POM di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt
NIP : 19690718 199603 1 001
Jabatan : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

2. Nama : Dwi Kurniasari, S.Si., Apt
NIP : 19810108 200604 2 004
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha Balai Besar POM di Bandung

Telah melaksanakan evaluasi internal terhadap realisasi anggaran dan capaian kinerja pada Balai Besar POM di Bandung periode Januari sampai dengan bulan Maret 2026 dengan hasil sebagai berikut :

1. Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran per Rincian Output (RO) Triwulan I

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2026	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	f	g	$h=(g/fx100)$
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	23,440,000	3,082,500	13.15%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	951	Keputusan	283	29.76%	205,247,000	72,460,353	35.30%
3	3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	1	10.00%	67,933,000	0	0.00%
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	10.00%	92,775,000	0	0.00%
5	3165.BDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	Lembaga	0	10.00%	35,767,000	0	0.00%
6	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21335	Orang	9.219	43.21%	4,057,740,000	2,463,687,032	60.72%
7	3165.BIA.001 Pengawasan dan Pengendalian Produk	204	Produk	51	25.00%	14,552,000	1,612,233	11.08%
8	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	16.66%	655,030,000	60,656,266	9.26%
9	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	22	Layanan	2	9.09%	9,088,000	2,250,000	24.76%

No	Program/ Kegiatan/RO	Volume				Anggaran		
		Target 2026	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	e	f=(e/dx100)	f	g	h=(g/fx100)
10	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	25.00%	2,352,396,000	1,285,000	0.05%
11	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	8	Perkara	0	0.00%	572,012,000	59,605,996	10.42%
12	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	95	Orang	90	94.74%	6,480,000	0	0.00%
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	25	UMKM	3	11.20%	24,479,000	0	0.00%
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	195	26.17%	587,126,000	21,907,695	3.73%
15	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1781	Sampel	364	20.44%	1,422,773,000	82,954,451	5.83%
16	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	324	Sarana	29	8.95%	359,775,000	30,879,200	8.58%
17	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	40	Sarana	1	2.50%	30,821,000	1,047,500	3.40%
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1072	Sarana	129	12.03%	642,183,000	67,995,190	10.59%
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	1,884,584,000	0	0.00%
20	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	25.00%	2,500,000	0	0.00%
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	25.00%	19,434,184,000	4,341,990,649	22.34%
Total		26646		10369	19.90%	32,480,885,000	7,211,414,065	22.20%

2. Kinerja dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Triwulan I

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/ex100)	h	i	j=(h/ix100)
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1 Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65	96.18	103.81	1,422,773,000	82,954,451	5.83%
		2 Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	0.00	0.00	0.00	6,480,000	0	0.00%
		3 Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	93.34	101.46	341,088,800	13,144,617	3.85%
		4 Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	0.00	45,779,000	0	0.00%
		5 Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	70.00	74.87	181,958,200	8,763,078	4.82%
		6 Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	80.00	93.84	2,668,800	0	0.00%
		7 Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	100.00	104.46	178,553,100	15,439,600	8.65%
		8 Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	100.00	107.61	178,553,100	15,439,600	8.65%
		9 Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	99.28	103.33	314,307,000	27,490,171	8.75%
		10 Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90	100.00	102.15	264,014,000	27,490,171	10.41%
		11 Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	99.28	104.37	23,615,500	3,721,511	15.76%
		12 Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68	100.00	109.08	14,552,000	1,612,233	11.08%
		13 Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	0.00	40,246,500	9,293,339	23.09%
		2		14 Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.20	87.30	100.11	4,236,980,000
15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	0.00			0.00	0.00	18,300,000	0	0.00%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Volume			Anggaran		
			Target TW 1	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
a	b	c	d	f	g=(f/i x 100)	h	i	j=(h/i x 100)
		pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman						
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	16 Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.59	1.59	100.00	30,821,000	1,047,500	3.40%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	17 Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	90.76	100.96	4,066,828,000	2,465,937,032	60.64%
		18 Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	10.00	10.00	100.00	67,933,000	0	0.00%
		19 Jumlah desa pangan aman	10.00	10.00	100.00	92,775,000	0	0.00%
		20 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00	10.00	100.00	35,767,000	0	0.00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21 Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	40.00	14.09	35.23	24,479,000	0	0.00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	22 Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	41.00	41.67	101.63	572,012,000	59,605,996	10.42%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	23 Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	50.00	50.00	100.00	23,440,000	3,082,500	13.15%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	24 Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	0.00	205,247,000	72,460,353	35.30%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	25 Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	0.00	19,707,115,500	4,402,646,915	22.34%
		26 Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	0.00	362,936,000	0	0.00%
		27 Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	0.00	3,450,000	0	0.00%
		28 Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	0.00	0.00	0.00	18,212,500	0	0.00%
TOTAL						32,480,885,000	7,211,414,065	22.20%

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Bagian Tata Usaha



Dwi Kurniasari, S.Si., Apt,

Bandung, 13 April 2026
Mengetahui,
Kepala Balai Besar Pengawas Obat
dan Makanan di Bandung



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Realisasi anggaran dan capaian output dibandingkan target dan nilai efisiensi sampai dengan Triwulan I 2026

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi i	Capaian f = (e/c x 100)	Pagu g	Realisasi h	Capaian i = (h/g x 100)	IE j = (f/i)	TE k = j-1	Ket l
a	b	c	d	e	f = (e/c x 100)	g	h	i = (h/g x 100)	j = (f/i)	k = j-1	l
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	Laporan	3	21.43%	23,440,000	3,082,500	13.15%	1.63	0.63	EFISIEN
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	951	Keputusan	283	29.76%	205,247,000	72,460,353	35.30%	0.84	-0.16	TIDAK EFISIEN
3	3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	Lembaga	0	10.00%	67,933,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	6	Lembaga	0	10.00%	92,775,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	3165.BDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	Lembaga	0	10.00%	35,767,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
6	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21335	Orang	9219	43.21%	4,057,740,000	2,463,687,032	60.72%	0.71	-0.29	TIDAK EFISIEN
7	3165.BIA.001 Pengawasan dan Pengendalian Produk	204	Produk	51	25.00%	14,552,000	1,612,233	11.08%	2.26	1.26	TIDAK EFISIEN
8	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	Laporan	0	16.66%	655,030,000	60,656,266	9.26%	1.80	0.80	EFISIEN
9	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	22	Layanan	2	9.09%	9,088,000	2,250,000	24.76%	0.37	-0.63	TIDAK EFISIEN
10	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Laboratorium	0	25.00%	2,352,396,000	1,285,000	0.05%	457.66	456.66	TIDAK EFISIEN
11	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	8	Perkara	0	0.00%	572,012,000	59,605,996	10.42%	0.00	-1.00	TIDAK EFISIEN
12	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	95	Orang	90	94.74%	6,480,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	25	UMKM	3	11.20%	24,479,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	Sampel	195	26.17%	587,126,000	21,907,695	3.73%	7.01	6.01	TIDAK EFISIEN
15	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1781	Sampel	364	20.44%	1,422,773,000	82,954,451	5.83%	3.51	2.51	TIDAK EFISIEN

No.	Program/Kegiatan/Output	Target	Satuan	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian	IE	TE	Ket
a	b	c	d	e	$f = (e/c \times 100)$	g	h	$i = (h/g \times 100)$	$j = (f/i)$	$k = j-1$	l
16	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	324	Sarana	29	8.95%	359,775,000	30,879,200	8.58%	1.04	0.04	EFISIEN
17	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	40	Sarana	1	2.50%	30,821,000	1,047,500	3.40%	0.74	-0.26	TIDAK EFISIEN
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1072	Sarana	129	12.03%	642,183,000	67,995,190	10.59%	1.14	0.14	EFISIEN
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	Paket	0	0.00%	1,884,584,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
20	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	Layanan	0	25.00%	2,500,000	0	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	Layanan	0	25.00%	19,434,184,000	4,341,990,649	22.34%	1.12	0.12	EFISIEN
Total		26646		10369	19.90%	32,480,885,000	7,211,414,065	22.20%	0.90	-0.10	TIDAK EFISIEN

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Target 2026	Volume		Pagu	Anggaran		IE	TE	CAPAIAN TE	
			Target TW I	Realisasi		Capaian	Realisasi				Capaian
1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65	92.65	96.18	103.81	1,422,773,000	82,954,451	5.83%	17.81	16.81	TIDAK EFISIEN
2	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	28	0.00	0.00	0.00	6,480,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	92.00	93.34	101.46	341,088,800	13,144,617	3.85%	26.33	25.33	TIDAK EFISIEN
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	100.00	0.00	0.00	45,779,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	93.50	70.00	74.87	181,958,200	8,763,078	4.82%	15.55	14.55	TIDAK EFISIEN
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	85.25	80.00	93.84	2,668,800	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Volume				Pagu	Anggaran		IE	TE	CAPAIAN TE
		Target 2026	Target TW I	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian			
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	95.73	100.00	104.46	178,553,100	15,439,600	8.65%	12.08	11.08	TIDAK EFISIEN
8	Persentase sarana produksi pangan olahan (termasuk IRTP) yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	92.93	100.00	107.61	178,553,100	15,439,600	8.65%	12.44	11.44	TIDAK EFISIEN
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	96.08	99.28	103.33	314,307,000	27,490,171	8.75%	11.81	10.81	TIDAK EFISIEN
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90	97.90	100.00	102.15	264,014,000	27,490,171	10.41%	9.81	8.81	TIDAK EFISIEN
11	Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	95.12	99.28	104.37	23,615,500	3,721,511	15.76%	6.62	5.62	TIDAK EFISIEN
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68	91.68	100.00	109.08	14,552,000	1,612,233	11.08%	9.85	8.85	TIDAK EFISIEN
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	0.00	0.00	0.00	40,246,500	9,293,339	23.09%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.80	87.20	87.30	100.11	4,236,980,000	1,285,000	0.03%	3301.04	3300.04	TIDAK EFISIEN
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	10.53	0.00	0.00	0.00	18,300,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	1.59	1.59	100.00	30,821,000	1,047,500	3.40%	29.42	28.42	TIDAK EFISIEN
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	89.90	90.76	100.96	4,066,828,000	2,465,937,032	60.64%	1.66	0.66	EFISIEN
18	Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	10.00	10.00	100.00	67,933,000		0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN

NO	INDIKATOR SASARAN KEGIATAN	Volume				Pagu	Anggaran		IE	TE	CAPAIAN TE
		Target 2026	Target TW I	Realisasi	Capaian		Realisasi	Capaian			
19	Jumlah desa pangan aman	6	10.00	10.00	100.00	92,775,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	10.00	10.00	100.00	35,767,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.21	40.00	14.09	35.23	24,479,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	84.00	41.00	41.67	101.63	572,012,000	59,605,996	10.42%	9.75	8.75	TIDAK EFISIEN
23	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	91.00	50.00	50.00	100.00	23,440,000	3,082,500	13.15%	7.60	6.60	TIDAK EFISIEN
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93	0.00	0.00	#DIV/0!	205,247,000	72,460,353	35.30%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
25	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.95	0.00	0.00	#DIV/0!	19,707,115,500	4,402,646,915	22.34%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
26	Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	81.5	0.00	0.00	#DIV/0!	362,936,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
27	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	0.00	0.00	#DIV/0!	3,450,000	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
28	Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	3	0.00	0.00	#DIV/0!	18,212,500	0.00	0.00%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN
	TOTAL				96.99	32,480,885,000	7,211,414,065	22.20%	#DIV/0!	#DIV/0!	TIDAK EFISIEN

A. Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan

No	Program/kegiatan/Output	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3	
1	3165.AEA.001 – Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	14	1	1	7.14	2	2	14.29	3	3	21.43	23,440,000	0	0.00%	716,500	3.06%	3,082,500	13.15%
2	3165.BAH.001 Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT	951	75	75	7.89	189	189	19.87	283	283	29.76	230,442,000	0	0.00%	27,272,744	13.29%	72,460,353	35.30%
3	3165.BDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	17	0	0	2.00	0	0	5.00	0	0	10.00	79,994,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
4	3165.BDB.002 Desa Pangan Aman	6	0	0	2.00	0	0	5.00	0	0	10.00	95,879,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	3165.BDB.003 Pasar Aman dari Bahan Berbahaya	2	0	0	2.00	0	0	5.00	0	0	10.00	36,143,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
6	3165.BDC.001 KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT	21335	0	0	0	558	558	2.62	9219	9219	43.21	4,057,740,000	0	0.00%	90,000,000	2.22%	2,463,687,032	60.72%
7	3165.BIA.001 Pengawasan dan Pengendalian Produk	204	17	17	8.33	34	34	16.66	51	51	25.00	14,552,000	0	0.00%	0	0.00%	1,612,233	11.08%
8	3165.BKB.001 Laporan Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan	1	0	0	8.33	0	0	16.66	0	0	25.00	655,030,000	0	0.00%	44,166,866	6.74%	60,656,266	9.26%
9	3165.BMB.001 Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	2	2	9.09	9,088,000	0	0.00%	0	0.00%	2,250,000	24.76%
10	3165.PDD.001 Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	8.33	0	0	16.66	0	0	25.00	2,462,894,000	0	0.00%	0	0.00%	1,285,000	0.05%
11	3165.QCD.U02 Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan di BBPOM di Bandung	8	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	612,126,000	0	0.00%	35,944,056	6.28%	59,605,996	10.42%
12	3165.QDC.001 Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	95	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	94.74	6,480,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
13	3165.QDG.001 UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	22	1	1	5.00	1	1	5.00	3	3	14.09	24,479,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
14	3165.QIA.001 Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	745	81	81	10.87	135	135	18.12	195	195	26.17	587,126,000	0	0.00%	10,211,063	1.74%	21,907,695	3.73%
15	3165.QIA.002 Sampel Obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa sesuai standar oleh UPT	1781	96	96	5.39	231	231	12.97	364	364	20.44	1,422,773,000	0	0.00%	27,341,808	1.92%	82,954,451	5.83%
16	3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	324	7	7	2.16	19	19	5.86	29	29	8.95	360,436,000	0	0.00%	16,367,700	4.55%	30,879,200	8.58%
17	3165.QIC.003 Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	40	1	1	2.50	1	1	2.50	1	1	2.50	30,821,000	0	0.00%	1,047,500	3.40%	1,047,500	3.40%
18	3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, OT, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	1072	24	24	2.24	76	76	7.09	129	129	12.03	766,158,000	0	0.00%	34,042,792	5.30%	67,995,190	10.59%
19	3165.RAB.001 Alat Laboratorium Pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0	0	0.00	0	0	0.00	0	0	0.00	1,884,584,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
20	6384.EBA.956 Layanan BMN	1	0	0	8.33	0	0	16.66	0	0	25.00	2,500,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
21	6384.EBA.994 Layanan Perkantoran	1	0	0	8.33	0	0	16.66	0	0	25.00	19,434,184,000	999,066,035	5.14%	2,232,005,438	11.48%	4,341,990,649	22.34%

B. Evaluasi Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran						
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3		
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65	0.00	100.00	#DIV/0!	92.65	94.71	102.23	92.65	96.18	103.81	1,422,773,000	0	0.00%	27,341,808	1.92%	82,954,451	5.83%	
		Persentase sarana pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	94.87	103.12	92.00	93.34	101.46	341,088,800	0	0.00%	6,126,638	1.80%	13,144,617	3.85%	
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,779,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	0.00	0.00	0.00	93.50	0.00	0.00	93.50	70.00	74.87	181,958,200	0	0.00%	4,084,425	2.24%	8,763,078	4.82%	
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	85.25	70.72	82.96	85.25	77.46	90.86	85.25	80.00	93.84	2,668,800	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%	
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	95.73	100.00	104.46	95.73	100.00	104.46	95.73	100.00	104.46	178,553,100	0	0.00%	8,183,850	4.58%	15,439,600	8.65%	
		Persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	92.93	100.00	107.61	92.93	100.00	107.61	92.93	100.00	107.61	178,553,100	0	0.00%	8,183,850	4.58%	15,439,600	8.65%	
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	96.08	95.45	99.35%	96.08	96.67	100.61%	96.08	99.28	103.33	314,307,000	0	0.00%	11,994,136	3.82%	27,490,171	8.75%	
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90	97.90	100.00	102.15%	97.90	100.00	102.15%	97.90	100.00	102.15	264,014,000	0	0.00%	11,994,136	4.54%	27,490,171	10.41%	
		Persentase iklan sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	95.12	100.00	105.13	95.12	99.62	104.73	95.12	99.28	104.37	23,615,500	0	0.00%	2,851,511	12.07%	3,721,511	15.76%	
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91.68	91.68	100.00	109.08	91.68	100.00	109.08	91.68	100.00	109.08	14,552,000	0	0.00%	0	0.00%	1,612,233	11.08%	
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,246,500	0	0.00%	7,203,011	17.90%	9,293,339	23.09%	
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.20	87.30	100.11	4,236,980,000	0	0.00%	0	0.00%	1,285,000	0.03%	
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%			

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Tahunan	B1			B2			B3			Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran					
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian		B1		B2		B3	
		pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman																	
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63.00	0.00	1.59	1.59	1.59	1.59	99.83	1.59	1.59	100.00	30,821,000	0	0.00%	1,047,500	3.40%	1,047,500	3.40%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja BBPOM di Bandung	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	92.40	#DIV/0!	89.90	90.76	100.96	4,066,828,000	0	0.00%	90,000,000	2.21%	2,465,937,032	60.64%
		Jumlah sekolah pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) aman	17	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	67,933,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		Jumlah desa pangan aman	6	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	92,775,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	2.00	2.00	100.00	5.00	5.00	100.00	10.00	10.00	100.00	35,767,000	999,066,035	5.14%	0	0.00%	0	0.00%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	34.21	5.00	5.00	100.00	13.00	5.00	38.46	40.00	14.09	35.23	24,479,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan BBPOM di Bandung	84.00	38.00	39.67	104.39	40.00	41.67	104.17	41.00	41.67	101.63	572,012,000	0	0.00%	35,944,056	6.28%	59,605,996	10.42%
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif	Persentase Kepatuhan Penyampaian Laporan Analisis Penjejak Digital yang Diselesaikan oleh BBPOM di Bandung	91.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	50.00	50.00	100.00	23,440,000	0	0.00%	716,500	3.06%	3,082,500	13.15%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,247,000	0	0.00%	27,272,744	13.29%	72,460,353	35.30%
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT Balai Besar di Bandung	91.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,707,115,500	0	0.00%	2,276,172,304	11.55%	4,402,646,915	22.34%
		Nilai AKIP Balai Besar di Bandung	81.5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,936,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar di Bandung	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,450,000	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
		Indeks Manajemen Risiko Balai Besar di Bandung	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,212,500	0	0.00%	0	0.00%	0



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN SATKER

NO	Periode	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (Pengurangan)	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
							Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Nilai Aspek	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Nilai Aspek	Capaian Output	Nilai Aspek				
1	03 Maret	095	063	432753	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN BANDUNG	NILAI BOBOT NILAI AKHIR	100,00 10 10,00	100,00 15 15,00	100,00	94,20 20 18,84	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	100,00 10 10,00	98,55	0,00 25 0,00	0,00	73,84	100,00%	0,00	73,84

Data Realisasi Iku

Pilih Bulan

Maret

- ⓘ Informasi ini Khusus UPT!!!
- ⓘ Untuk indikator dengan label PK AWAL, agar tidak diisi realisasinya dari bulan Agustus s/d Dese

Kirim Data Terpilih

Export Data

Cari

	<input type="checkbox"/>							
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT		Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	92.65	96.18	103.81%		% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 99.42 % Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%) 94.18 % Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 95.26 % Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan 95.88





<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p>	<p>Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p>	<p>Maret</p>	<p>92.0</p>	<p>93.34</p>	<p>101.46%</p>	<p>Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%) 88.13 Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) 100 Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%) 100 Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%) 100 Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%) 100 Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%) 78.57</p>	
<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p>	<p>Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</p>	<p>Maret</p>	<p>100.0</p>	<p>0</p>	<p>0.00%</p>	<p>Belum ada sampel</p>	
<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p>	<p>Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p>	<p>Maret</p>	<p>93.5</p>	<p>70</p>	<p>74.87%</p>	<p>% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%) 100 % Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%) 0 % Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%) 0 % Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%) 100</p>	
<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p>	<p>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</p>	<p>Maret</p>	<p>85.25</p>	<p>80</p>	<p>93.84%</p>	<p>% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha 60 % Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor 100</p>	
<p>Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</p>	<p>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</p>	<p>Maret</p>	<p>95.73</p>	<p>100</p>	<p>104.46%</p>	<p>% Sarprod Obat 100 % Sarprod OBA 100 % Sarprod SK 100 % Sarprod Kosmetik 100</p>	



efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	92.93	100	107.61%	% Ketepatan waktu 100 % Ketepatan tindak lanjut 100 % Evaluasi Ketepatan Grading 100	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96.08	99.28	103.33%	% Sardis Obat 97.84 % Sardis OBA dan SK 100 % Sardis Kosmetik 100	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	97.9	100	102.15%	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%) 20 % Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%) 70 % Ketepatan Waktu (Bobot 10%) 10	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Maret	95.12	99.28	104.37%	% Iklan Obat 100 % Iklan Kos 100 % Iklan OBA 96.38 % Iklan SK 100 % Iklan PO 100	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	Maret	91.68	100	109.08%	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label 100 % Ketepatan waktu pelaporan label 100	
Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Maret	87.2	87.3	100.11%		
Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	1.59	1.59	100.00%	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan 1 Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT 63	



	Meningkatnya efektivitas KIE	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Maret	89.9	90.76	100.96%		
	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Maret	10.0	10	100.00%	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah (25%) 10	
	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah desa pangan aman	Maret	10.0	10	100.00%	Advokasi Kelembagaan Desa (25%) 10	
	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Maret	10.0	10	100.00%	Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar (25%) 10	
	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	Maret	40.0	14.09	35.23%	% UMKM Pangan Olahan 270 % UMKM OBA 20 % UMKM Kosmetik 20	
	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Maret	41.0	41.67	101.63%	Nilai Realisasi SPDP 0 Nilai Realisasi Tahap I 0 Nilai Realisasi P21 4.25 Nilai Realisasi Tahap II 2	
	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Maret	50.0	50	100.00%		
Update Data	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Maret	-	-	0		
Update Data	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	Maret	-	-	0		



User - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung

Update Data	efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Maret	-	-	0	
Update Data	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	Maret	-	-	0	
Update Data	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Maret	-	-	0	
Update Data	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	Maret	-	-	0	
Update Data	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Maret	-	-	0	
Update Data	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Maret	-	-	0	

Menampilkan 1 sampai 28 dari 28 data

100 

data per halaman



NKO

Data Tahun 2026

97.00%

Pagu

Data Tahun 2026

Rp 331,658,478,000

Realisasi Anggaran

Data Tahun 2026

Rp 203,655,544,456

Capaian

Data Tahun 2026

61.41%

Kerangka Kerja Logis

Pilih Bulan

Maret



1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.65	96.18		
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0.00	0.00	-	-
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.00	93.34		
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100.00	0.00	-	-
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	93.50	70.00	74.87%	74.87%
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	85.25	80.00	93.84%	93.84%
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	95.73	100.00		
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	92.93	100.00		
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.08	99.28		
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	97.90	100.00		








11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	95.12	99.28		
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	91.68	100.00		
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0.00	0.00	-	-
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	87.20	87.30		
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0.00	0.00	-	-
16	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	1.59	1.59	100.00%	100.00%
17	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.90	90.76		
18	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	10.00	10.00	100.00%	100.00%
19	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah desa pangan aman	10.00	10.00	100.00%	100.00%
20	Meningkatnya efektivitas KIE	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10.00	10.00	100.00%	100.00%
21	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	40.00	14.09		
22	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	41.00	41.67		
23	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50.00	50.00	100.00%	100.00%
24	Layanan Publik UPT yang prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0.00	0.00	-	-
25	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
26	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai AKIP UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
27	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0.00	0.00	-	-








28	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0.00	0.00	-	-
----	--	----------------------------------	------	------	---	---

Legend Kerangka Kerja Logis

Warna Keterangan

-  Kurang (Capaian < 60)
-  Cukup (60 >= Capaian <= 90)
-  Baik (90 > Capaian <= 100)
-  Sangat Baik (100 > Capaian <= 110)
-  Tidak Dapat Disimpulkan (Capaian > 110)

Legend Nko

- | Predikat Nko | Warna |
|--|---|
| Sangat Kurang (Capaian <= 20) |  |
| Kurang (20 > Capaian <= 60) |  |
| Butuh Perbaikan (60 > Capaian <= 80) |  |
| Baik (80 > Capaian <= 100) |  |
| Istimewa (Capaian > 100) |  |

**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANDUNG**

**NOTA DINAS
NOMOR: PR.10.01.8A.04.26.272**

Yth. : Seluruh Ketua Tim Kerja dan Perwakilan masing-masing Bagian/ Poksi di Balai Besar POM Bandung
Dari : Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung
Lampiran : -
Hal : Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Triwulan I TA 2026
Tanggal : 09 April 2026

Sehubungan dengan berakhirnya Triwulan I Tahun Anggaran 2026 maka kami mengundang seluruh Ketua Tim Balai Besar POM di Bandung dan 1 - 2 peserta anggota yang ditunjuk untuk melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Jumat, 10 April 2026
Pukul : 08.00 s.d. selesai
Tempat : Zoom Meeting

Diharapkan masing-masing ketua tim menyampaikan paparan sebagai berikut :

A. Tim Manajemen Kinerja :

1. Capaian Output
2. Capaian Kinerja IKU
3. Realisasi Anggaran

B. Ketua Tim :

1. Tindak Lanjut rekomendasi sebelumnya
2. Kendala dan permasalahan
3. Manajemen Risiko

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih



Drs, I Made Bagus Gerametta, Apt.
















Daftar Hadir Kegiatan Balai Besar Pom Di Bandung

Agenda : Rapat monev capaian bulan Maret (TW1) 2026

Lokasi :

Waktu : Jumat, 10 April 2026 08:00 s/d Selesai

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
1.	Agung Purwanto	197609082002121001	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
2.	Aini Ratnawati	197908152003122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
3.	Alia Kadersih Abubakar	197808212003122001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
4.	Angga Nugraha	198607182009121003	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
5.	Ayi Mahpud Sidik	197809262005011001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
6.	Dwi Arunningtyas	198709202010122006	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
7.	Dwi Kurniasari	198101082006042004	Kepala Bagian Tata Usaha Pada Balai Besar Pom Di Bandung	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
8.	Dwie Astrini	197907142005012002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
9.	Fany Nurmalasari	197910012005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
10.	Fina Silfiani	198911092015022004	Pranata Keuangan Apbn Mahir	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
11.	Fitria Augustin Tirahmadani	198008082005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
12.	Fitria Puspawati	197811222005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
13.	I Made Bagus Gerametta	196907181996031001	Kepala Balai Besar Pom Di Bandung	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
14.	Ida Rahmawati	198703102009122003	Pranata Keuangan Apbn Penyelia	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
15.	Insan Nurul Padjar	198212312008121004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
16.	Jajat Setia Permana	198008152005011001	Perencana Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	

No	Nama	NIP/NIK	Jabatan	Unit Kerja/ Instansi	Jenis Kelamin	Kehadiran	TTD
17.	Leni Maryati	197005131997032001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFO	
18.	Meliza Miranda Widyasari	197907062005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
19.	Mila Nur Mauludiawati	197902032005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
20.	Nina Listiani	198112232006042002	Analisis Sdm Aparatur Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
21.	R. Anieska Sandyarani	198605202025212012	Penata Layanan Operasional	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
22.	R. Oppy Sophiawaty	197003111989012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
23.	Reni Novianti	198006202006042004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
24.	Ria Fitriana	197904012005012002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
25.	Ridwan Saputra	199302012025211019	Analisis Sdm Aparatur Ahli Pertama	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
26.	Rizqie Noor Adrianto	198103052005011001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Muda	Balai Besar Pom Di Bandung	Pria	Daring - WFH	
27.	Siti Aminah	197908122005012001	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
28.	Wenni Warastuti	197711122006042004	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFH	
29.	Yenny Nina Febriyanti Kembaren	197702172003122002	Pengawas Farmasi Dan Makanan Ahli Madya	Balai Besar Pom Di Bandung	Wanita	Daring - WFO	

Notulen Rapat

Materi Rapat : Rapat Monev Capaian Kinerja sampai dengan bulan Maret 2026
Waktu Pelaksanaan : Jumat, 10 April 2026
Tempat : Zoom meeting
Pimpinan Rapat : Kepala BBPOM Bandung
Peserta Rapat : Seluruh Ketua tim Kerja, tim Perencana/Monev, Tim Keuangan.

1. Pembukaan dan Arahan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung, Drs. I Made Bagus Gerametta Apt.:
 - 1.1. Ucapan terimakasih dari Kepala Balai Besar POM di Bandung atas kinerja yang baik selama Triwulan I 2026.
 - 1.2. Serapan Anggaran TA 2025 adalah 22.20% (Sakti) dan 22.20% (Omspan).
 - 1.3. Minggu depan sudah menerapkan WFH, namun layanan publik tetap jalan. Diharapkan untuk dimonitoring dan diatur dari masing-masing Ketua Tim. sudah dibuatkan BBPOM di Bandung on call dan dibagi petugas.
 - 1.4. Akan dilaksanakan pembinaan oleh deputy 3 selaku deputy pembina pada tanggal 23 April 2026.

Paparan Capaian Output Bulan Maret 2026 :

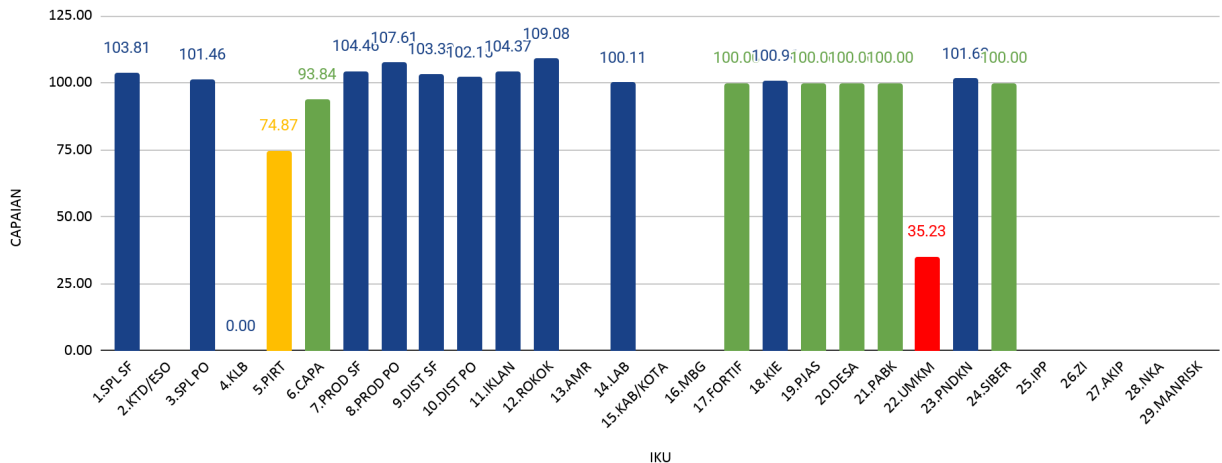
No.	Anggaran Kegiatan	% capaian output	% capaian anggaran	Kesimpulan	Hasil evaluasi
1	AEA (Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan)	21.43%	13.15%	-	
2	BAH (Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik)	29.76%	35.30%	-	
3	BDB.001 (Sekolah dengan PJJAS aman)	10.00%	0.00%	-	
4	BDB.002 (Desa pangan aman)	10.00%	0.00%	-	
5	BDB.003 (Pasar aman)	10.00%	0.00%	-	
6	BDC (KIE)	43.21%	60.72%	-	
7	BIA (Pengawasan dan pengendalian Produk)	25.00%	11.08%		
8	BKB (Laporan koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan)	16.66%	9.26%	-	
9	BMB (Layanan Publikasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan) capaian output, capaian anggaran Kesimpulan	9.09%	24.76%	-	
10	PDD (Laboratorium Pengawasan sesuai GLP)	25.00%	0.05%	-	
11	QCD (Perkara di Bidang Penyidikan)	0.00%	10.42%	-	
12	QDC (Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat)	94.74%	0.00%	-	
13	QDG (UMKM yang didampingi)	11.20%	0.00%	-	
14	QIA.001 (Sampel makanan)	26.17%	3.73%	-	
15	QIA.002 (sampel obat, OT, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan)	20.44%	5.83%	-	
16	QIC.001 (Sarana Produksi)	8.95%	8.58%	-	
17	QIC.003 (Sarana produksi fortifikasi)	2.50%	3.40%	-	
18	QIC.004 (Sarana Distribusi)	12.03%	10.59%	-	
19	RAB (alat laboratorium)	0.00%	0.00%	-	
20	EBA (Layanan BMN)	25.00%	0.00%	-	
21	EBA (Layanan Perkantoran)	25.00%	22.34%	-	

2. Capaian Anggaran Maret 2026

- 2.1. Terdapat selisih lebih RPD sehingga nilai belum maksimal, akan dimaksimalkan di Triwulan II 2026.
- 2.2. Penyesuaian Target masih dalam proses revisi DJA.
- 2.3. Nilai IKPA 73.84, Nilai Penyerapan anggaran belum maksimal, sehingga perlu dilakukan percepatan kegiatan dan realisasi di Triwulan II, dan Capaian Output masih dalam proses sosialisasi dan input target sehingga belum masuk penilaian IKPA Triwulan I.

3. Capaian Kinerja Maret 2026

CAPAIAN KINERJA MARET 2026



- 3.1. Sebagian besar IKU belum dapat dihitung dan diukur pada akhir tahun dan ada beberapa yg menunggu penetapan penyesuaian target RO, dan adanya perubahan PK RAPK 2026.

4. Arahan Kepala Balai Besar POM di Bandung

- 4.1. Realisasi Anggaran harap dilaksanakan dengan baik di Triwulan II
- 4.2. Adanya Realisasi IKU UMKM dengan kategori kurang untuk di reviu kembali dan dilakukan penyesuaian target. Dan dapat disampaikan saat kegiatan pembinaan kinerja oleh deputi pembina.
- 4.3. Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I dengan kategori Baik, sehingga akan berpengaruh pada pemberian predikat sangat baik pegawai. Agar diperbaiki pada triwulan berikutnya sehingga NKO menjadi kategori Istimewa.
- 4.4. Nilai RPD pada triwulan I masih masuk dispensasi, namun mulai triwulan II tidak ada lagi dispensasi sehingga agar dipersiapkan dengan baik.
- 4.5. Kebijakan WFH sesuai kesepakatan adalah 1 hari dalam 1 minggu pada hari Jumat mengingat pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan dari rumah. Dan mohon dikomunikasikan kembali dengan biro SDM melalui tim kepegawaian.
- 4.6. SKP agar segera diingatkan ke pegawai mengingat tanggal 10 adalah batas akhir pengiriman SKP Pegawai.
- 4.7. Adanya pemotongan penajaman anggaran agar segera diinput dan dilaksanakan sesuai ketentuan.

5. Rencana Tindak Lanjut

5.1. Capaian Output

- 5.1.1. Memaksimalkan penyesuaian Target Output (RO) setiap TW

5.2. Deviasi Hal III DIPA

- 5.2.1. Kompensasi TW1 = nilai RPD 100%

- 5.2.2. Memaksimalkan penyesuaian RPD setiap TW2 ⇒ bersamaan dg revisi penajaman belanja

5.3. UP/TUP

5.3.1. Timeline TUP / UP + persentase GUP

5.3.2. Memaksimalkan Realisasi TUP = pengembalian TUP

5.3.3. Memaksimalkan penggunaan KKP = Target TW2 : 60jt

5.4. Penyerapan Anggaran

5.4.1. Memaksimalkan penggunaan simangga, tuk mempercepat proses realisasi anggaran dan juga monitoring nya ⇒ bisa dilakukan oleh masing2 petugas

Target TW 2 = 14.776.100.200 / (45.49%), terdiri dari :

Pegawai = 5.103.535.600 (40%)

⇒ 4.362.435.404

Barang = 8.918.731.000 (50%)

⇒ 3.929.956.949

Modal = 753.833.600 (40%)

5.5. Capaian Kinerja

5.5.1. Mempersiapkan kertas kerja raw data realisasi kinerja 2026, yang terintegrasi dengan RAPK (manekin)

6. Penilaian SKP

6.1. Penilaian SKP pegawai untuk segera dilaksanakan dan dilakukan pada Site Manekin 2026

7. Penyusunan PK RAPK TA 2026

7.1. Sudah ditetapkan PK dan RAPK 2026

7.2. Sudah ditetapkan target Direktif penugasan 2026

7.3. Kertas Kerja Indikator untuk target < realisasi 2025

8. Dilakukan review Risiko Semester 1 2026

Telah dilaksanakan review risiko dan pelaporan manajemen risiko semester 1 2026, yang telah disampaikan melalui sapaapip (20-01-2026)

Penutupan oleh Kepala Balai Besar POM di Bandung Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Notulen



Jajat Setia Permana, S.Si., Apt., M.Si.

Bandung, 10 April 2026

Mengetahui,

Kepala Balai Besar POM di Bandung



Drs. I Made Bagus Gerametta, Apt.

Dokumentasi Rapat

